



Australian Government

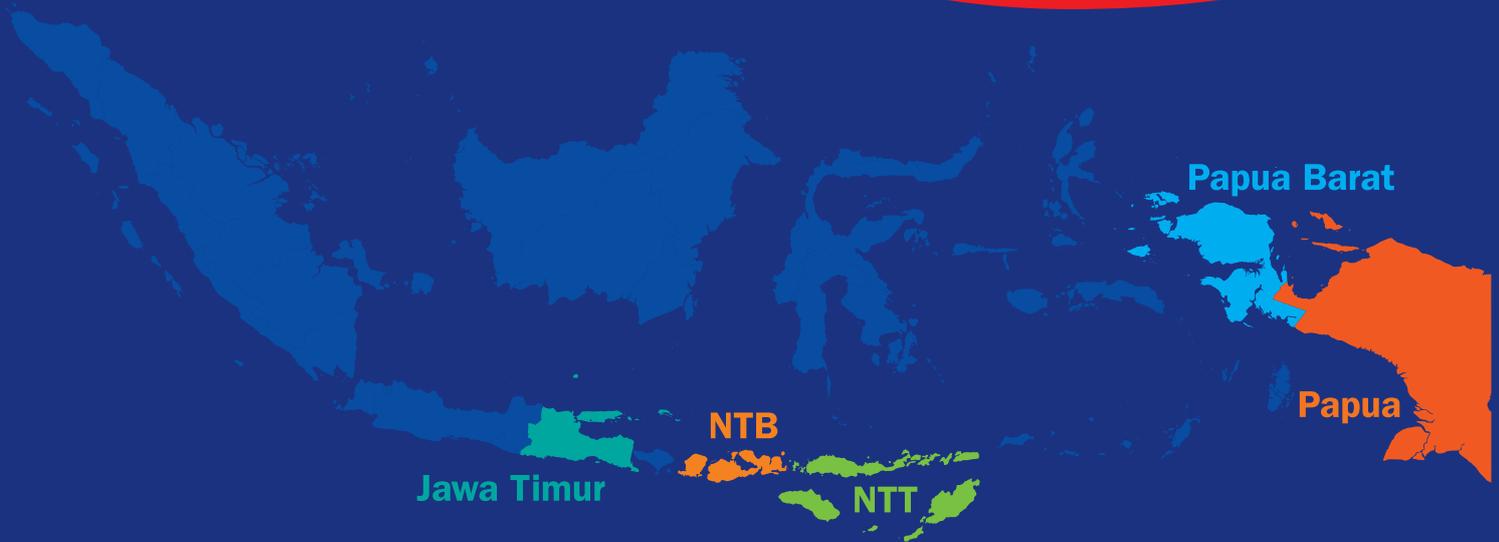
Department of Foreign Affairs and Trade

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)

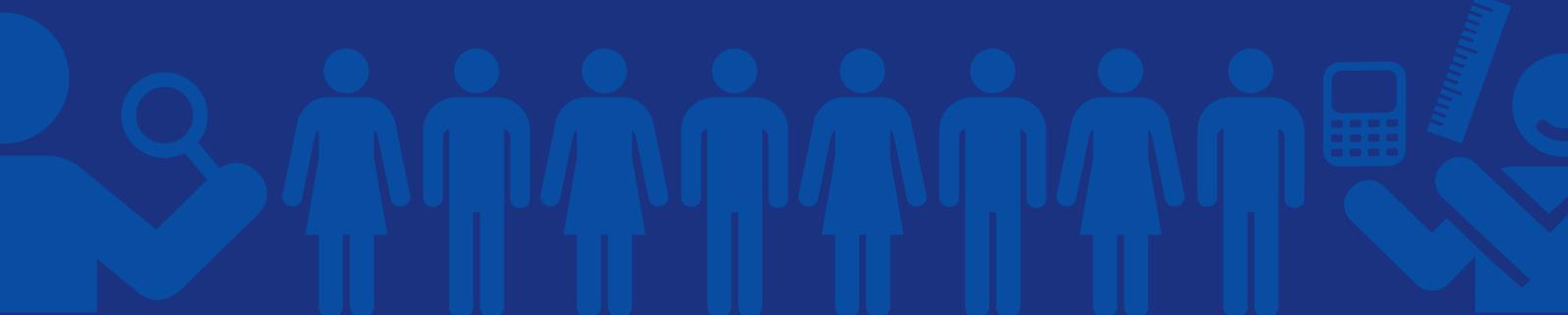
Australian
Aid 



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



**PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN DAN ANALISIS
DATA TERPILAH UNTUK
PERENCANAAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER
DI DAERAH**



Buku Pedoman ini diterbitkan oleh:

**Australia Indonesia Partnership for Decentralisation
(AIPD)**

Untuk informasi lebih jauh mengenai program-program AIPD dapat menghubungi:

Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD)

Cyber 2 Tower 18th Floor, Suite M.35,
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 13
Jakarta 12950

Phone: +62 21 5799 8999, 5799 8932

Web www.aipd.or.id

Email: info@aipd.or.id

**PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN DAN ANALISIS
DATA TERPILAH UNTUK
PERENCANAAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER
DI DAERAH**

Penulis:

Soedarti Surbakti

Editor:

Chandra Sugarda



Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Acknowledgements

Buku pedoman teknis ini disusun atas kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD). Terima kasih kami ucapkan kepada para kontributor, yaitu Soegarenda Sosromihardjo, Elisabeth Bte Thomas, Harya Bharata S., dan Sugeng Riyanto atas kontribusinya melengkapi buku ini dengan data-data sektor pendidikan dan kesehatan. Apresiasi juga kami berikan kepada Mohamad Wahyudi, Ancilla Irwan, Arif Nur Alam, Sukmawah Yuningsih dan Dede Indra Kurniawan atas saran dan masukannya dalam penyusunan buku pedoman teknis ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Shintya Sekarsari dan Desi Ariyani atas dukungan logistiknya untuk finalisasi buku ini.

Disclaimer

Pandangan dan pendapat dalam buku pedoman teknis ini bersumber dari tim penyusun, dan tidak serta merta menggambarkan pandangan Pemerintah Australia.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai buku pedoman teknis ini, silakan hubungi:

Chandra Sugarda (chandra.sugarda@aipd.or.id)

dan Layanan Informasi AIPD (info@aipd.or.id)



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Sambutan

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Strategi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tercermin pada peraturan pemerintah, seperti Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Selain itu, Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah telah mengatur pelaksanaan PUG di daerah, terkait pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG, serta pengaturan tentang penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender. Peraturan menteri ini diperkuat lagi dengan terbitnya Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: SURAT EDARAN NOMOR: 270/M.PPN/11/2012 NOMOR: SE-33/MK.02/2012, NOMOR: 050/4379A/SJ, NOMOR: SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Dalam perjalanannya, ada variasi intensitas dan efektivitas pelaksanaan PUG antar-kementerian dan lembaga, antar-tingkat pemerintahan, dan antar-wilayah, sehingga derajat kesetaraan dan keadilan gender yang dicapai belum terlihat merata terutama di daerah. Untuk mendorong efektivitas pelaksanaan PUG, setiap perencanaan dan penganggaran daerah perlu dilengkapi dengan analisis gender tentang bagaimana suatu program/kegiatan disusun agar dapat memberikan manfaat kepada kelompok perempuan dan laki-laki.

Prasyarat utama analisis gender adalah ketersediaan data terpilah yang dirinci menurut jenis kelamin, meliputi data tentang adanya kesenjangan pemanfaatan program/kegiatan pembangunan dan data tentang penyebab terjadinya kesenjangan tersebut, baik yang terkait dengan kondisi masyarakat umumnya maupun kondisi pelaku pembangunan pada khususnya. Agar percepatan PUG melalui PPRG dapat berjalan sesuai dengan harapan, terutama di tingkat pemerintahan kabupaten/kota, maka prasyarat tersedianya data terpilah harus terpenuhi.

Buku 'Pedoman Teknis Penyusunan dan Analisis Data Terpilah untuk Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah' ini dibuat untuk melengkapi buku-buku yang telah ada, dengan fokus materi bahasan pada sektor pendidikan dan kesehatan dan membatasi contoh dengan data beberapa kabupaten saja; walau demikian pembaca dapat mengembangkannya pada bidang pembangunan lain di seluruh kabupaten/kota.

Besar harapan kami, buku pedoman teknis ini dapat dipakai sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran responsif gender, tidak hanya pada sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi pada sektor-sektor pembangunan lainnya. Dengan demikian, data terpilah di seluruh bidang pembangunan dapat tersedia dan tercatat dengan lengkap. Hal ini sangat menentukan besarnya peran Pemda dalam percepatan PUG melalui PPRG.

Jakarta, 1 Oktober, 2014

**Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**



Linda Amalia Sari SIP



Pengantar
DUTA BESAR AUSTRALIA UNTUK INDONESIA

Australia sudah lama mempunyai komitmen kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan pria sangat penting untuk kemakmuran dan keamanan. Itulah mengapa mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan berada di pusat kebijakan luar negeri Australia.

Secara global, kemajuan yang mencolok dalam kesetaraan gender telah diraih. Kesenjangan gender pada akses ke pendidikan telah dipersempit dan kematian ibu telah menurun. Namun demikian, ketimpangan gender terus berlangsung, merongrong pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Perempuan dan anak perempuan terus-menerus terkena dampak kemiskinan, diskriminasi dan kekerasan secara tidak sebanding. Perempuan kurang terwakili dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan dan menghadapi tantangan-tantangan khusus seperti kesehatan dan pendidikan yang lebih buruk serta praktik-praktik yang merugikan seperti perkawinan dini dan paksa.

Indonesia telah menuai kemajuan besar dalam mengentaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan penduduknya. Misalnya, antara 2009 dan 2011 rata-rata pendidikan yang ditempuh anak-anak Indonesia meningkat dari 7,72 tahun menjadi 8,08 tahun. Namun demikian, manakala datanya diurai berdasarkan gender, anak laki-laki menempuh pendidikan lebih dari delapan tahun sementara anak perempuan mendekati tujuh tahun.

Guna memastikan kesetaraan akses dan partisipasi dalam semua pelayanan pemerintah, pertimbangan gender harus diurus-utamakan menjadi bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya. Secara khusus, pemerintah dalam setiap tingkat harus menggunakan teknik untuk mengakomodasikan pertimbangan gender dalam rencana-rencana dan anggaran mereka. Indonesia telah bekerja tanpa mengenal lelah selama lebih dari satu dasawarsa untuk mendorong kementerian nasional, pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menggunakan teknik perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi perempuan dan anak perempuan.

Namun demikian, data yang diperlukan untuk mendukung agenda ini, yang paling penting lagi data yang mengidentifikasi gender, tetap langka di banyak bidang. Dengan alasan ini, Pemerintah Australia telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan panduan teknis tentang bagaimana mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data-data tersebut guna mendukung perencanaan dan penganggaran yang tanggap-gender.

Selamat kami ucapkan kepada Pemerintah Indonesia atas pengembangan dan penerbitan panduan ini, yang kami harap akan membantu pemerintah daerah untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang mengarah pada pengurangan kesenjangan gender, khususnya dalam pendidikan dan kesehatan. Kesetaraan kesempatan dan perlakuan terhadap perempuan dan pria akan membuahkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan membantu negara menjadi lebih stabil, makmur dan berdaya tahan.

Jakarta, 1 Oktober, 2014

Duta Besar Australia untuk RI

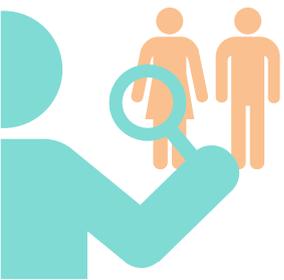
Greg Moriarty

DAFTAR ISI:	Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	i
	Sambutan Duta Besar Australia untuk Indonesia	ii
	Daftar Isi	iii
	Daftar Tabel dan Daftar Gambar	iv
	Daftar Lampiran	v
	Daftar Singkatan	vi
	Bab I: Latar Belakang dan Tujuan	1
	Bab II: Relevansi Penyusunan Data Terpilah	4
	Bab III: Pengertian dan Definisi Teknis	8
	Bab IV: Identifikasi Jenis Data Terpilah yang Dibutuhkan	12
	Bab V: Sumber Data	16
	BabVI: Penyajian Data Terpilah	19
	1. Tabel	20
	2. Narasi	23
	3. Gambar	24
	Bab VII: Analisis Kesenjangan Gender	26
	1. Analisis Sederhana.....	26
	2. Analisis Komprehensif	28
	Bab VIII: Pemanfaatan Data Terpilah dan GAP dalam PPRG	33
	Bab IX: Penutup	37
	Daftar Pustaka.....	38
	Lampiran	40

Daftar Singkatan

AKB	Angka Kematian Bayi
AKI	Angka Kematian Ibu
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BBLR	Berat Badan Lahir Rendah
BPA	Beijing Platform for Actions
BPS	Badan Pusat Statistik
CEDAW	Convention for the Elimination of Discrimination Against Women
CSO	Civil Society Organization
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	Focus Group Discussion
GAD	Gender And Development
GAP	Gender Analysis Pathway
GBS	Gender Budget Statement
GII	Gender Inequality Index
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
Inpres	Instruksi Presiden
IPG	Indeks Pembangunan Gender
K4	Kunjungan ke-4 ibu hamil
KLB	Kejadian Luar Biasa
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	Millenium Development Goals
PAG	Pernyataan Anggaran Gender
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	Perserikatan Bangsa-bangsa
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Pokja PUG	Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
PPRG	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PROBA	Problem-based Analysis
PUG	Pengarusutamaan Gender
RAD	Rencana Aksi Daerah
RKA	Rencana Kerja Anggaran
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SE	Surat Edaran

SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
Susenas	Survei Sosial dan Ekonomi Nasional
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
TOR	Terms of Reference
UNDP	United Nations Development Programme
Unifem/UN Women	United Nations Development Fund for Women
UU	Undang-undang
WAD	Women And Development
WID	Women in Development



BAB 1

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

“Salah satu bentuk ketimpangan yang banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di kalangan internasional, adalah ketimpangan antar-jenis-kelamin atau kesenjangan gender.”

1. Latar Belakang

Manfaat hasil-hasil pembangunan di Indonesia belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Berbagai bentuk ketimpangan atau kesenjangan yang ada, menjadi halangan bagi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat untuk turut menikmati hasil pembangunan dari program pemerintah daerahnya. Ketimpangan terjadi pada berbagai kelompok masyarakat, termasuk diantaranya ketimpangan antar-wilayah, antar-kelompok-sosial-ekonomi serta antar-jenis-kelamin.

Salah satu bentuk ketimpangan yang banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di kalangan internasional, adalah ketimpangan antar-jenis-kelamin atau kesenjangan gender. Berbagai indikator dan indeks terkait kesenjangan gender sudah tersedia untuk mengukur besar kecilnya kesenjangan gender yang terjadi pada suatu wilayah atau pada sektor pembangunan. Kesenjangan gender terjadi pada berbagai aspek/sektor pembangunan, seperti politik, ekonomi aspek sosial budaya (Badan Pusat Statistik, 2014).

Kesenjangan gender pada bidang politik terlihat dari keterwakilan perempuan di DPR atau DPRD, sedangkan pada bidang ekonomi terlihat dari perbedaan upah serta sebaran tenaga kerja perempuan dan laki-laki. Pada bidang politik, misalnya, keterwakilan perempuan dalam DPR hasil pemilihan umum tahun 2009 hanya sekitar 18,60 persen atau jauh dari porsi mereka dalam populasi. Proporsi keterwakilan perempuan ini menurun pada pemilihan legislatif tahun 2014, menjadi 17,30 persen. Pada bidang ekonomi terdapat kesenjangan gaji/upah tenaga kerja perempuan dengan laki-laki dengan rasio gender sekitar 74.75 persen di sektor pertanian dan 76.43 persen di sektor non-pertanian.

Sementara itu pada sektor pendidikan, peran perempuan dalam posisi pengambil keputusan jauh lebih rendah dari laki-laki. Hal ini ditunjukkan dalam proporsi kepala sekolah perempuan dan laki-laki, dimana semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah proporsi kepala sekolah perempuannya. Pada tingkat Sekolah Dasar, proporsi kepala sekolah perempuan mencapai 35,48 persen. Angka ini menurun pada jenjang SMP dengan proporsi 15,94 persen dan terus menurun pada jenjang setingkat SMA menjadi 12,23 persen.

Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki ketimpangan gender tinggi dan masuk dalam kelompok *Medium Human*

Development Group (lihat Lampiran A). Pada tahun 2013, nilai Indonesia dalam Indeks Kesenjangan Gender (*Gender Inequality Index*) adalah 0.500 atau berada diantara Cambodia dengan angka 0.505 dan Bhutan dengan indeks 0.495 (UNDP, 2014). Angka ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-103 dari 187 negara yang didata. Menyadari hal ini Pemerintah Indonesia terus mempromosikan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi kunci untuk mengatasi ketimpangan gender dalam berbagai sektor pembangunan.

Untuk mendukung strategi pengarusutamaan gender, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan produk hukum seperti Inpres No. 9/2000, Permendagri No. 15/2008, Permendagri No. 67/2011, serta UU No. 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, yang memberi mandat kepada menteri-menteri dan instansi pemerintah untuk mengintegrasikan gender ke dalam semua rencana dan program-program pembangunan. Pada tahun 2012, terbit Surat Edaran Bersama antara 4 (empat) Kementerian, yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) Nomer 270/M.PPN/11/2012; Nomer SE-33/MK.02/2012; Nomer 050/4379A/SJ dan SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Pada tingkat sub-nasional instruksi-instruksi tersebut belum diimplementasikan secara keseluruhan. Pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) sangat bergantung pada pemahaman dan pengetahuan para pengambil kebijakan tentang status keadilan dan kesetaraan gender di wilayah masing-masing. Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender banyak provinsi dan kabupaten/kota yang sudah menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, sudah banyak pula yang membentuk dan mengaktifkan Kelompok Kerja/Pokja PUG dalam mengumpulkan data terpilah, tetapi masih banyak juga yang baru melangkah pada tataran sosialisasi PUG.

Untuk memperbaiki posisi Indonesia dalam hal pembangunan gender, perlu dukungan dari berbagai pihak terhadap strategi nasional untuk memperkuat dan meningkatkan intensitas implementasi PUG yang telah dicanangkan oleh empat menteri, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Menteri KPPPA, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Salah satu dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan untuk pengumpulan, analisis dan penggunaan data yang terpilah menurut jenis kelamin untuk dipakai dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintahan lokal. Ketersediaan data terpilah ini merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan analisis dalam menentukan program-program kerjanya, agar dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga laki-laki dan perempuan di wilayah itu.

Berdasarkan kebutuhan itulah, buku “Pedoman Teknis Penyusunan dan Analisa Data Terpilah untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender” ini disusun. Untuk melakukan proses perencanaan dan penganggaran responsif gender, SKPD-SKPD perlu melakukan analisis gender, diantaranya dengan metode Gender Analysis Pathway (GAP), dan menerjemahkan hasil analisa tersebut kedalam dokumen perencanaan, atau Gender Budget Statement (GBS) yang merupakan dokumen resmi yang perlu dilampirkan pada RKA. Untuk penyusunan GAP dan GBS ini, ketersediaan data terpilah yang lengkap dan tercatat dengan baik sangat dibutuhkan oleh setiap SKPD. Tidak hanya itu, unit-unit layanan dasar pun perlu mulai melakukan pencatatan dan pendataan dengan terpilah, untuk mendukung kelengkapan data SKPD di atasnya.

Selain untuk unit layanan dasar dan SKPD, buku panduan ini juga berguna bagi kelompok-kelompok masyarakat lain seperti CSO, Community Center, serta anggota parlemen, untuk melakukan advokasi dan pendampingan kepada pemerintah lokal. Dengan

panduan ini, kelompok-kelompok masyarakat dapat turut mengenali penyusunan data terpilah yang lengkap dan terarah serta turut mengumpulkan data dari wilayah masing-masing, sehingga ketersediaan data dengan tingkat akurasi tinggi semakin banyak.

Buku panduan ini menitikberatkan fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu perhatian utama pembangunan Indonesia. Namun, bila pemerintah daerah bermaksud melaksanakan pengumpulan dan analisis data terpilah pada sektor lain, maka buku pedoman ini dapat tetap digunakan sebagai panduan dasar, dengan penyesuaian pada indikator-indikator sesuai dengan sektor yang dimaksud.

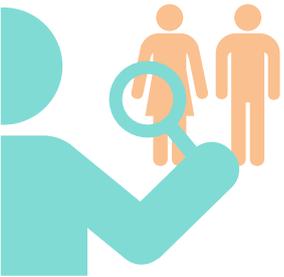
“Tujuan umum pedoman teknis ini adalah untuk mendukung implementasi pengarusutamaan gender (PUG) terutama Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender atau PPRG di daerah.”

2. Tujuan

Tujuan umum pedoman teknis ini adalah untuk mendukung implementasi pengarusutamaan gender (PUG) terutama Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender atau PPRG di daerah, yang dibagi dalam empat tujuan khusus:

1. Memberikan panduan bagi pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan menyusun data terpilah bidang pendidikan dan kesehatan, pada khususnya, dan di semua sektor pembangunan pada umumnya.
2. Memberi panduan bagi unit-unit layanan dasar untuk mulai mengumpulkan dan menyusun data terpilah sesuai kebutuhan SKPD, agar penggunaannya dapat optimal.
3. Mendorong penggunaan data terpilah dalam analisis gender yang relevan bagi pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, pada khususnya, dan pada semua sektor pembangunan pada umumnya.
4. Memberi panduan bagi kelompok-kelompok masyarakat mengenai pengumpulan dan penyusunan data terpilah, agar advokasi-advokasi yang mereka lakukan lebih tajam dan terukur

Panduan ini dibuat agar dinas-dinas, unit layanan serta kelompok masyarakat lain yang mengikutinya, dapat menerbitkan buku data terpilah yang lengkap dengan analisisnya sesuai dengan bidang dan fokusnya masing-masing.



BAB 2

RELEVANSI PENYUSUNAN DATA TERPILAH

*“Karena posisi tawar yang lemah,
kelompok rentan merupakan sasaran yang paling
membutuhkan dukungan pemerintah.
Mereka perlu diidentifikasi dengan data terpilah.”*

Suatu program/kegiatan pembangunan akan memberikan hasil yang ideal bila dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Hasil yang ideal ini tidak selalu dapat dicapai karena adanya berbagai kendala, pada umumnya kendala sumber daya. Dalam situasi sumber dana yang dimiliki pemerintah terbatas, misalnya, maka jangkauan program/kegiatan pembangunan perlu dipersempit agar sumber pembiayaan mencukupi terlaksananya pembangunan. Oleh karena itu, segmentasi untuk mengidentifikasi kelompok yang paling membutuhkan, yaitu kelompok rentan atau rawan perlu dilakukan.

Dengan berbagai dasar pemikiran, karena posisi tawar yang lemah, kelompok yang rentan dapat dipilih sebagai sasaran yang paling membutuhkan dukungan pemerintah. Warga yang termasuk kelompok rentan diantaranya, kelompok penduduk miskin, penyandang cacat, nelayan dan petani kecil, penduduk usia tua (manula), penduduk wilayah kumuh dan penduduk wilayah terpencil, serta yang paling besar jumlahnya adalah perempuan dan anak-anak. Kelompok perempuan dan anak-anak ini jumlahnya paling besar, karena mereka terdapat di dalam kelompok-kelompok penduduk rentan lainnya. Dengan demikian, perhatian besar perlu diarahkan kepada kelompok ini.

Berdasarkan itulah, maka informasi yang disediakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pemerintah, haruslah dalam bentuk data terpilah. Dengan ketersediaan data terpilah ini pemerintah daerah dapat menentukan target dukungannya. Dalam hal ini, informasi yang dibutuhkan adalah data terpilah menurut jenis kelamin yang membagi penduduk menjadi dua segmen, yaitu laki-laki dan perempuan. Dengan data terpilah, pengambil kebijakan dapat: (i) mengidentifikasi perbedaan keadaan kelompok laki-laki dan perempuan, sehingga terbuka wawasan tentang adanya kesenjangan antara kedua kelompok tersebut; (ii) mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan pada kelompok-kelompok laki-laki dan perempuan; dan (iii) mengidentifikasi masalah yang dialami laki-laki dan perempuan, sehingga terbangun suatu pemahaman tentang bagaimana masalah tersebut akan diatasi.

Permasalahan yang disebabkan oleh adanya kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan atau kesenjangan gender, berhulu pada kenyataan bahwa di dalam diri para pembuat kebijakan itu sendiri, kesenjangan gender masih banyak ditemukan. Hal ini terlihat baik pada tataran kabupaten/kota, provinsi, maupun pada tingkat nasional, bahkan di dunia, seperti yang ditunjukkan oleh nilai Indeks Kesenjangan Gender atau *Gender Inequality Index*

(GII). Kesenjangan yang dimaksud adalah kecenderungan lebih berpihak pada salah satu kelompok penduduk daripada kelompok lainnya. Padahal keberpihakan ini bertentangan dengan Hak Azasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum.

Upaya untuk menghilangkan kesenjangan ini sudah banyak dilakukan pada tataran internasional, nasional maupun daerah. Beberapa pendekatan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan telah diperkenalkan (Julia Cleves Mosse dalam Amikawati, 2008), seperti pendekatan perempuan dalam pembangunan (Women In Development atau WID), pendekatan perempuan dan pembangunan (Women And Development atau WAD) dan pendekatan gender dan pembangunan (Gender And Development atau GAD). Perempuan yang pada awalnya hanya dipandang sebagai obyek dari kebijakan kesejahteraan rakyat, sejak pertengahan tahun 1970-an melalui WID mulai dilihat potensinya sebagai pelaku pembangunan yang dapat bekerja efisien dan produktif. Menjelang akhir tahun 1970-an, muncul pendekatan WAD yang menonjolkan pentingnya hubungan antara perempuan dengan fungsi dan perannya, baik dalam sektor publik maupun sektor domestik.

Pendekatan ini pun mengalami pergeseran, menjadi pendekatan gender dan pembangunan atau pendekatan pemberdayaan, yang muncul pada pertengahan 1980-an. Pendekatan Gender And Development (GAD) yang disebut juga pendekatan pemberdayaan, merupakan satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan, yaitu kerja produktif, reproduktif, domestik, serta peran publiknya. Pendekatan ini juga menentang serta menolak upaya apa pun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Pendekatan ini mempengaruhi upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Bersama-sama dengan negara-negara di dunia, Indonesia telah menandatangani kesepakatan untuk menghapuskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa kesepakatan internasional telah diratifikasi karena dianggap sesuai dengan upaya Pemerintah Indonesia menghilangkan kesenjangan gender tersebut. Di samping itu terdapat pula kesepakatan nasional yang bertujuan untuk menggunakan energi bersama menghapus kesenjangan tersebut yang akan juga diuraikan di bawah ini.

Beberapa konvensi tingkat internasional telah menyepakati penghapusan kesenjangan gender. Adapun tiga (3) diantara yang terpenting, diuraikan di bawah ini:

1. *Convention for The Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*

Dalam konvensi ini telah disepakati untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Kesepakatan ini telah diratifikasi Indonesia sebagai Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1984. Salah satu tindak lanjut dari kesepakatan ini adalah melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan implementasi CEDAW yang berisi informasi tentang laki-laki dan perempuan di negara anggota, termasuk Indonesia, secara berkala.

2. *Beijing Platform for Actions (BPA)*

Berdasarkan kesepakatan dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan pada tahun 1995 di Beijing, ada 12 isu gender yang perlu diperhatikan oleh negara-negara di dunia. Bidang-bidang yang perlu mendapat perhatian lebih intensif itu, termasuk diantaranya bidang pendidikan/pelatihan serta bidang kesehatan.

3. *Millenium Development Goals (MDGs)*

Kesepakatan dunia untuk menyejahterakan masyarakat telah disusun pada tahun 2000 oleh 189 negara anggota PBB pada saat itu. Pada kesepakatan ini terdapat rincian

tentang delapan tujuan pembangunan milenium atau biasa disingkat dengan MDGs. Dari delapan tujuan tersebut, hanya satu tujuan yang tidak secara langsung menyangkut gender, yaitu Tujuan ke-8: Kerjasama Global. Dalam Inpres Nomer 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan ditetapkan bahwa pencapaian seluruh sasaran MDGs menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia.

Agar fokus pembangunan dapat diarahkan pada segmen perempuan atau laki-laki yang tertinggal, maka diperlukan data terpilah pada semua bidang pembangunan. Indikator yang umumnya terukur secara kuantitatif untuk memantau dan mengevaluasi capaian tujuan pembangunan milenium, atau indikator MDGs, disarankan agar dipilah menurut laki-laki dan perempuan serta tipe tempat tinggal (perkotaan/perdesaan). Dalam daftar indikator MDGs, secara eksplisit disebutkan bahwa untuk tujuan MDGs ke-2 yaitu Pendidikan untuk Semua dan tujuan ke-3 yaitu Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, indikator wajib terpilah menurut jenis kelamin (Daftar Indikator MDGs Tujuan 1-7, dapat dilihat di Lampiran A.2).

Secara berkala kemajuan capaian MDGs nasional telah disebarluaskan untuk mengetahui kinerja pemerintah. Namun meskipun MDGs telah berjalan lama belum semua provinsi dapat melaporkan capaian MDGs dan pada tingkat kabupaten/kota kegiatan terkait MDGs baru terbatas pada penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk diimplementasikan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka data terpilah perlu dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan evaluasi kemajuan capaian di tingkat nasional tetapi juga di tingkat-tingkat dibawahnya. Dengan ketersediaan data terpilah yang lengkap dan akurat, semua daerah dapat memiliki rencana, program, dan anggaran yang dirumuskan dengan pertimbangan kesetaraan dan keadilan gender.

Pada tingkat nasional sudah tersedia beberapa produk hukum yang diperlukan untuk mendukung upaya mewujudkan kesetaraan gender. Dokumen-dokumen itu mencatat bahwa keberhasilan dari upaya mengarusutamakan gender hanya dapat diukur apabila data terpilah sudah tersedia dengan lengkap, akurat dan mutakhir. Berikut uraian beberapa produk hukum yang ada:

1. Instruksi Presiden Nomer 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan kepentingan, aspirasi dan kondisi laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapan pengelolaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi. Sedikitnya ada dua hal yang tersirat dalam PUG. Hal yang pertama adalah terintegrasinya kepentingan, aspirasi dan kondisi laki-laki dan perempuan yang dapat dipenuhi antara lain dengan terlibatnya laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan terutama sebagai pengambil keputusan. Hal kedua adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan dapat sama-sama menikmati hasil pembangunan. Untuk dapat mengetahui status dan cara mengintervensi kedua hal tersebut, peranan data terpilah sangat besar, karena tanpa kehadirannya sulit untuk melihat dan mengukur keberhasilan PUG.

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomer 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

Peraturan ini mendukung program peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan lembaga masyarakat di bidang perlindungan

perempuan dan anak di daerah. Dalam peraturan menteri ini disebutkan daftar jenis data terpilah yang perlu disusun di berbagai bidang, termasuk didalamnya bidang pendidikan dan kesehatan.

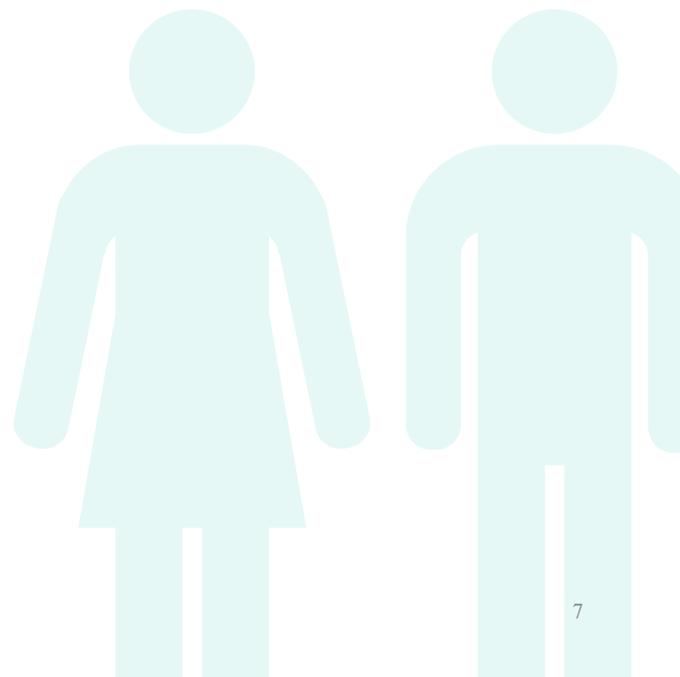
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Pasal 4 ayat 1 menyebutkan pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. Hal ini diperkuat dengan pasal 5 ayat 3 tentang penggunaan analisis gender dalam menyusun RPJMD, Renstra, Renja dan RKPD pemerintah daerah. Mengingat bahwa data terpilah merupakan prasyarat dapat dilakukannya analisis gender, maka pengadaan data terpilah di semua bidang pembangunan masuk dalam agenda setiap instansi pemerintahan.

4. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 270/M.PPN/11/2012, No. SE-33/MK.02/2012, No. 050/4379A/SJ, dan No. SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Keempat kementerian ini bergerak bersama untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, dimana: (a) Kementerian Keuangan bertindak dari sisi anggaran untuk mendorong kementerian/lembaga, terutama di pusat, untuk memasukkan anggaran responsif gender dalam masing-masing perencanaannya, (b) Kementerian Dalam Negeri berperan untuk melakukan pembinaan, regulasi, dan pengawasan di daerah dengan mendorong provinsi serta kabupaten/kota untuk berkomitmen menjalankan Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG, (c) Bappenas bertindak dari sisi perencanaan termasuk mengerahkan peranserta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan (d) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertindak selaku *focal point*, yang menyediakan SDM pada semua tingkatan pemerintahan.

Selain pada tingkat nasional, beberapa pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga sudah menerbitkan produk hukum yang mengatur implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerahnya, serta mengatur pengumpulan dan analisis data terpilah untuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (Lampiran Tabel A.3.)



BAB 3

PENGERTIAN DAN DEFINISI TEKNIS

Bab berikut ini menyajikan arti dari istilah-istilah yang dipakai dalam panduan ini. Penjelasan teknis ini diambil atau diturunkan dari berbagai dokumen resmi seperti, undang-undang, instruksi presiden, peraturan menteri, *textbook* dan buku panduan teknis yang terkait dengan data terpilah.

1. AKSES DALAM PEMBANGUNAN

adalah peluang laki-laki atau perempuan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dan pelayanan seperti keuangan, modal, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan (Pemda Provinsi Jawa Tengah, 2013).

2. ANALISIS GENDER

adalah proses penelaahan data dan informasi secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab mereka masing-masing dalam proses pembangunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat masing-masing (KPPPA, 2011). Analisis gender digunakan untuk menelaah kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat agar dapat diketahui peranserta laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing.

3. BIAS GENDER

adalah pandangan atau visi tentang gender yang berpihak pada jenis kelamin tertentu (KPPPA, 2011).

4. DATA

adalah kumpulan nilai variabel (datum) yang dinyatakan baik dalam bentuk angka (data kuantitatif), keterangan dan gambar atau atribut (data kualitatif) (KPPPA dan BPS, 2011).

5. DATA DASAR

adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, dan umumnya dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS (UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik).

6. DATA GENDER

adalah data yang mengacu pada hubungan dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan (Peraturan Menteri PPPA No. 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak).

7. DATA PELAKU

adalah data yang menggambarkan keterlibatan laki-laki atau perempuan sebagai pelaku kegiatan pembangunan (KPPPA dan Kementerian Pekerjaan Umum, 2011).

8. DATA PEMANFAAT (data penerima manfaat)

atau data penerima manfaat adalah data yang menggambarkan keterlibatan laki-laki atau perempuan sebagai sasaran atau pemanfaat kegiatan pembangunan (KPPPA dan Kementerian Pekerjaan Umum, 2011).

9. DATA SEKTORAL

adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sektor. Data ini umumnya dikumpulkan oleh instansi melalui catatan administrasinya (UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik).

10. DATA TERPILAH

dalam hal ini data terpilah menurut jenis kelamin, menggambarkan status serta kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya serta kekerasan (Peraturan Menteri PPPA NO. 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak).

Pemilahan data biasanya dilakukan kalau ingin melokalisir atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan pada suatu bidang tertentu. Data dapat dipilah menurut berbagai ciri atau karakteristik tergantung pada jenis analisis yang akan dilakukan. Bila akan melakukan analisis gender, data perlu dipilah menurut jenis kelamin. Untuk melakukan analisis tentang kesenjangan kemiskinan, data perlu dipilah menurut status sosial-ekonomi. Bila ingin diketahui dampak pembangunan menurut wilayah atau analisis spasial, data perlu dipilah menurut wilayah. Begitu pula analisis dapat dilakukan berdasarkan umur atau waktu kejadian seperti analisis cohort dan analisis deret waktu atau analisis time series¹.

11. GENDER

adalah ciri sosial budaya yang membedakan maskulin dan feminin berdasarkan nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat, seperti fungsi, peran, tanggung jawab, sikap dan status. Sifat sosial budaya semacam ini dapat berbeda dan berubah menurut waktu, etnis dan tempat (KPPPA, 2011).

12. INDIKATOR KINERJA

adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Pemda Provinsi Jawa Tengah, 2013).

13. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan (Pemda Provinsi Jawa Tengah, 2013).

¹ Penjelasan tambahan tentang bentuk data terpilah untuk analisis kemiskinan, spasial, cohort dan deret waktu, dapat dilihat pada bahan pelatihan di Lampiran I.

14. INDIKATOR KOMPOSIT

adalah ukuran hasil penghitungan terhadap beberapa variabel untuk membandingkan beberapa obyek yang diteliti (KPPPA dan BPS, 2011).

17. INDIKATOR KUALITATIF

adalah ukuran hasil penghitungan dari data kualitatif untuk membandingkan beberapa kelompok obyek berupa atribut, narasi atau pernyataan yang dapat juga diubah dalam bentuk skala (lihat data kualitatif).

16. INDIKATOR KUANTITATIF

adalah ukuran hasil penghitungan dari data kuantitatif untuk membandingkan beberapa kelompok obyek berupa statistik seperti jumlah, rata-rata atau rerata, rasio, persentase, rate/angka dan indeks (lihat data kuantitatif)

17. INDIKATOR TUNGGAL

adalah ukuran hasil penghitungan terhadap satu variabel untuk membandingkan beberapa obyek yang diteliti (KPPPA dan BPS, 2011).

18. ISU GENDER

adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender yang biasanya cenderung menguntungkan atau merugikan salah satu kelompok tersebut. Keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi obyektif di lapangan yang menimbulkan rasa ketidakadilan (KPPPA, 2011).

19. JENIS KELAMIN

adalah ciri biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan kondisi fisiknya. Perempuan mempunyai alat kelamin yang mendukung fungsi reproduksi, seperti hamil, melahirkan dan menyusui, sementara laki-laki memiliki alat kelamin yang fungsinya membuahi (Bhasin, 2000).

20. Keadilan Gender

adalah suatu keadaan atau perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan karena kebutuhannya yang berbeda (KPPPA dan Unifem, 2010).

21. Kesenjangan Gender

adalah adanya perbedaan akses pada atau peluang untuk memperoleh sumber daya pembangunan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan, sehingga berdampak pada adanya perbedaan partisipasi dan kontrol masing-masing pihak yang mengakibatkan perbedaan antara keduanya dalam memperoleh manfaat dari hasil pembangunan (KPPPA, 2010).

22. Kesetaraan Gender

adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (KPPPA, 2010).

23. KONTROL DALAM PEMBANGUNAN

adalah wewenang/kemampuan laki-laki atau perempuan dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kegiatan pembangunan (Pemda Provinsi Jawa Tengah, 2013).

24. MANFAAT PEMBANGUNAN

adalah hasil pembangunan yang dirasakan laki-laki atau perempuan baik secara langsung (KPPPA, 2011) maupun tidak langsung (Pemda Provinsi Jawa Tengah, 2013).

25. PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN

adalah besarnya peran atau aktivitas laki-laki atau perempuan dalam suatu kegiatan pembangunan (Pemda Provinsi Jawa Tengah, 2013).

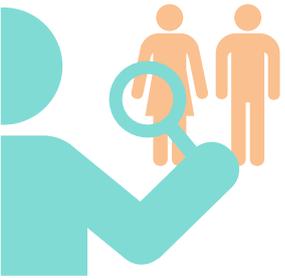
26. RESPONSIF GENDER

adalah suatu kondisi tentang kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan secara konsisten dan sistematis perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan (KPPPA, 2010).

27. STATISTIK/INDIKATOR/INDEKS

adalah kelompok datum atau data yang diringkas dengan penghitungan menjadi satu dan merupakan ukuran untuk membandingkan dua kelompok penduduk atau obyek yang diteliti. Dalam pengertian umum statistik, indikator maupun indeks juga disebut sebagai data (KPPPA dan BPS, 2011).





BAB 4

IDENTIFIKASI JENIS DATA TERPILAH YANG DIBUTUHKAN

Berbagai cara dapat digunakan sebagai dasar penentuan jenis data terpilah yang akan dikumpulkan oleh suatu lembaga atau instansi di suatu daerah. Dasar penentuan dapat berupa aspirasi lembaga dan masyarakat yang tertuang dalam visi, misi, kebijakan, atau anggaran dasar lembaga atau instansi tersebut. Mengingat bahwa kegiatan yang terkait dengan data terpilah ini berada dalam konteks Inpres No. 9/2000, Permendagri No. 15/2008, Permendagri No. 67/2011, serta UU No. 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 yang mengacu pada pengarusutamaan gender atau PUG, maka jenis data terpilah yang akan dihimpun dapat didasarkan pada kebutuhan untuk melihat keberhasilan PUG.

Data terpilah yang disusun juga harus dapat memenuhi tujuan pembangunan yang sudah digariskan dan menjawab masalah yang sudah diidentifikasi oleh kementerian, seperti dalam contoh dua kementerian berikut ini:

A. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Di bidang pendidikan, arah kebijakan yang terkait dengan program “Pendidikan untuk Semua” telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional yang meliputi tiga pilar pembangunan pendidikan (Kemdikbud, 2011), yaitu:

1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang bermutu dan berwawasan gender bagi semua anak laki-laki dan perempuan, meliputi data terpilah antara lain:
 - a. Tingkat pendidikan yang dicapai penduduk
 - b. Melek aksara
 - c. APS anak usia sekolah
 - d. Partisipasi di jenjang pendidikan SD (APS, APM, APK)
 - e. Partisipasi di jenjang pendidikan SMP (APS, APM, APK)
 - f. Partisipasi di jenjang pendidikan SM/SMK (APS, APM, APK)
 - g. Partisipasi di jenjang pendidikan perguruan tinggi
 - h. Status sekolah
 - i. Partisipasi sekolah luar biasa
 - j. Pendidikan luar sekolah

2. Peningkatan mutu dan relevansi lembaga pendidikan, berkaitan dengan kegiatan menurunkan tingkat keniraksaraan penduduk dewasa, terutama penduduk perempuan, melalui peningkatan kinerja pendidikan pada setiap jenjang baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah, pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk dewasa, meliputi data terpilah antara lain:

- a. Angka putus sekolah
- b. Angka bertahan
- c. Angka kelulusan
- d. Angka melanjutkan
- e. Angka mengulang
- f. Nilai ujian nasional
- g. Informasi tentang kurikulum dan pembelajaran
- h. Penjurusan dan beasiswa

3. Tata kelola dan akuntabilitas, meningkatkan kemampuan kelembagaan pendidikan dalam mengelola dan mempromosikan pendidikan yang berwawasan gender.

- a. Pengelolaan pendidikan
- b. Jumlah guru/dosen/kepala sekolah/rektor
- c. SDM di SKPD menurut berbagai ciri, antara lain, jenis kelamin, eselon, golongan, status, latar belakang pendidikan
- d. Stereotipi gender dalam pendidikan (penjurusan, alat olah raga, kegiatan ekstra kurikulum, dan sebagainya)

B. Kementerian Kesehatan

Di bidang kesehatan, salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Kemenkes RI, 2012). Untuk mengetahui capaian pelaksanaan tugas tersebut, maka data terpilah dan data responsif gender yang dapat menggambarkan kondisi masyarakat adalah seperti berikut:

1. Perilaku kesehatan (seperti kebiasaan merokok, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, pemeriksaan kesehatan, penolong persalinan, dan aktivitas berolah raga)
2. Derajat kesehatan (seperti morbiditas, KLB, AKI, AKB, status gizi ibu hamil dan balita, dan BBLR)
3. Upaya kesehatan (seperti pemeriksaan kehamilan/K4, Ponek, Poned, imunisasi, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan dan sosialisasi)
4. Sumber daya kesehatan (seperti fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan jaminan kesehatan)

Di bidang kesehatan isu gender melekat pada kondisi medis penduduk laki-laki dan perempuan, sehingga data terpilah yang disusun perlu diprioritaskan pada hal-hal berikut (Kemenkes dan KPPPA, 2010):

1. Prevalensi dan tingkat keparahan penyakit
2. Lingkungan fisik dan penyakit
3. Faktor risiko penyakit
4. Persepsi dan respon terhadap penyakit
5. Akses secara fisik, psikologis dan sosial terhadap sarana pelayanan kesehatan
6. Keterpaparan dan kerentanan terhadap penyakit

Dari sudut pandang PUG, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian gender ke dalam kegiatan pembangunan di daerah, sedikitnya ada dua hal penting yang perlu dicatat. Pertama, kepentingan, aspirasi dan kondisi laki-laki dan perempuan akan terintegrasi dalam setiap kebijakan dan kegiatan, apabila semua atau sebagian besar perumus dan perencana program memahami konsep dan cara melakukan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Kedua, sasaran kegiatan harus mencakup laki-laki dan perempuan, sehingga kedua pihak dapat menikmati hasil pembangunan.

Pada saat ini, alat yang tepat untuk mengukur variable integrasi masih belum tersedia, sehingga jumlah laki-laki dan perempuan pegawai pemda yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dicatat sebagai data terpilah. Selanjutnya, data terpilah PNS ini diolah sehingga memadai untuk digunakan sebagai proksi dari indikator integrasi. Menyangkut penikmat hasil pembangunan, data yang perlu dikumpulkan adalah data tentang jumlah laki-laki dan perempuan yang menikmati hasil atau output kegiatan pembangunan.

Data terpilah pelaku pembangunan umumnya dapat diperoleh dari satuan kerja kepegawaian yang sekarang ini sudah secara sistematis terbangun dengan teknologi informasi yang secara teknis dibina oleh Badan Kepegawaian Negara RI. Jenis data terpilah tentang pelaku pembangunan yang bersifat umum yang tersedia di sana, antara lain menyangkut²:

1. umur
2. ijazah tertinggi
3. golongan kepangkatan
4. eselon jabatan
5. status struktural/fungsional
6. sertifikat diklatpim tertinggi
7. masa kerja

Karena tidak semua informasi tentang pegawai dapat diperoleh dari satuan kerja kepegawaian, seperti pegawai yang menangani penelitian di bidang yang spesifik, pegawai yang menjadi tutor materi tertentu dalam pendidikan kecakapan hidup, dan petugas sosialisasi tentang ASI, maka data terpilah juga perlu dicari pada satuan kerja teknis. Kelompok pegawai ini digolongkan sebagai pelaku pembangunan khusus.

² Lihat contoh bentuk tabel data terpilah pada Lampiran B

Jenis data terpilah tentang penerima manfaat hasil pembangunan dapat digolongkan dalam sasaran kegiatan pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pegawai instansi³
2. Pelayanan masyarakat⁴
3. Pemberdayaan/Penyuluhan/Sosialisasi/Koordinasi⁵
4. Pengaturan
5. Pengawasan
6. Pembangunan fisik dan pengadaan sarana/prasarana

Sasaran kegiatan yang termasuk dalam butir 1, butir 2 dan butir 3 karena dapat menyangkut perorangan baik karena kapasitas individu maupun wakil dari instansi tertentu, maka dapat secara langsung diidentifikasi menurut jenis kelamin. Sementara itu sasaran kegiatan butir 4 dan butir 5 yang *output*-nya berbentuk dokumen yang merujuk pada kelompok masyarakat banyak, maka data terpilah yang dapat disusun hanya berupa informasi yang responsif gender atau tidak. Kemudian *output* pembangunan yang berupa bangunan fisik pada butir 6, data terpilah ditentukan dari informasi ketersediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan, seperti toilet terpisah laki-laki dan perempuan serta ruang ASI untuk ibu menyusui.

Perencanaan yang disusun kementerian belum tentu dapat menampung kebutuhan semua daerah kabupaten/kota yang jumlahnya ratusan. Oleh karena itu penyusunan data terpilah bidang pendidikan dan kesehatan yang disajikan di atas hanya berkaitan dengan kebijakan dan program yang dirancang pemerintah pusat. Agar data terpilah juga dapat menggambarkan pembangunan yang spesifik daerah, basis pemilihan jenis data terpilah perlu memerhatikan dokumen pembangunan dari daerah yang bersangkutan.

Identifikasi terhadap data dan indikator terpilah dapat diturunkan dari dokumen perencanaan RKPD di masing-masing daerah. Pada panduan ini, identifikasi dilakukan pada tiga (3) kabupaten pilot sebagai contoh, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Flores Timur, melalui RKPD tahun 2013. Pada kesempatan ini program dan kegiatan dalam RKPD yang dipilih hanya kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja bidang pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan fokus pembahasan pada buku pedoman ini. Dari kegiatan identifikasi ini telah tersusun sejumlah jenis data/indikator terpilah yang perlu dikumpulkan untuk melihat apakah laki-laki dan perempuan mendapat manfaat yang setara dari hasil-hasil pembangunan di kabupaten. Hasil identifikasi kebutuhan data terpilah yang berbasis RKPD 2013 di tiga kabupaten ini tersaji pada Lampiran F.1., F.2., dan F.3.

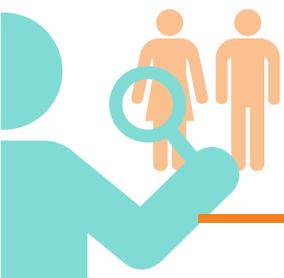
³ Contoh tabel data terpilah pada Lampiran C

⁴ Contoh tabel data terpilah pada Lampiran D

⁵ Tabel contoh data terpilah pada Lampiran E

BAB 5

SUMBER DATA TERPILAH



Berbagai jenis data yang perlu dipilah menurut jenis kelamin dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain Sensus Penduduk (SP), Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang ditangani oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta catatan administrasi atau laporan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Sumber data dari BPS menghasilkan data dasar, sedangkan SKPD atau dinas menghasilkan data sektoral yang biasanya digunakan untuk kegiatan instansi terkait. Berikut adalah penjelasan ringkas dari masing-masing sumber data:

1. Sensus Penduduk

Sensus Penduduk (SP) adalah pencacahan lengkap terhadap seluruh penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Informasi yang dikumpulkan meliputi ciri-ciri demografi, seperti hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan sedikit keterangan tentang pendidikan dan kesehatan. Pada SP yang dilaksanakan tahun 2010 dikumpulkan juga keterangan penduduk terkait dengan indikator MDGs. Di samping itu, dalam setiap SP biasa dikumpulkan juga informasi tentang perumahan dan bangunan tempat tinggal.

Sebelum melaksanakan sensus penduduk maupun sensus lainnya (seperti sensus pertanian atau sensus ekonomi), kira-kira setiap tiga atau empat tahun sekali, dilakukan pemetaan desa dan wilayah pencacahan. Hal ini dimaksudkan agar para petugas SP dapat mengidentifikasi wilayah tugasnya dengan baik. Sebagian petugas pemetaan ini juga ditugasi untuk mengumpulkan informasi tentang desa di kantor kepala desa/lurah. Keterangan yang dihimpun antara lain, keterangan wilayah geografi, perangkat desa, potensi desa, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hasil SP baik menyangkut data penduduk, data perumahan maupun potensi desa pada tingkat kabupaten/kota dipublikasikan oleh BPS provinsi yang bersangkutan.

2. Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Dari berbagai survei yang mengumpulkan data pendidikan dan kesehatan, hanya Susenas yang mempunyai kekuatan estimasi sampai ke tingkat kabupaten/kota. Umur Susenas sudah mencapai sekitar 50 tahun, namun baru mulai tahun 2011 pelaksanaannya diatur secara triwulanan dengan ukuran sampel sebesar 300,000 rumah tangga per-tahun atau lebih dari satu seperempat juta orang yang tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota. Susenas dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kor (pokok) dan Modul (rinci). Dengan kuesioner Kor dikumpulkan informasi pokok tentang kondisi sosial-ekonomi penduduk dari seluruh sampel. Informasi pokok tentang pendidikan antara lain status sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kemampuan membaca/menulis, jenjang dan jenis sekolah. Sementara itu informasi pokok yang terkait dengan sektor kesehatan antara lain keluhan kesehatan, lama sakit, pertolongan pengobatan, pertolongan persalinan, imunisasi dan pemberian ASI. Dari

kuesioner Modul dikumpulkan informasi sejenis tapi lebih rinci dari sekitar seperempat jumlah sampel penduduk. Oleh karena itu informasi yang dikumpulkan dengan kuesioner Modul hanya dapat menghasilkan estimasi sampai tingkat provinsi, namun informasi yang dikumpulkan dengan kuesioner Kor dan Modul dapat menghasilkan estimasi tingkat nasional.

3. Catatan/Laporan Dinas-dinas

Data laporan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dihimpun dari laporan satuan kerja dalam SKPD dan unit layanan masyarakat terkait, seperti sekolah dan Puskesmas. Dari Dinas Pendidikan maupun Kesehatan dapat diperoleh data mengenai pegawai yang dirinci menurut berbagai ciri, seperti jenis kelamin, umur, golongan kepangkatan, eselon dan siapa saja yang menjadi sasaran pembangunan pendidikan dan kesehatan. Sementara itu dari unit layanan pendidikan dapat diperoleh data mengenai siswa, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, serta tutor kursus, dan pesertanya; sedangkan dari unit layanan kesehatan dapat diperoleh data pasien seperti, umur, jenis kelamin, dan penyakit.

4. Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi dan LSM

Lembaga penelitian, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat juga memiliki data kuantitatif maupun kualitatif. Walaupun kegiatan pengumpulan datanya biasanya tidak dilakukan secara periodik dan teratur, namun data dari sumber ini dapat dipakai sebagai data pembandingan. Lembaga yang melakukan pengumpulan data ini sebaiknya menyajikan metodologi pengumpulan data secara lengkap, sehingga pangkal dari adanya perbedaan data dapat dijelaskan.

Dua kelompok sumber data, yaitu BPS dan SKPD, seringkali menghasilkan nilai yang berbeda. Metode pengumpulan data dasar oleh BPS umumnya pendataan sampling (Susenas), memakai pendekatan rumah tangga dalam lingkup wilayah administrasi, yang memotret kondisi pada waktu tertentu dan mempunyai cakupan yang berbeda dengan metode yang dipakai SKPD. Perbedaan-perbedaan inilah yang sering menyebabkan adanya perbedaan nilai estimasi oleh BPS dengan hasil pendataan yang dilakukan oleh dinas-dinas, seperti yang dijelaskan berikut:

1. Waktu pencacahan

Seperti diungkapkan diatas, data BPS berdasarkan potret dilapangan pada saat pencacahan yang umumnya dilakukan dalam interval yang tidak lebih dari sebulan. Sementara itu pendataan oleh Dinas Pendidikan memotret periode tahun ajaran; dan Dinas Kesehatan melakukan pencatatan setiap saat, sehingga datanya lebih dinamis.

2. Metode pencacahan

Metode sampling yang dipakai BPS akan menyebabkan kesalahan *sampling* maupun kesalahan *non-sampling* (kesalahan yang disebabkan oleh faktor petugas, responden dan definisi operasional). Kesalahan *sampling* dapat diperkecil antara lain dengan memperbesar ukuran sampel dan dengan metode stratifikasi, sedangkan kesalahan *non-sampling* dapat diperkecil antara lain dengan pelatihan petugas yang intensif. Metode Sensus hanya akan menyebabkan kesalahan *non-sampling* yang dapat dikendalikan dengan pelatihan petugas.

3. Cakupan Wilayah dan Jumlah Penduduk

Walaupun perbedaannya tidak besar, data dari SKPD dapat mewakili kondisi di suatu wilayah pelayanan tetapi bukan wilayah administrasi. Namun demikian, pada waktu menghitung indikator seperti APM dan cakupan imunisasi, data populasi yang tersedia hanya merujuk pada wilayah administrasi, sehingga dipakai data penduduk wilayah administrasi tanpa mempertimbangkan faktor koreksi.

Sebenarnya dalam formulir pendaftaran siswa atau pasien terdapat informasi tentang alamat. Bila informasi ini diolah, maka akan diperoleh data sektoral yang mewakili wilayah administrasi, yang saat ini belum dilakukan. Dinas Pendidikan beberapa kabupaten di Sumatera Utara telah mencoba untuk mengolah data berdasarkan wilayah administrasi, dan ternyata pengolahan itu tidak sulit untuk dilakukan (Siti Sofiah dan Ida Kintamani, 2008).

4. Cakupan Sekolah/Pelayanan Kesehatan

Pada bidang pendidikan, perbedaan cakupan sekolah hanya menyangkut jenjang sekolah setingkat SMA atau SMK. Pelayanan yang dimanfaatkan penduduk yang dicatat dalam pendataan BPS, termasuk sekolah kedinasan yang dikelola oleh instansi tertentu selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. BPS mencatat semua penduduk yang mengikuti pendidikan di sekolah kedinasan seperti Sekolah Perawat, Sekolah Pelayanan dan Sekolah Pertanian Menengah Atas sebagai data 'berpartisipasi sekolah'. Perbedaan cakupan ini menyebabkan nilai indikator angka partisipasi pendidikan setingkat SMA/SMK yang dihasilkan BPS lebih besar daripada nilai yang dihasilkan SKPD. Sementara itu pada bidang kesehatan, pendataan pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan penduduk yang menjadi sampel BPS, termasuk rumah sakit swasta dan poliklinik swasta. Kedua hal ini belum seluruhnya tercakup dalam pendataan Dinas Kesehatan, sehingga menyebabkan angka BPS lebih tinggi dari angka yang dihasilkan dinas.



BAB 6

PENYAJIAN DATA TERPILAH

Seperti telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, buku panduan ini disusun agar dinas-dinas, unit-unit layanan maupun kelompok masyarakat lainnya dapat membuat buku data terpilah, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk menyusun buku data terpilah, tata cara menentukan jenis data terpilah juga telah dijelaskan. Dari beberapa dokumen yang dipakai sebagai acuan, pendekatan PUG merupakan rujukan yang paling komprehensif. Hal ini berdasar pada pemanfaatannya untuk PPRG yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan.

Jenis data kuantitatif dan kualitatif yang diperlukan hanya dua kelompok besar, yaitu data pelaku pembangunan dan data pemanfaat pembangunan. Data terpilah pelaku pembangunan mencakup SDM yang terlibat, baik sebagai pengambil keputusan, sebagai staf yang melakukan tugas khusus, maupun sebagai staf fungsional umum. Sementara itu data terpilah pemanfaat pembangunan mengacu pada indikator kinerja sektor sehingga dapat merangkum berbagai kelompok masyarakat –laki-laki dan perempuan– yang menjadi sasaran pembangunan, baik menyangkut akses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan maupun pola hidup bersih/sehat, derajat kesehatan dan upaya kesehatan. Daftar minimum isi buku data terpilah dan rumus yang dianjurkan untuk digunakan dapat dilihat di Lampiran H.

Penyajian data terpilah disarankan untuk mencakup dua hal. Pertama, data atau masing-masing nilai karakteristik, statistik atau indikator untuk kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kedua, besarnya kesenjangan gender yang sangat berharga untuk disajikan. Dengan menyajikan nilai kesenjangan gender ini, pembaca akan langung terinformasi tentang ada tidaknya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, serta besar kecilnya kesenjangan itu. Adapun ukuran kesenjangan gender yang biasa dipakai adalah sebagai berikut:

Perbedaan Gender	$(\text{Nilai Persentase Laki-laki}) - (\text{Nilai Persentase Perempuan})$
Rasio Gender / Rasio Jenis Kelamin	$\frac{(\text{Jumlah Penduduk Laki-laki})}{(\text{Jumlah Penduduk Perempuan})} \times 100$
Indeks Paritas Gender	$\frac{(\text{Capaian Kinerja Perempuan})}{(\text{Capaian Kinerja Laki-laki})}$

Catatan: Presentase Laki-laki + Presentase Perempuan = 100 persen

Selain ketiga ukuran di atas, beberapa ukuran kesenjangan gender telah diperkenalkan, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (KPPPA dan BPS, 2013), juga Indeks Kesenjangan Gender atau GII (UNDP, 2014) yang telah disinggung pada bab terdahulu.

Data dan informasi akan lebih cepat menarik minat pembaca dan lebih mudah dipahami bila disajikan dalam bentuk yang ramah pengguna atau *user friendly*. Paling sedikit ada tiga cara yang biasa digunakan untuk menyampaikan informasi, yaitu tabel, narasi dan gambar. Tabel seperti yang sudah banyak disinggung sebelumnya merupakan bentuk penyajian yang banyak digunakan untuk menyingkat data yang jumlahnya ratusan, kadang ribuan bahkan jutaan. Dalam tabel yang terdiri dari kolom dan baris, data yang disajikan telah dikelompokkan menurut berbagai ciri sehingga tersaji dengan lebih padat. Untuk lebih memberikan pemahaman kepada pengguna data, tabel biasanya disertai narasi yang menjelaskan isi tabel secara singkat, padat dan sederhana. Bentuk penyajian berupa gambar adalah yang paling menarik di antara tiga penyajian tersebut. Konfigurasi antara bentuk gambar serta penataan warna membuat pengguna data lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, basis untuk menentukan jenis data terpilah yang akan dilaporkan adalah bermacam-macam. Oleh karena itu format atau sistematika penyajian data terpilah juga dapat ditentukan dengan berbagai alternatif. Salah satu sistematika penyajiannya dapat dilihat pada Lampiran H.

Penjelasan mengenai cara penyajian data dan informasi, dapat dilihat berikut ini:

1. Tabel

Tabel yang menyajikan data terpilah harus mempunyai kolom atau baris yang dapat menampung kelompok penduduk menurut jenis kelamin—laki-laki dan perempuan. Kemudian masing-masing kolom atau baris tersebut dipilah menurut karakteristik yang akan diteliti. Berikut adalah contoh tabel yang berisi data terpilah bidang pendidikan di Kabupaten Flores Timur. Tabel 6.1 menyajikan data dasar yang terpilah menurut jenis kelamin dan umur dari seluruh siswa di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2013. Sementara Tabel 6.2 menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur yang diturunkan dari Tabel 6.1, berupa persentase untuk melihat komposisi siswa masing-masing umur menurut jenis kelamin.

Tabel 6.1 :
Jumlah Siswa menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin,
Kabupaten Flores Timur 2013

Kelompok Usia	Jumlah Siswa		
	Laki-laki	Perempuan	Total
5–6 Tahun	622	586	1208
7–12 Tahun	15.740	14.473	30.213
13–15 Tahun	7.676	7.081	14.757
16–18 Tahun	2.375	1.820	4.195
Jumlah	26.413	23.960	50.373

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Flores Timur

Dalam buku-buku statistik, karena banyaknya data serta banyak dan rumitnya penghitungan statistik, pembuatan tabel seringkali disertai dengan nomor kolom. Cara penyajian alternatif pada Tabel 6.2 berikut menampilkan Kolom 1 adalah kelompok usia, Kolom 2 adalah persentase siswa laki-laki. Selanjutnya Kolom 3, Kolom 4 dan Kolom 5 berturut-turut adalah persentase siswa perempuan, persentase total siswa laki-laki dan perempuan dan jumlah siswa.

Tabel 6.2 menyajikan komposisi siswa berbagai kelompok umur menurut jenis kelamin; artinya pada masing-masing kelompok umur dirinci berapa laki-laki dan berapa perempuan dalam persentase. Perhatikan bahwa syarat untuk menampilkan komposisi menurut jenis kelamin adalah jumlah persentase laki-laki dan persentase perempuan sama dengan 100 persen. Tabel ini menunjukkan bahwa secara umum untuk semua umur siswa laki-laki (52,43 persen) lebih banyak daripada siswa perempuan (47,57 persen).

Tabel 6.2. :
Persentase Siswa menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin
 Kabupaten Flores Timur, NTT **2013**

Kelompok Usia	Presentase Siswa %			Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5-6 Tahun	51,49	48,51	100	1208
7- 12 Tahun	52,10	47,90	100	30.213
13-15 Tahun	52,02	47,98	100	14.757
16-18 Tahun	56,62	43,38	100	4.195
Jumlah	52,43	47,57	100	50.373

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Flores Timur

Berbeda dengan Tabel 6.2, Tabel 6.3 tidak menampilkan komposisi menurut jenis kelamin melainkan menunjukkan indikator partisipasi sekolah dari kelompok penduduk yang berumur 13-15 tahun. Artinya berapa persen dari seluruh laki-laki maupun seluruh perempuan pada kelompok usia tersebut yang bersekolah. Perhatikan bahwa syarat untuk menampilkan indikator partisipasi menurut jenis kelamin adalah jumlah persentase masing-masing kelompok laki-laki atau persentase kelompok perempuan adalah 100 persen. Jadi angka partisipasi sekolah anak laki-laki usia 13-15 tahun yang sebesar 80,32 persen tidak berbeda signifikan dengan angka partisipasi sekolah anak perempuan pada kelompok umur yang sama, yaitu 79,28 persen.

Tabel 6.3. :
Persentase Penduduk Berusia 13 – 15 Tahun menurut
 Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Flores Timur **2011**

Status Sekolah	Presentase %		
	Laki-laki	Perempuan	Total
01. Tidak/Belum Pernah Sekolah	1.68	1.56	1.62
02. Masih Bersekolah	80.32	79.28	79.78
03. Tidak Bersekolah Lagi	18.00	19.16	18.60
Jumlah (%)	100	100	100

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Flores Timur 2012

Dengan hanya menyajikan Tabel 6.1, Tabel 6.2 dan Tabel 6.3, cerita mengenai kondisi dan capaian pendidikan di Kabupaten Flores Timur belum lengkap. Bila ada informasi tambahan yang dapat dikumpulkan dan disajikan, maka pengetahuan pembaca mengenai kinerja sektor pendidikan di kabupaten ini akan lebih kaya dan lengkap. Misalnya, informasi tentang perbedaan komposisi siswa antar-kecamatan. Dengan tambahan data terpilah pada Tabel 6.4 maka wawasan pembaca bertambah dengan informasi bahwa di hampir semua kecamatan (kecuali Kecamatan Ile Mandiri dan Solor Selatan) besarnya rasio jenis kelamin atau rasio gender kurang dari satu, yang berarti lebih banyak siswa laki-laki di sekolah daripada perempuan.

Tabel 6.4. :

Persentase Siswa menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Flores Timur

2013

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Rasio Gender
Adonara	51,69	48,31	100,00	0,93
Adonara Barat	52,44	47,56	100,00	0,91
Adonara Tengah	51,64	48,36	100,00	0,94
Adonara Timur	50,94	49,06	100,00	0,96
Demon Pagong	51,92	48,08	100,00	0,93
Ile Boleng	53,15	46,85	100,00	0,88
Ile Mandiri	49,82	50,18	100,00	1,01
Ilebura	51,78	48,22	100,00	0,93
Kelubagolit	51,29	48,71	100,00	0,95
Larantuka	53,21	46,79	100,00	0,88
Lewolema	51,71	48,29	100,00	0,93
Solor Barat	53,55	46,45	100,00	0,87
Solor Selatan	50,00	50,00	100,00	1,00
Solor Timur	52,06	47,94	100,00	0,92
Tanjung Bunga	53,26	46,74	100,00	0,88
Titehena	51,67	48,33	100,00	0,94
Witihama	51,51	48,49	100,00	0,94
Wotan Ulumado	53,01	46,99	100,00	0,89
Wulang Gitang	51,39	48,61	100,00	0,95
Kab. Flores Timur	52,10	47,90	100,00	0,92

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, diolah

Lakukan penggalian informasi sebanyak mungkin agar terkumpul informasi yang lengkap tentang sektor yang menjadi fokus anda di kabupaten. Berbagai sumber data seperti yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat dimanfaatkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

Sebelum menampilkan data dalam bentuk lain, periksa tabel-tabel dasar dari sumber/ rujukan yang berisi angka absolut dengan teliti. Beberapa hal yang perlu diperiksa adalah:

- Pastikan semua angka sudah sesuai dengan sumber yang dicantumkan
- Pastikan semua internal tabel sudah konsisten; artinya jumlah kolom/sub-kolom dan jumlah baris/sub-baris yang terkait sama besar
- Pastikan semua penghitungan, yaitu perkalian, pembagian, penambahan dan pengurangan yang disajikan dalam semua tabel sudah dilakukan dengan benar
- Pastikan semua variabel yang sama dalam berbagai tabel sudah sama jumlahnya, walaupun dirinci menurut ciri/karakteristik yang berbeda.

Upayakan penyajian suatu jenis data dalam satu tabel berasal dari sumber yang sama, seperti sensus, survey dan terutama data dari catatan administrasi pembangunan yang merujuk pada waktu yang sama. Hal ini dilakukan mengingat beberapa jenis data sangat dinamis yang dapat berubah setiap hari, seperti data pasien dan penyakitnya di satuan layanan kesehatan. Berikan penjelasan apabila terpaksa harus menampilkan data yang dihimpun dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda dalam tabel yang sama. Setelah semua tabel diperiksa, rancang penjelasan yang akan dibuat terhadap tabel-tabel dengan analisis sederhana dalam suatu narasi yang singkat

2. Narasi

Sebelum menyajikan tabel dalam bentuk narasi, ada hal-hal atau pesan penting yang perlu diperhatikan dari tabel. Salah satu model penyajian yang dapat dipakai adalah dengan menampilkan gambaran umum dan isu menonjol yang terlihat. Gambaran umum data dalam tabel dapat dilihat, misalnya tentang bagaimana pola komposisi/distribusi dari masing-masing kelompok laki-laki dan perempuan antar-variabel dan antar-wilayah. Jelaskan apakah polanya sama, mirip/sejalan atau bertentangan. Setelah itu berikan perhatian khusus mengenai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, dengan melihat indikator perbedaan gender, rasio jenis kelamin atau indeks paritas gender. Secara lengkap piranti untuk melakukan analisis sederhana disajikan pada bab tentang analisis sederhana.

Berikut adalah contoh langkah pokok untuk menyusun penjelasan atau analisis sederhana tentang komposisi/distribusi yang terlihat pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5. :
Jumlah dan Presentase Kasus Pneumonia menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara **2013**

No.	Kecamatan	Puskesmas	Presentase %			Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Bayan	Bayan	34.85	65.15	100	396
2	Kayangan	Kayangan	34.98	65.02	100	243
3	Gangga	Gangga	33.33	66.67	100	243
4	Tanjung	Tanjung	30.64	69.36	100	705
5	Pemenang	Pemenang	30.05	69.95	100	396
6	Nipah	Nipah	38.57	61.43	100	70
	Jumlah		32.52	67.48	100	2.257

Sumber: Profil Kesehatan Kab. Lombok Utara 2013, diolah

Pada Tabel 6.5 terdapat beberapa hal mencolok sehingga mudah terlihat, antara lain:

- Bila melihat proporsi laki-laki dibandingkan dengan proporsi perempuan di masing-masing kecamatan, terlihat bahwa kasus pneumonia pada perempuan lebih besar (sekitar dua kali lipat) daripada kasus yang terjadi pada laki-laki.
- Bila melihat perbandingan komposisi kasus pneumonia tiap kecamatan, maka tergambar bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang terjangkit pneumonia di seluruh kecamatan hampir sama.
- Bila melihat kisaran persentase kasus pneumonia, maka dapat dilaporkan bahwa laki-laki di Kecamatan Pemenang paling sedikit terjangkit pneumonia dan di Kecamatan Nipah yang paling banyak.

Gambaran diatas hendaknya diuraikan dalam bentuk kalimat yang sederhana, padat dan mudah dimengerti. Hindari penyajian atau penjelasan data dalam tabel seperti membaca angka-angka, satu per satu dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan.

Kemudian bila narasi akan diisi dengan analisis yang lebih komprehensif, penjelasan perlu dilengkapi dengan informasi tentang apa yang menyebabkan adanya isu gender di wilayah itu. Penjelasan sebaiknya berasal dari pengetahuan yang digali dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder. Penjelasan yang lebih lengkap tentang analisis sederhana dan analisis komprehensif akan disajikan dalam bab selanjutnya.

3. Gambar atau Diagram

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan gambar adalah bahwa tidak semua data dalam tabel dapat diterjemahkan kedalam diagram. Pilih tabel-tabel yang menunjukkan ketimpangan gender yang tinggi untuk dibuat gambarnya.

Penyajian data dalam bentuk gambar banyak ragamnya, baik dilihat dari pewarnaan maupun dari sisi bentuk gambar. Untuk memperjelas perbedaan atau ketimpangan gender, penggunaan gradasi warna biasa dilakukan, mulai dari warna muda untuk hal yang ingin dikategorikan ringan sampai warna tua untuk hal yang dikategorikan berat.

Bentuk gambar yang dapat dipilih, antara lain diagram garis, diagram batang, dan peta. Kecuali peta, banyak *software* yang sudah menjadi *public domain* yang bebas dipakai oleh siapa saja. Untuk komposisi menurut jenis kelamin, gambar yang dipilih dapat berupa diagram bulat (*piechart*) atau diagram batang bersambung untuk laki-laki dan perempuan. Sementara itu, kalau perbedaan nilai indikator yang ingin ditonjolkan, maka diagram batang atau grafik garis dari ketimpangan atau masing-masing indikator kelompok laki-laki dan kelompok perempuan biasa dipakai.

Berikut adalah contoh gambar tentang kesenjangan gender yang dapat ditampilkan dari Tabel 6.6.

Tabel 6.6. :
Jumlah dan **Persentase Penduduk Buta Aksara** menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Malang **2011/12**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
Laki-Laki	8.105	33.76
Perempuan	115.906	66.24
Jumlah	124.011	100,00

Sumber: Position Paper PUG Bidang Pendidikan Prov. Jatim, 2012

Contoh gambar untuk Tabel 6.6. adalah:

Gambar 6.1. : Persentase Penduduk Buta Aksara menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Malang, Tahun 2011/2012



Sumber: Position Paper PUG Bidang Pendidikan Prov. Jatim, 2012

Berikut adalah contoh gambar tentang kesenjangan gender yang dapat ditampilkan dari Tabel 6.7.

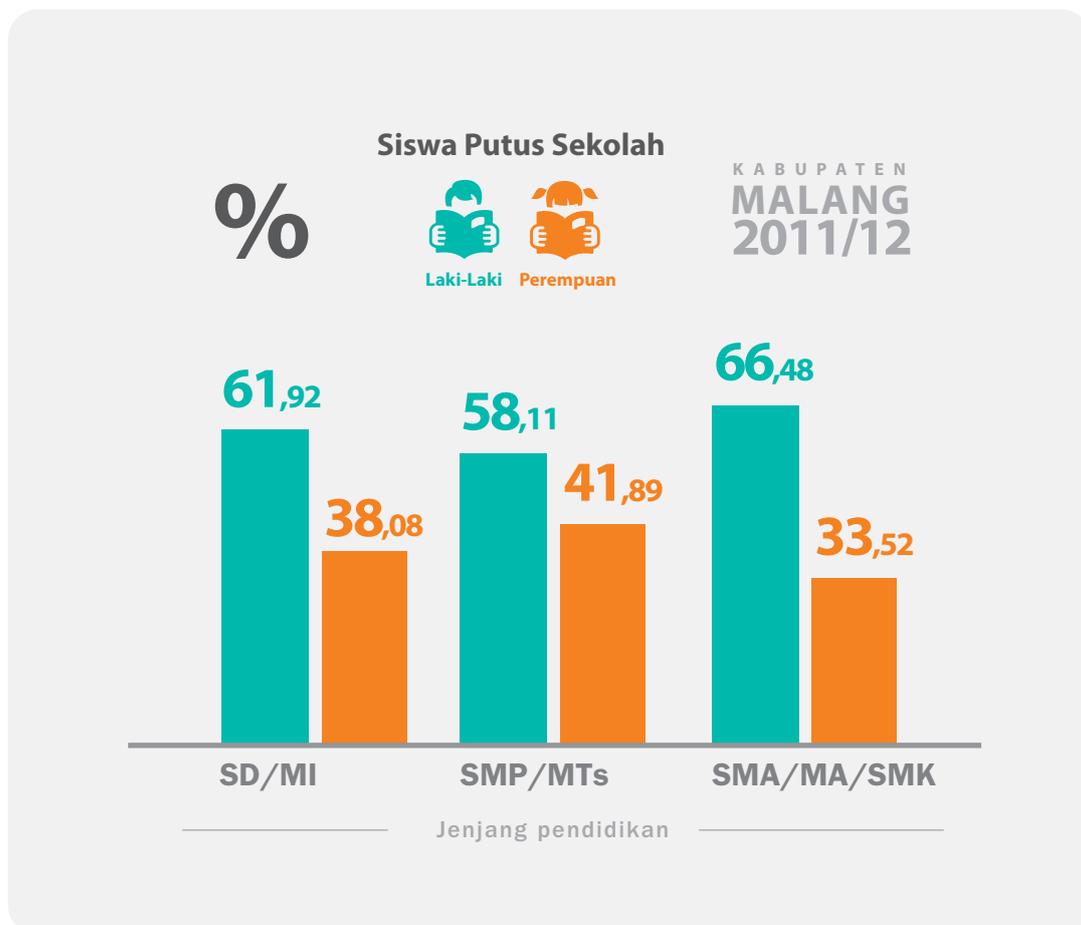
Tabel 6.7. :
 Jumlah **Persentase Siswa Putus Sekolah** menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Malang **2011/12**

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %	Total
1.	SD/MI	Laki-Laki	322	61.92	520
		Perempuan	198	38.08	
2.	SMP/MTS	Laki-Laki	419	58.11	721
		Perempuan	302	41.89	
3.	SMA/MA/SMK	Laki-Laki	355	66.48	534
		Perempuan	179	33.52	

Sumber: Position Paper PUG Bidang Pendidikan Prov. Jatim, 2012

Contoh gambar untuk Tabel 6.7. adalah:

Gambar 6.2. : Jumlah dan Persentase Siswa **Putus Sekolah** menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Malang, Tahun 2011/2012



Sumber: Position Paper PUG Bidang Pendidikan Prov. Jatim, 2012

BAB 7

ANALISIS KESENJANGAN GENDER

Analisis terhadap data terpilah dapat dilakukan baik secara deskriptif/ sederhana maupun secara komprehensif. Analisis sederhana dapat disusun dengan cara mendeskripsikan data terpilah yang berhubungan dengan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, antara lain dengan menghitung perbedaan gender, rasio gender, dan indeks paritas gender. Identifikasi terhadap ketimpangan dilakukan dengan mengaitkannya kepada akses, partisipasi, kontrol atau manfaat hasil pembangunan, diikuti dengan uraian tentang apa yang menjadi penyebabnya. Analisis data terpilah secara komprehensif, dilakukan dengan menjelaskan tentang ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, kemudian melengkapinya dengan informasi tentang peran, status dan kondisi lain dari laki-laki dan perempuan serta informasi kondisi sosial budaya setempat yang membuatnya unik. Analisis komprehensif yang membahas secara sistematis perbedaan peran, status, dan kondisi laki-laki dan perempuan ini biasa disebut juga sebagai analisis gender.

1. Analisis Sederhana atau Deskriptif

Gambaran tentang ketimpangan antara laki-laki dan perempuan atau kesenjangan gender dapat dilihat dari besarnya perbedaan gender (dimana semakin besar semakin buruk), rasio gender atau rasio jenis kelamin (dimana semakin mendekati 100 persen semakin baik) dan indeks paritas gender (dimana semakin mendekati 100 persen semakin baik).

Hasil hitungan nilai ketimpangan gender dapat diintegrasikan kedalam tabel untuk sekaligus ditampilkan narasinya. Berikut contoh tabel yang menyajikan analisis kesenjangan gender, yaitu Tabel 7.1. tentang ketimpangan gender dalam pengelolaan PAUD, Tabel 7.2. tentang ketimpangan gender dalam kasus pneumonia dan Tabel 7.3. tentang ketimpangan gender dalam partisipasi sekolah.

Tabel 7.1. :

Persentase Pengelola PAUD menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara

2013

No.	Kecamatan	Pengelola PAUD %			Perbedaan Gender
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pemenang	25.76	74.24	100	48.48
2	Tanjung	13.84	86.16	100	72.33
3	Gangga	12.75	87.25	100	74.51
4	Kayangan	9.22	90.78	100	81.56
5	Bayan	6.31	93.69	100	87.39
	Jumlah	12.44	87.56	100	75.13

Sumber: Statistik Pendidikan Kab. Lombok Utara 2013, diolah

Sebelum melakukan analisis, lakukan lebih dulu pengamatan terhadap tabel 7.1. sebagai berikut:

- Dilihat dari komposisi menurut jenis kelamin ternyata perempuan lebih berperan atau dapat dikatakan mendominasi peran dalam pengelolaan PAUD. Lebih dari 80 persen PAUD dikelola oleh perempuan
- Pola seperti itu berlaku di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, namun di Kecamatan Pemenang, peran laki-laki dalam pengelolaan PAUD agak besar atau sekitar 25 persen.

Uraikan hasil pengamatan dengan narasi yang menarik.

Tabel 7.2. :
Persentase Kasus Pneumonia menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di kabupaten Lombok Utara **2013**

No.	Kecamatan	Puskesmas	Persentase Kasus Pneumonia %			Rasio Gender
			Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Bayan	Bayan	34.85	65.15	100	1.87
2	Kayangan	Kayangan	34.98	65.02	100	1.86
3	Gangga	Gangga	33.33	66.67	100	2.00
4	Tanjung	Tanjung	30.64	69.36	100	2.26
5	Pemenang	Pemenang	30.05	69.95	100	2.33
6	Nipah	Nipah	38.57	61.43	100	1.59
	Jumlah		32.52	67.48	100	2.07

Sumber: Statistik Pendidikan Kab. Lombok Utara 2013, diolah

Sebelum melakukan analisis, lakukan lebih dulu pengamatan terhadap tabel 7.2. sebagai berikut:

- Dari seluruh kasus pneumonia di Kabupaten Lombok Utara, ternyata persentase penderita perempuan lebih dari dua kali lipat persentase penderita laki-laki
- Bila dilihat antar-kecamatan, penderita pneumonia perempuan selalu lebih besar dari laki-laki. Rasio jenis kelaminnya berkisar antara 1,59 (Kecamatan Nipah) dan 2,33 (Kecamatan Pemenang)

Uraikan kesimpulan terhadap hasil pengamatan ini dengan narasi semenarik mungkin.

Tabel 7.3. :
Angka Partisipasi Sekolah menurut Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara **2011**

No.	Usia (Tahun)	APS			Indeks Paritas Gender
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	7-12	96.27	97.46	96.84	1.01
2	13-15	88.14	87.37	87.77	0.99
3	16-18	58.56	53.91	56.46	0.92
4	19-24	13.36	8.74	10.9	0.65

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2012 diolah

Sebelum melakukan analisis, lakukan lebih dulu pengamatan terhadap tabel 7.3. sebagai berikut:

- a. Indeks paritas gender adalah hasil bagi capaian kinerja perempuan terhadap capaian kinerja laki-laki. Hal ini berarti bila indeks berada pada kisaran nilai 1, maka dianggap kesenjangan gender sangat kecil atau hampir setara. Nilai indeks pada anak usia 7-12 tahun menunjukkan ada sedikit lebih banyak anak laki-laki yang berpartisipasi di sekolah dasar daripada anak perempuan.
- b. Tabel 7.3. diolah dari data BPS yang dikumpulkan secara sampel, sehingga data APS untuk usia 19-24 tahun memerlukan perhatian khusus. APS pada usia ini berkaitan dengan usia penduduk di perguruan tinggi, sehingga perlu dicari informasi tentang keberadaan perguruan tinggi di Lombok Utara. Kalau di kabupaten tidak terdapat perguruan tinggi atau lokasinya jauh dari lokasi perguruan tinggi atau jumlah mahasiswanya sedikit, mungkin data tentang APS usia 19-24 tahun kurang bermanfaat untuk ditampilkan.

Uraikan kesimpulan hasil pengamatan ini dengan analisis deskriptif.

2. Analisis Komprehensif

Analisis gender dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan menggunakan analisis SWOT (Bappenas dan KPPPA, 2006), PROBA (KPPPA, 2009) atau GAP (Rosalin Lenny N; dkk, 2001; Bappenas dan KPPPPA, 2007). SWOT atau *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*, merupakan suatu teknis analisis manajemen yang didasarkan pada kondisi internal berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan serta kondisi external berkaitan dengan peluang dan ancaman. PROBA atau *Problem-based Analysis* mendasarkan telaah pada masalah atau isu gender yang berkembang dalam masyarakat. Sementara GAP atau *Gender Analysis Pathway* adalah metode analisis yang dikembangkan Bappenas sebagai analisis kebijakan untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program-program pembangunan. GAP difokuskan untuk melakukan reformulasi kebijakan agar responsif gender.

Metode GAP dapat memberikan manfaat pada:

- a. Penetapan program pembangunan yang responsif gender, atau perencanaan dan penganggaran yang memerhitungkan kepentingan laki-laki dan perempuan,
- b. Penetapan prioritas permasalahan dan membuat solusi alternatif untuk mengatasi masalah gender.

Ada sembilan tahap kegiatan yang harus dilakukan dalam GAP, seperti yang disajikan dalam Gambar 7.1. yang menggambarkan pokok-pokok alur kerja analisis gender yang digunakan. Sebuah matriks pun telah disiapkan untuk membantu penyusunan analisis dengan penjelasan sebagai berikut⁶:

⁶ Sumber: Rosalin Lenny N, et al. (2001); Bappenas dan Kementerian PPPA (2007); Dikembangkan dengan contoh beberapa SKPD pada buku Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) oleh AIPD (2014).

TAHAP PERTAMA

Mencakup langkah analisis 1-5 dan disediakan 5 kolom dalam matriks untuk menampung penjelasan pada langkah-langkah tersebut.

Langkah 1:

- a. Pilih kebijakan atau program atau kegiatan pembangunan yang akan dianalisis. Integrasi gender dapat dilakukan pada kebijakan atau program atau kegiatan yang baru akan/sedang dibuat maupun yang sudah ada. Pastikan pada tingkat kebijakan, program atau kegiatan, analisis akan dilakukan.

Catatan: Bila ditinjau dari keterinciannya, kebijakan biasanya sangat umum, kemudian diuraikan dalam program yang lebih rinci dan dijelaskan secara detail dalam kegiatan. Oleh karena itu, analisis akan lebih mudah dilakukan pada tataran kegiatan.

- b. Identifikasi dan tuliskan di kolom (1) tujuan dari kebijakan atau program atau kegiatan yang akan dianalisis. Periksa rumusan/formulasi tujuan kebijakan, program atau kegiatan yang dipilih. Apabila terdapat beberapa tujuan, tuliskan semua di kolom ini.

Catatan: Kebijakan, program atau kegiatan yang dibuat biasanya dinyatakan sebagai netral gender. Untuk memperkuat argument ini, penyusun analisis perlu membuktikannya dengan mengumpulkan data terpilah tentang penerima manfaat hasil pembangunan yang dimaksud.

Langkah 2:

Sajikan di kolom (2) data dan informasi terpilah yang relevan dengan kebijakan, program atau kegiatan yang dipilih, sebagai pembuka wawasan. Data terpilah untuk membuka wawasan ini dapat berasal dari *baseline study* atau data tentang hasil intervensi terhadap kebijakan, program atau kegiatan yang dipilih.

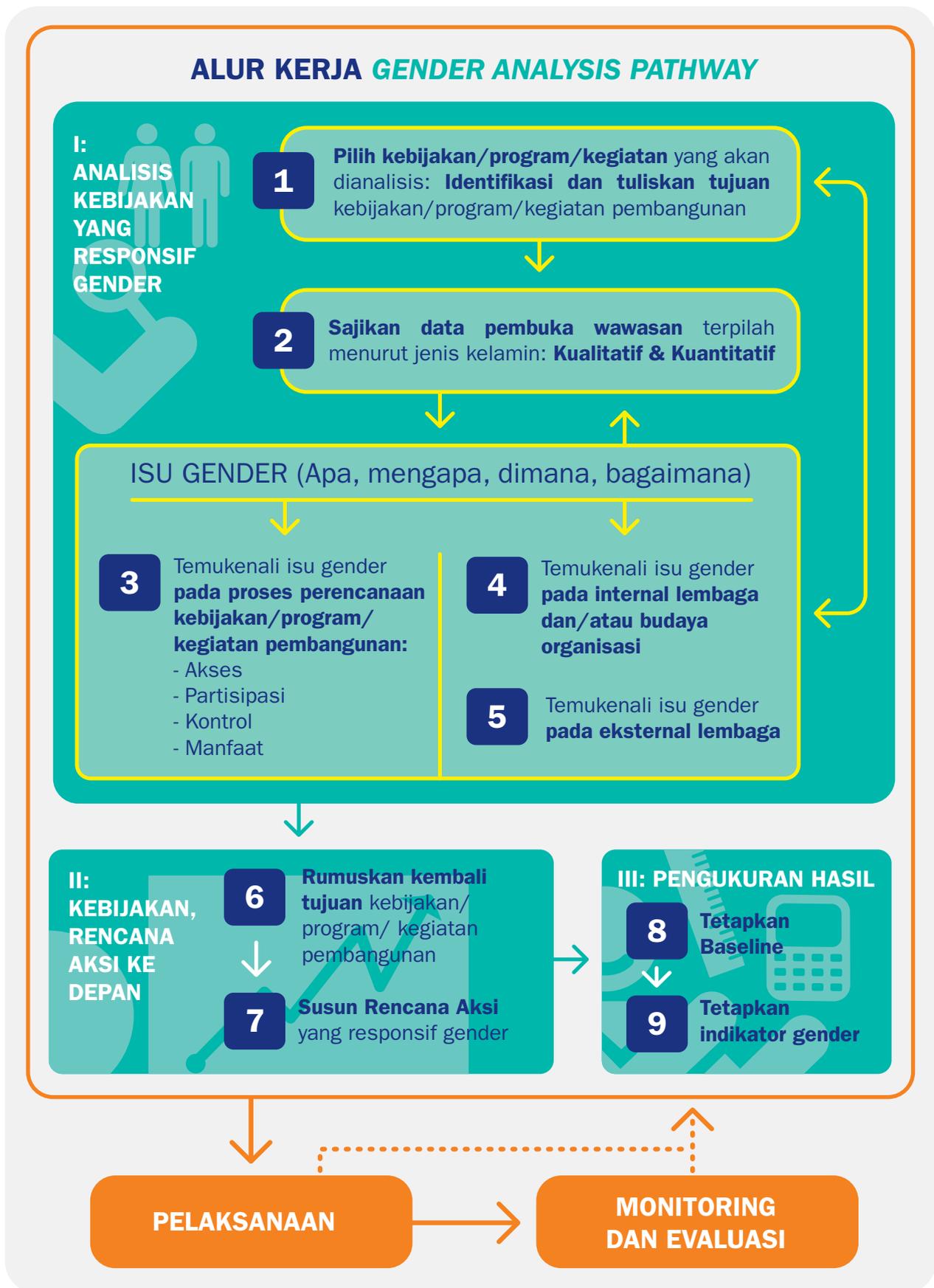
Catatan: Dalam kasus dimana data terpilah kuantitatif tidak tersedia, peneliti dapat menggunakan data terpilah kualitatif. Bila dua-duanya tidak tersedia, analisis secara cepat dapat mengumpulkan data kualitatif yang *reliable* (dapat dipercaya) dari masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan dengan metode ilmiah yang sudah teruji, seperti *focus group discussion* atau FGD (Irwanto,1998) dan wawancara cepat.

Langkah 3:

Lakukan identifikasi isu gender pada proses perencanaan kebijakan, program atau kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dari empat aspek yang berpotensi sebagai penyebab kesenjangan gender, yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Catatan: Isu yang terungkap dari data terpilah tidak selalu memperlihatkan ketimpangan gender, seperti kondisi laki-laki lebih baik daripada perempuan atau sebaliknya; tetapi dapat saja memperlihatkan kondisi seimbang antara laki-laki dan perempuan. Walau demikian proses perlu dilanjutkan dengan meneliti faktor-faktor penyebab kondisi itu.

Gambar 7.1. : Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway)



Sumber: Rosalin Lenny N, et al.,2001; Bappenas dan Kementerian PPPA, 2007

Langkah 4:

Lakukan identifikasi terhadap kondisi dalam lingkungan lembaga atau organisasi yang dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender, misalnya komitmen lembaga atau organisasi yang tercermin pada produk hukumnya, kebijakan lembaga yang belum responsif gender, dan minimnya pemahaman tentang konsep gender di kalangan pembuat keputusan.

Catatan: Berbeda dengan produk hukum dan kebijakan lembaga yang biasanya tertulis, kurangnya pemahaman tentang konsep gender dapat diidentifikasi tidak hanya dari adanya sosialisasi gender tetapi juga dari kurangnya dukungan moral terhadap keadilan dan kesetaraan gender, misalnya pengarahan dan dukungan untuk mengumpulkan data terpilah.

Langkah 5:

Lakukan identifikasi terhadap kondisi di luar lingkungan lembaga atau organisasi yang dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender yang berpengaruh pada proses pelaksanaan program atau kegiatan. Teliti apakah di kalangan masyarakat dimana program atau kegiatan dilaksanakan, masih sangat berpengaruh budaya patriarki, masih banyak pengaruh gender stereotipi dan/atau marginalisasi terhadap perempuan.

Catatan: Untuk menggali informasi tentang penyebab kesenjangan gender di kalangan masyarakat, yang umumnya kualitatif, peneliti dapat melakukan pengamatan seperti pada Langkah 2.

Gambar 7.2. : Matriks Lembar Kerja Gender Analysis Pathway (GAP)

Tahap I: ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender

Sumber: Bappenas dan KPPPA, 2007

TAHAP KEDUA

Mencakup langkah analisis 6-7 terkait formulasi kebijakan dan rencana aksi kedepan.

Langkah 6:

Rumuskan kembali tujuan kebijakan atau program atau kegiatan yang menjadi fokus pengamatan agar menjadi responsif gender. Tujuan semula tidak perlu diubah tetapi sisipkan hal-hal yang mengacu pada kondisi, peran dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Gunakan kata kerja pada langkah ini.

Langkah 7:

Susun rencana aksi yang responsif gender dengan merujuk pada isu gender yang telah teridentifikasi (Langkah 3-5) dan sesuai dengan kebijakan atau program atau kegiatan yang telah direformulasikan pada Langkah 6.

TAHAP KETIGA

Mencakup langkah analisis 8-9 terkait pengukuran hasil. Disediakan 2 kolom dalam matriks untuk menampung penjelasan pada langkah-langkah tersebut.

Langkah 8:

Tetapkan baseline atau data dasar yang dipilih sebagai suatu titik untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan. Data dasar ini dapat diambil dari data pembuka wawasan (Langkah 2) yang relevan dan mempunyai daya ungkit tinggi.

Langkah 9:

Tetapkan indikator gender berupa ukuran kuantitatif atau kualitatif untuk memperlihatkan bahwa:

- a. Masih ada kesenjangan setelah adanya reformulasi kebijakan atau program atau kegiatan,
- b. Terjadinya perubahan kondisi internal lembaga terhadap pemahaman gender, dan
- c. Terjadinya perubahan dalam ketimpangan gender terkait dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat hasil pembangunan.

BAB 8



PEMANFAATAN DATA TERPILAH DAN GAP DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Dalam panduan ini beberapa contoh pemanfaatan data terpisah menurut jenis kelamin telah diuraikan. Pemanfaatan itu antara lain untuk melihat capaian implementasi PUG dan menyusun analisis gender dengan metode GAP. Di samping itu, data terpisah juga sangat berguna sebagai bagian dari materi penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, data yang terpisah menurut jenis kelamin memberikan gambaran tentang ada tidaknya kesenjangan kondisi, peran, dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan data terpisah peran perempuan sebagai pelaku pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan dapat diketahui. Di samping itu, data terpisah juga dapat menggambarkan posisi laki-laki dan perempuan sebagai penerima manfaat pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan.

Berkaitan dengan analisis gender, tersedianya data terpisah menjadi prasyarat dapat disusunnya GAP, karena dalam tahap penyusunan analisis diperlukan data terpisah untuk:

1. Membuka wawasan
2. Menentukan *baseline*
3. Mengevaluasi keberhasilan kebijakan, program atau kegiatan yang direformulasi.

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang terintegrasi dan sudah lama diterapkan dalam proses manajemen pembangunan. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengintegrasikan gender dalam proses manajemen pembangunan tersebut.

KPPPA (2010) telah merumuskan konsep teknis tentang PPRG sebagai berikut:

1. Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun rencana program atau kegiatan untuk menjawab permasalahan gender di masing-masing sektor.
2. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan mengintegrasikan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses penyusunan.
3. Dalam proses PPRG perlu keterlibatan laki-laki dan perempuan untuk secara bersama-sama menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

4. Anggaran yang responsif gender diarahkan untuk membiayai program atau kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat yang adil kepada laki-laki dan perempuan.
5. Anggaran yang responsif gender dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis gender atau pun kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh laki-laki dan perempuan.

Untuk mengetahui pemanfaatan data terpilah dalam PPRG perlu diketahui proses penyusunan PPRG dan pada tahap mana data terpilah dimanfaatkan dalam proses tersebut. Berikut adalah tahapan penyusunan PPRG:

1. TOR (*terms of reference*) adalah penjelasan yang berisi latar belakang mengapa kegiatan diusulkan, siapa penerima manfaat kegiatan, dan strategi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan, serta waktu dan biaya yang dibutuhkan. Adanya isu gender yang sudah lama terjadi pada kelompok atau wilayah tertentu merupakan alasan yang tepat disusunnya PPRG. Berbeda dengan TOR umum yang biasa disusun, tahap penyusunan TOR pada PPRG didahului dengan pembuatan pernyataan anggaran gender.
2. *Gender Budget Statement* (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG) merupakan dokumen bagian dari TOR yang menginformasikan, utamanya, output kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. GBS selengkapnya merupakan daftar isian tentang tujuh hal:
 - a. Nama program,
 - b. Nama kegiatan,
 - c. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kegiatan,
 - d. *Output* kegiatan, yaitu jenis, volume dan satuan dari suatu *output* kegiatan,
 - e. Analisis situasi yang menganalisis kondisi laki-laki dan perempuan berdasarkan data pembuka wawasan, apa jenis ketimpangan yang ada dan faktor apa yang menjadi penyebabnya; prosedur analisisnya menggunakan bagan alur GAP. Rencana aksi adalah bagian dari *output*, oleh karena itu harus relevan dengan *output*. Tujuan diusulkannya rencana aksi ini adalah agar permasalahan gender yang dihadapi dapat diperkecil.
 - f. Alokasi anggaran disusun dengan mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan pengambilan keputusan terhadap sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
 - g. *Outcome* (dampak/manfaat) kegiatan adalah hasil *output* secara luas yang dikaitkan dengan isu gender yang teridentifikasi. Dampak program atau kegiatan harus berkontribusi terhadap penurunan atau penghapusan kesenjangan gender dalam berbagai sektor pembangunan.

Gambar 8.1. : Contoh Format Gender Budget Statement (GBS)

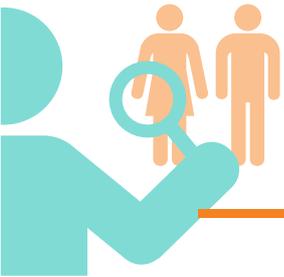
GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) atau PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG)

Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG) adalah dokumen yang menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada dan atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. (KPPA, 2010 dan 2011). **GBS** merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender. (Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan KPPA, 2012)

Meskipun Format GBS bervariasi antar daerah, namun substansi isinya tidak berbeda. Pengisian form GBS dapat dilakukan melalui transformasi analisis gender pada GAP ke GBS. Format GBS dan transformasi analisis gender pada GAP ke GBS dapat dilakukan sebagai berikut:

Program	<i>Pindahkan isian pada GAP langkah ke-1</i>	
Tujuan Program	<i>Pindahkan isian pada GAP langkah ke-1</i>	
Capaian Program	<i>Indikator capaian program diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renstra atau Renja SKPD</i>	
Kegiatan	<i>Pindahkan isian pada GAP langkah ke-1</i>	
Tujuan Kegiatan	<i>Pindahkan isian pada GAP langkah ke-1</i>	
Kode Rekening kegiatan	<i>Isikan kode rekening</i>	
Analisis Situasi	<i>Isikan hasil analisis situasi pada GAP langkah ke-2, 3, 4 dan 5</i>	
Perencanaan Kegiatan	Rencana Aksi	<i>..... (isikan langkah GAP ke 7) (kegiatan yang berkontribusi pada kesetaraan gender)</i>
	Tujuan	<i>..... (isikan langkah GAP ke 6)</i>
	Aktivitas	<i>Isikan jabaran langkah GAP ke 7 yang mampu menjawab permasalahan gender yang telah teridentifikasi pada langkah ke 3, 4, dan 5</i>
	Sumberdaya	Dana: SDM: <i>(mencakup Panitia, Fasilitator dan peserta kegiatan (dipilih menurut jenis kelamin))</i> Sarana dan prasarana:
	Indikator Output	<i>Ambil dari langkah GAP ke-9, dihubungkan dengan barang dan jasa/ pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan SKPD</i>
Alokasi Sumber Daya	Dana	<i>Jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan</i>
	SDM	<i>Jumlah SDM yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan, baik SDM sebagai nara sumber/ fasilitator, panitia kegiatan maupun peserta program/ kegiatan (dipilih menurut jenis kelamin)</i>
	Sarana dan Prasarana	<i>Peralatan yang dibutuhkan untuk pencapaian output kegiatan</i>
Dampak/ Manfaat	<i>Ambil dari langkah GAP ke-9, dihubungkan dengan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan program SKPD. Dampak program harus berkontribusi terhadap penurunan/ penghapusan kesenjangan gender dalam bidang pembangunan</i>	

Sumber: KPPPA, 2011



BAB 9

PENUTUP

“Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah serta pihak yang melakukan pengawasan dan advokasi dalam upaya mengurangi kesenjangan gender pada berbagai sektor pembangunan.”

Buku Pedoman Teknis Penyusunan dan Analisis Data Terpilah untuk Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah ini diharapkan mampu mendukung proses penyusunan data terpilah di berbagai sektor pembangunan, pada umumnya, serta sektor pendidikan dan kesehatan, pada khususnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 yang mengatur tentang bagaimana pemerintah daerah menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) agar kesetaraan dan keadilan gender dapat segera terwujud. Proses penyusunan yang tersaji dimulai dari cara menentukan jenis data yang dipilih, bagaimana menyusun dan menyajikan data terpilah, bagaimana mengidentifikasi masalah/isu gender, melakukan analisis gender dan mengintegrasikannya dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender.

Berbagai penjelasan yang diuraikan dalam panduan ini juga memberikan gambaran tentang pentingnya data terpilah, karena ketersediaan data terpilah merupakan prasyarat dapat tersusunnya PPRG. Untuk itu, setiap kegiatan administrasi perkantoran perlu dilengkapi dengan catatan tentang laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam kegiatan pembangunan baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat hasil pembangunan. Di samping itu, dalam setiap kegiatan pendataan dan survei, pertanyaan tentang jenis kelamin responden perlu dikumpulkan, direkam, diolah dan disebarluaskan.

Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah serta pihak yang melakukan pengawasan dan advokasi dalam upaya mengurangi kesenjangan gender pada berbagai sektor pembangunan. Segala kritik, saran dan masukan untuk penyempurnaan panduan ini sangat dihargai.

Daftar Pustaka

- Anik Amikawati. 2008. *Analisis Gender pada Kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2004 - 2009* (Studi Kasus Pelaksanaan Program DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Bidang Sosial Khususnya Pemberdayaan Perempuan). Thesis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat S2 di Universitas Diponegoro. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2007. *Gender Analysis Pathway (GAP), Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Bappenas dan KPPPA.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Perempuan dan Laki-laki di Indonesia*. Jakarta, BPS.
- Irwanto, Ph.D. 1998. *Focus Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar Praktis*. Jakarta, UNIKA Atmajaya.
- Bhasin, Kamla. 2000. *Understanding Gender*. New Delhi. Terjemahan oleh Moh. Zaki Hussein.
- Kementerian Kesehatan dan KPPPA. 2010. *Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan*. Jakarta, Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. 2012. *Profil Data Kesehatan Indonesia 2011*. Jakarta, Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Keuangan. 2009. *PMK No. 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-KL)*. Jakarta, Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. 2010. *PMK No. 104 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2001*. Jakarta, Kementerian Keuangan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Renstra Kemendikbud 2009*. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian PU dan KPPPA. 2009. *Panduan Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan Program dan Anggaran*. Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum.
- KPPPA dan Unifem. 2010. *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Generik*. Jakarta, KPPPA.
- KPPPA dan BPS. 2011. *Modul Pelatihan: Pengelolaan Data Gender dan Anak*. Jakarta, KPPPA, BPS.
- KPPPA dan Pemda Bengkulu. 2013. *Pengintegrasian Gender dalam Pembangunan*. Bahan Paparan KPPPA dan Pemerintah Daerah Bengkulu.
- KPPPA. 2002. *Panduan Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta, KPPPA.

- KPPPA. 2009. *Panduan Umum Penyusunan Data Terpilah dengan Analisis Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan*. Jakarta, KPPPA.
- KPPPA. 2009. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Data Terpilah*. Jakarta, KPPPA.
- KPPPA. 2011. *Panduan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Kementerian dan Lembaga Non-kementerian (K/L)*. Jakarta, KPPPA.
- Mastoni Sani. 2013. *PPRG Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender*. Bahan Paparan KPPPA.
- Pemda DI Yogyakarta. 2013. *GAP, GBS, TOR yang Responsif Gender dari BPPM DIY dan SKPD Lainnya*. Kumpulan Materi di Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pemda Jawa Tengah. 2013. *Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 21 Tahun 2013 Tentang Panduan Tehnis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang, Pemda Jateng.
- Rosalin Lenny N, Soedarti Surbakti, Yulfita Rahardjo, Elizabeth Carriere, Hartomo Heroe. 2001. *Gender Analysis Pathway (GAP), Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan*. Seri Perangkat Analisis Gender Buku 1. Jakarta, Bappenas.
- Saparinah Sadli, dkk. 1985. *Identifikasi Indikator Sosial Wanita*. Jakarta, Unicef.
- Siti Sofiah dan Ida Kintamani. 2008. *Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua, dalam Pedoman Penguatan dan Penyempurnaan Data Sektoral*. Koordinator oleh: Dr. Soedarti Surbakti. Buku MDGs Seri 9. Jakarta, BPS.
- Surbakti Soedarti. 2001. *Indikator Gender untuk Perencanaan Pembangunan*. Jakarta, Bappenas.
- Surbakti Soedarti. 2007. *Upaya Pemantauan dan Evaluasi Program Pelayanan Sosial Ibu dan Anak melalui Indikator Pembangunan Milenium di Indonesia*. Buku MDGs Seri 1. Jakarta, BPS.
- Surbakti Soedarti. 2008. *Manfaat Indikator untuk Perencanaan Pembangunan Wilayah. Modul VII Materi Pelatihan 'Manfaat Data Statistik dalam Pembangunan'*. Jayapura, Pemda.
- UNDP. 2014. *Human Development Report 2014; Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerability and Building Resilience*. New York, UNDP.

LAMPIRAN A

Tabel A.1. Daftar Indeks Kesenjangan Gender (Gender Inequality Index atau GII) serta Human Development Index (HDI) dari Beberapa Negara di Dunia, Tahun 2013

Tabel A.1. Daftar Indeks Kesenjangan Gender (Gender Inequality Index atau GII) serta Human Development Index (HDI) dari Beberapa Negara di Dunia, Tahun 2013

Negara	Rangking GII	Nilai GII	Rangking HDI
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT			
Slovenia	1	0.021	25
Switzerland	2	0.030	3
Germany	3	0.046	6
Sweden	4	0.045	12
Denmark	5 /6	0.056	10
Austria	5 /6	0.056	21
Netherlands	7	0.057	4
Italy	8	0.061	26
Belgium	9 /10	0.068	21
Norway	9/10	0.068	1
HIGH HUMAN DEVELOPMENT			
China	37	0.202	93
Bulgaria	38	0.207	58
Romania	54	0.320	55
Thailand	70	0.364	89
Mexico	73	0.376	70
Brazil	85	0.441	80
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT			
Botswana	100	0.486	108
Bhutan	102	0.495	136
Indonesia	103	0.500	108
Cambodia	105	0.505	137
Samoa	111	0.517	104
Guatemala	112	0.523	125
LOW HUMAN DEVELOPMENT			
Mauritania	142	0.644	161
Central African Republic	144	0.654	185
Liberia	145	0.655	175
Mozambique	146	0.657	178
Congo	147	0.669	186
Mali	148	0.673	176
Niger	149	0.674	187
Afghanistan	150	0.705	169
Chad	151	0.707	185
Yemen	152	0.733	154

Sumber: Human Development Reports, UNDP (2014)

Tabel A.2. Daftar Resmi Indikator MDGs (Tujuan 1 – 6, 7C – 7D)

Tabel A.2. Daftar Resmi Indikator MDGs (Tujuan 1 – 6, 7C – 7D), Efektif per-15 Januari 2008

Millennium Development Goals (MDGs)	
Target dan Sasaran (dari deklarasi Millennium)	Indikator untuk memantau pembangunan
Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan	
Target 1.A Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US\$1 per hari, antara 1990 dan 2015	1.1 Proporsi penduduk dengan pendapatan di bawah \$1 (PPP) per hari* 1.2 Indeks kedalaman kemiskinan berdasarkan kemiskinan \$1 (PPP) per hari 1.3 Bagian kuintil penduduk termiskin dalam konsumsi nasional
Target 1.B Menyediakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda	1.4 Tingkat pertumbuhan PDB tiap penduduk yang bekerja 1.5 Rasio pekerja terhadap total penduduk 1.6 Proporsi penduduk yang bekerja dengan pendapatan di bawah \$1 (PPP) per hari 1.7 Proporsi pekerja dengan status pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk yang bekerja
Target 1.C Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya sebelum akhir 2015	1.8 Prevalensi balita dengan berat badan rendah 1.9 Proporsi penduduk yang konsumsinya di bawah garis konsumsi minimum (2 100 kkal) per kapita per hari
Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua	
Target 2.A Menjamin, sebelum akhir 2015, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, di mana pun, dapat menyelesaikan pendidikan dasar	2.1 Angka partisipasi murni pendidikan dasar 2.2 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil mencapai kelas 6 2.3 Angka melek huruf penduduk lelaki dan perempuan berusia 15-24 tahun
Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
Target 3.A Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan sebelum akhir 2005, dan di semua jenjang sebelum akhir 2015	3.1 Rasio L/P APM- tingkat SD Rasio L/P APM- tingkat SMP Rasio L/P APM- tingkat SMA/SMK Rasio L/P APM- tingkat PT 3.2 Bagian perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian 3.3 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen

Tujuan 4. Mengurangi Kematian Anak		
Target 4.A Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya, antara 1990 dan 2015	4.1	Angka Kematian Balita (AKBA)
	4.2	Angka Kematian Bayi (AKB)
	4.3	Proporsi anak berusia 12-23 bulan yang diimunisasi campak
Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu		
Target 5.A Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990 dan 2015	5.1	Angka Kematian Ibu (AKI)
	5.2	Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih
Target 5.B Dapat menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi untuk semua, sebelum akhir 2015	5.3	Prevalensi penggunaan kontrasepsi
	5.4	Angka kelahiran oleh perempuan remaja
	5.5(a)	Cakupan pelayanan antenatal setidaknya sekali
	5.5(b)	Cakupan pelayanan antenatal setidaknya 4 kali
	5.6	Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)
Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya		
Target 6.A Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS sebelum akhir 2015	6.1	Prevalensi HIV di antara penduduk berusia 15-24 tahun
	6.2	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi yang terakhir
	6.3	Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun dengan pengetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS
	6.4	Rasio kehadiran sekolah anak yatim-piatu berusia 10-14 tahun terhadap kehadiran sekolah anak bukan yatim-piatu berusia 10-14 tahun
Target 6.B Dapat menyediakan pelayanan pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sebelum akhir 2010	6.5	Proporsi penduduk terinfeksi HIV tingkat lanjut yang mempunyai akses pada obat <i>antiretroviral</i>

<p>Target 6.C</p> <p>Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit besar lainnya sebelum akhir 2015</p>	<p>6.6(a) Prevalensi malaria karena malaria</p> <p>6.6(b) Angka kematian karena malaria</p> <p>6.7(a) Proporsi balita yang tidur menggunakan kelambu yang telah diproteksi dengan insektisida</p> <p>6.7(b) Persentase balita yang demam dan mendapat penanganan obat anti malaria yang sesuai</p> <p>6.8(a/b/c) Kasus, prevalensi dan angka kematian yang berkaitan dengan tuberkulosis</p> <p>6.9(a/b) Proporsi kasus tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dengan DOTS (<i>directly observed treatment short course</i>)</p>
<p>Tujuan 7: Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup</p>	
<p>Target 7.C</p> <p>Mengurangi separuh proporsi penduduk tanpa akses berkelanjutan pada air minum yang aman dan sanitasi dasar sebelum akhir 2015</p>	<p>7.7 Proporsi penduduk yang menggunakan air minum yang aman</p> <p>7.8 Proporsi penduduk yang mempunyai akses pada sanitasi dasar</p>
<p>Target 7.D</p> <p>Mencapai perbaikan yang signifikan atas kehidupan paling tidak 100 juta penghuni permukiman kumuh sebelum akhir 2020</p>	<p>7.9 Proporsi penduduk yang tinggal di tempat kumuh**</p>
<p>* Untuk memantau kecenderungan kemiskinan nasional sebaiknya dipakai indikator yang dihitung berdasarkan garis kemiskinan nasional, kalau ada.</p> <p>**Proporsi sesungguhnya penghuni daerah kumuh diukur dengan proksi, diwakili oleh penduduk perkotaan yang tinggal di rumah tangga dengan paling sedikit satu dari empat karakteristik: (a) senjang akses ke penyediaan air minum yang aman, (b) senjang akses ke sanitasi dasar, (c) terlalu padat (3 atau lebih orang per kamar), dan (d) tempat tinggal terbuat dari bahan yang tidak tahan lama.</p> <p>Catatan: Target dan sasaran pembangunan milenium merupakan hasil dari deklarasi milenium, yang ditandatangani oleh 189 negara, termasuk 147 kepala negara dan pemerintahan, pada bulan September tahun 2000 (http://www.un.org.millennium/declaration/ares552e) dan diikuti oleh kesepakatan lanjutan oleh negara-negara anggota pada tahun 2005.</p>	
<p>Sumber: United Nations</p>	

Tabel A.3. Contoh-contoh Produk Hukum Daerah Terkait PUG dan PPRG

Daerah	Produk Hukum
Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB)	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Gubernur No. 83/2010 tentang Pembentukan Fokal Poin Gender di Provinsi NTB • Keputusan Gubernur No. 314/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG dan Tim Teknis Anggaran Responsif Gender (ARG) di Provinsi NTB
Prov. Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 18/2010 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 • Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 27/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur
Prov. Nusa Tenggara Timur (NTT)	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Gubernur No. 20/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan PUG di Lingkup Pemerintah Provinsi
Kab. Malang, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Malang No. 33/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Malang • Peraturan Bupati Malang No. 34/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

LAMPIRAN B

Lampiran B: Contoh-contoh Bentuk Tabel Data Terpilah Pelaku Pembangunan

Tabel B.1. Jumlah dan Persentase SDM Kabupaten menurut SKPD dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja	Jumlah			Persentase/Komposisi			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	SKPD Pendidikan						100%	
2.	SKPD Kesehatan						100%	

Sumber:

Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L - Persentase P); L= Laki-laki, P= Perempuan

Tabel B.2. Jumlah dan Persentase SDM Kabupaten menurut SKPD, Umur dan Jenis Kelamin, Tahun ...

No.	Satuan Kerja/ Umur	Jumlah			Persentase/Komposisi			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	SKPD Pendidikan							
	<30 tahun						100%	
	30-39 tahun						100%	
	40-49 tahun						100%	
	50 tahun >						100%	
	Sub-jumlah						100%	
2.	SKPD Kesehatan							
	<30 tahun						100%	
	30-39 tahun						100%	
	40-49 tahun						100%	
	50 tahun >						100%	
	Sub-jumlah						100%	

Sumber:

Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L - Persentase P); L= Laki-laki, P= Perempuan

Tabel B.3. Jumlah dan Persentase SDM Kabupaten menurut SKPD, Ijazah Tertinggi dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Ijazah	Jumlah			Persentase/Komposisi			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	SKPD Pendidikan							
	=< SMA sederajat						100%	
	Diploma I/II						100%	
	Diploma III						100%	
	Diploma IV/S1						100%	
	S2						100%	
	S3						100%	
	Sub-jumlah						100%	
2.	SKPD Kesehatan							
	=< SMA sederajat						100%	
	Diploma I/II						100%	
	Diploma III						100%	
	Diploma IV/S1						100%	
	S2						100%	
	S3						100%	
	Sub-jumlah						100%	

Sumber:

Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L - Persentase P); L= Laki-laki, P= Perempuan

Tabel B.4. Jumlah dan Persentase SDM Kabupaten menurut SKPD, Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Golongan	Jumlah			Persentase/Komposisi			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	SKPD Pendidikan							
	Golongan IV						100%	
	Golongan III						100%	
	Golongan II						100%	
	Sub-jumlah						100%	
2.	SKPD Kesehatan							
	Golongan IV						100%	
	Golongan III						100%	
	Golongan II						100%	
	Golongan I						100%	
Sub-jumlah						100%		

Sumber:

Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L - Persentase P); L= Laki-laki, P= Perempuan

Tabel B.5. Jumlah dan Persentase SDM Kabupaten menurut SKPD, Eselon dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Eselon	Jumlah			Persentase/Komposisi			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	SKPD Pendidikan							
	Eselon I						100%	
	Eselon II						100%	
	Eselon III						100%	
	Sub-jumlah						100%	
2.	SKPD Kesehatan							
	Eselon I						100%	
	Eselon II						100%	
	Eselon III						100%	
	Eselon IV						100%	
	Sub-jumlah						100%	

Sumber:

Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L - Persentase P); L= Laki-laki, P= Perempuan

Tabel B.6. Jumlah dan Persentase SDM Kabupaten menurut SKPD, Status dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Status	Jumlah			Persentase/Komposisi			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	SKPD Pendidikan							
	<30 tahun						100%	
	30-39 tahun						100%	
	40-49 tahun						100%	
	Sub-jumlah						100%	
2.	SKPD Kesehatan							
	<30 tahun						100%	
	30-39 tahun						100%	
	40-49 tahun						100%	
	50 tahun >						100%	
	Sub-jumlah						100%	

Sumber:

Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L - Persentase P); L= Laki-laki, P= Perempuan

Tabel B.7. Jumlah dan Persentase SDM Kabupaten menurut SKPD, Sertifikat Diklatpim Tertinggi dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Diklatpim	Jumlah			Persentase/Komposisi			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	SKPD Pendidikan							
	Diklatpim Tk I						100%	
	Diklatpim Tk II						100%	
	Diklatpim Tk III						100%	
	Sub-jumlah						100%	
2.	SKPD Kesehatan							
	Diklatpim Tk I						100%	
	Diklatpim Tk II						100%	
	Diklatpim Tk III						100%	
	Diklatpim Tk IV						100%	
Sub-jumlah						100%		

Sumber:

Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L - Persentase P); L= Laki-laki, P= Perempuan

Tabel B.8. Jumlah dan Persentase SDM Kabupaten menurut SKPD, Masa Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Masa Kerja	Jumlah			Persentase/Komposisi			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	SKPD Pendidikan							
	<5 tahun						100%	
	5- 9 tahun						100%	
	10-19 tahun						100%	
	20-25 tahun						100%	
	Sub-jumlah						100%	
2.	SKPD Kesehatan							
	<5 tahun						100%	
	5- 9 tahun						100%	
	10-19 tahun						100%	
	20-25 tahun						100%	
	30 tahun >						100%	
Sub-jumlah						100%		

Sumber:

Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L - Persentase P); L= Laki-laki, P= Perempuan

Tabel B.9. Indikator “Angka Partisipasi Pegawai Golongan IV sebagai Pejabat Struktural”, Kabupaten, Tahun

Satuan Kerja/ Golongan	Partisipasi/persentase			Indeks Paritas Gender
	L	P	L+P	
SKPD Pendidikan				
Pegawai struktural				
Pegawai non-struktural				
Sub-jumlah Seluruh Pegawai Gol IV	100%	100%	100%	
SKPD Kesehatan				
Pegawai struktural				
Pegawai non-struktural				
Sub-jumlah Seluruh Pegawai Gol IV	100%	100%	100%	

Sumber:

Catatan: Indeks Paritas Gender = (Partisipasi P/Partisipasi L); L= Laki-laki, P= Perempuan

Tabel B.10. Indikator “Angka Partisipasi Pegawai Berijazah S2+ sebagai Pejabat Struktural”, Kabupaten, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Golongan	Partisipasi/persentase			Indeks Paritas Gender
		L	P	L+P	
1.	SKPD Pendidikan				
	Pegawai struktural				
	Pegawai non-struktural				
	Sub-jumlah Seluruh Pegawai S2+	100%	100%	100%	
2.	SKPD Kesehatan				
	Pegawai struktural				
	Pegawai non-struktural				
	Sub-jumlah Seluruh Pegawai S2+	100%	100%	100%	

Sumber:

Catatan: Indeks Paritas Gender = (Partisipasi P/Partisipasi L); L= Laki-laki, P= Perempuan

LAMPIRAN C

Lampiran C: Contoh Bentuk Tabel Data Terpilah Penerima Manfaat Pembangunan dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Pegawai

Tabel C.1. Jumlah dan Persentase SDM Kabupaten menurut SKPD, Penerima Tugas Belajar Dalam Negeri dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Tugas Belajar DN	Jumlah			Persentase/Komposisi			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	SKPD Pendidikan							
	S1						100%	
	S2						100%	
	S3						100%	
2.	SKPD Kesehatan							
	S1						100%	
	S2						100%	
	S3						100%	

Sumber:

Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L - Persentase P); L= Laki-laki, P= Perempuan

Tabel C.2. Jumlah dan Persentase SDM Kabupaten menurut SKPD, Penerima Tugas Belajar Luar Negeri dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Tugas Belajar LN	Jumlah			Persentase/Komposisi			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	SKPD Pendidikan							
	S1						100%	
	S2						100%	
	S3						100%	
2.	SKPD Kesehatan							
	S1						100%	
	S2						100%	
	S3						100%	

Sumber:

Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L - Persentase P); L= Laki-laki, P= Perempuan

Tabel C.3. Jumlah dan Persentase SDM Kabupaten menurut SKPD, Penerima Tugas Pelatihan Diklatpim dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Tugas Pelatihan Diklatpim	Jumlah			Persentase/Komposisi			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	SKPD Pendidikan							
	Diklatpim Tk I						100%	
	Diklatpim Tk II						100%	
	Diklatpim Tk III						100%	
	Diklatpim Tk IV						100%	
2.	SKPD Kesehatan							
	Diklatpim Tk I						100%	
	Diklatpim Tk II						100%	
	Diklatpim Tk III						100%	
	Diklatpim Tk IV						100%	

Sumber:

Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L - Persentase P); L= Laki-laki, P= Perempuan

Tabel C.4. Jumlah dan Persentase SDM Kabupaten menurut SKPD, Penerima Tugas Pelatihan Teknis dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Tugas Pelatihan Teknis	Jumlah			Persentase/Komposisi			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	SKPD Pendidikan							
	Pelatihan						100%	
	Pelatihan						100%	
	Pelatihan						100%	
2.	SKPD Kesehatan							
	Pelatihan						100%	
	Pelatihan						100%	
	Pelatihan						100%	

Sumber:

Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L - Persentase P); L= Laki-laki, P= Perempuan

Tabel C.5. Jumlah dan Persentase SDM Kabupaten menurut SKPD, Penerima Tugas Pelatihan Administrasi Teknis dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Tugas Pelatihan Administrasi	Jumlah			Persentase/Komposisi			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	SKPD Pendidikan							
	Pelatihan						100%	
	Pelatihan						100%	
	Pelatihan						100%	
2.	SKPD Kesehatan							
	Pelatihan						100%	
	Pelatihan						100%	
	Pelatihan						100%	

Sumber:

Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L - Persentase P); L= Laki-laki, P= Perempuan

Tabel C.6. Jumlah dan Persentase SDM Kabupatenmenurut SKPD, Penerima Tugas Pelatihan Lainnya dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Tugas Pelatihan Lainnya	Jumlah			Persentase/Komposisi			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	SKPD Pendidikan							
	Pelatihan						100%	
	Pelatihan						100%	
	Pelatihan						100%	
2.	SKPD Kesehatan							
	Pelatihan						100%	
	Pelatihan						100%	
	Pelatihan						100%	

Sumber:

Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L - Persentase P); L= Laki-laki, P= Perempuan

LAMPIRAN D

Lampiran D: Contoh Bentuk Tabel Data Terpilah Penerima Manfaat Pembangunan dalam Kegiatan Pelayanan Masyarakat

Tabel D.1. Jumlah dan Persentase Siswa menurut Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten....., Tahun

No.	Umur	Jumlah			Persentase			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	< 4 tahun						100%	
2.	4-6 tahun						100%	
3.	7-12 tahun						100%	
4.	13-15 tahun						100%	
5.	16-18 tahun						100%	
6.	19-24 tahun						100%	
7.	>24 tahun						100%	
	Jumlah						100%	

Sumber:

Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L - Persentase P); L= Laki-laki, P= Perempuan

Tabel D.2. Jumlah dan Persentase Siswa menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten....., Tahun

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah			Persentase			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	PAUD							
2.	SD/ sederajat							
3.	SMP/ sederajat							
4.	SM/ sederajat							
5.	Perguruan Tinggi							
	Jumlah							

Sumber:

Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L - Persentase P); L= Laki-laki, P= Perempuan

Tabel D.3. Angka Partisipasi Pendidikan (APS, APM, APK) menurut Umur/Jenjang dan Jenis Kelamin, Kabupaten....., Tahun

No.	Umur/Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Pendidikan			Indeks Paritas Gender
		L	P	L+P	
1.	APS				
	4-6 tahun				
	7-12 tahun				
	13-15 tahun				
	16-18 tahun				
	19-24 tahun				
2.	APM				
	TK/Paud				
	SD/ Sederajat				
	SMP/Sederajat				
	SM/Sederajat				
3.	Perguruan Tinggi*				
	APK				
	TK/Paud				
	SD/ Sederajat				
	SMP/Sederajat				
	SM/Sederajat				
	Perguruan Tinggi*				

Sumber:

Keterangan: *Tidak disarankan pada tingkat kabupaten/kota

Tabel D. 4. Angka Melek Huruf menurut Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten....., Tahun

No.	Umur	Angka Partisipasi Pendidikan			Indeks Paritas Gender
		L	P	L+P	
1.	< 10 tahun				
2.	10-15 tahun				
3.	15-19 tahun				
4.	20-24 tahun				
5.	25-29 tahun				
6.	30-34 tahun				
7.	35-39 tahun				
8.	40-44 tahun				
9.	45-49 tahun				
10.	50-tahun>				
	Jumlah				

Sumber:

Tabel D.5. Jumlah dan Persentase Pasien yang Berobat Jalan menurut Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten....., Tahun

No.	Umur	Jumlah			Persentase			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	0 tahun						100%	
2.	1 tahun						100%	
3.	2 tahun						100%	
4.	3-4 tahun						100%	
5.	5-14 tahun						100%	
6.	15-24 tahun						100%	
7.	25-49 tahun						100%	
8.	50-59 tahun						100%	
9.	60 tahun +						100%	
	Jumlah						100%	

Sumber:

Tabel D.6. Jumlah dan Persentase Pasien menurut Jenis Penyakit dan Jenis Kelamin, Kabupaten....., Tahun

No.	Jenis Penyakit	Jumlah			Persentase			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.							100%	
2.							100%	
3.							100%	
4.							100%	
5.							100%	
6.							100%	
7.							100%	
8.							100%	
9.							100%	
10.							100%	
	Jumlah						100%	

Sumber:

Tabel D.7. Pemanfaat Pelayanan Kesehatan menurut Indikator Cakupan Pelayanan dan Jenis Kelamin, Kabupaten....., Tahun

No.	Indikator Cakupan	Indikator			Indeks Paritas Gender
		L	P	L+P	
1.	Bayi/Balita				
	Angka BBLR				
	Angka kunjungan neonatal				
	Angka imunisasi				
	Prevalensi gizi buruk				
	Angka kunjungan ke posyandu/klinik /Puskesmas/ RS				
2.	Ibu				
	Angka pemeriksaan ibu hamil K4				
	Angka persalinan dg tenaga medis				
	Prevalensi pemakaian alat KB				
3.	Penduduk				
	Angka cakupan pelayanan kesehatan				
	Angka cakupan rawat inap				
	Angka cakupan berobat jalan				

Sumber:

LAMPIRAN E

Lampiran E: Contoh Bentuk Tabel Data Terpilah Penerima Manfaat Pembangunan dalam Kegiatan Pemberdayaan, Penyuluhan dan Sosialisasi kepada Masyarakat serta Koordinasi

Tabel E.1. Jumlah dan Persentase Peserta Kegiatan Pemberdayaan/ Penyuluhan/ Sosialisasi Masyarakat Bidang Pendidikan menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin, Kabupaten....., Tahun

No.	Jenis	Jumlah			Persentase			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	Pemberdayaan A						100%	
2.	Pemberdayaan B						100%	
3.	Pemberdayaan C						100%	
dst							
1.	Penyuluhan A						100%	
2.	Penyuluhan B						100%	
3.	Penyuluhan C						100%	
dst							
1.	Sosialisasi A						100%	
2.	Sosialisasi B						100%	
3.	Sosialisasi C						100%	
dst							
	Jumlah						100%	

Sumber:

Tabel E. 2. Jumlah dan Persentase Peserta Kegiatan Koordinasi Bidang Pendidikan menurut Jenis Koordinasi dan Jenis Kelamin, Kabupaten....., Tahun

No.	Jenis Koordinasi	Jumlah			Persentase			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	Koordinasi A						100%	
2.	Koordinasi B						100%	
3.	Koordinasi C						100%	
dst							
	Jumlah						100%	

Sumber:

Tabel E.3. Jumlah dan Persentase Peserta Kegiatan Pemberdayaan/Penyuluhan/Sosialisasi Masyarakat Bidang Kesehatan menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin, Kabupaten..... , Tahun

No.	Jenis	Jumlah			Persentase			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	Pemberdayaan A						100%	
2.	Pemberdayaan B						100%	
3.	Pemberdayaan C						100%	
dst							
1.	Penyuluhan A						100%	
2.	Penyuluhan B						100%	
3.	Penyuluhan C						100%	
dst							
1.	Sosialisasi A						100%	
2.	Sosialisasi B						100%	
3.	Sosialisasi C						100%	
dst							
	Jumlah						100%	

Sumber:

Tabel E.4. Jumlah dan Persentase Peserta Kegiatan Koordinasi Bidang Kesehatan menurut Jenis Koordinasi dan Jenis Kelamin, Kabupaten..... , Tahun

No.	Jenis Koordinasi	Jumlah			Persentase			Perbedaan Gender
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	Koordinasi A						100%	
2.	Koordinasi B						100%	
3.	Koordinasi C						100%	
dst							
	Jumlah						100%	

Sumber:

LAMPIRAN F

Lampiran F: Kebutuhan Indikator/Data Terpilah Bidang Kesehatan dan Pendidikan pada Beberapa Kabupaten

Tabel F.1. Kebutuhan Indikator/Data Terpilah Bidang Kesehatan dan Pendidikan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

Kebutuhan Indikator/Data Terpilah Bidang Kesehatan dan Pendidikan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (Berdasarkan RKPD Kabupaten 2013)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program	Data Terpilah	
			Utama	Tambahan
KESEHATAN				
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tercukupinya kebutuhan obat dan alat kesehatan		
2	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatkan sarana prasarana pelayanan rumah sakit	-	- Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit responsif gender
3	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Terkendalinya peredaran makanan tidak sehat di masyarakat	-	-
4	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terwujudnya peningkatan pengembangan jenis layanan di rumah sakit	- Jumlah tenaga medis (L/P) - Jumlah tenaga kesehatan non medis (L/P)	-
		Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana prasarana dan peralatan di rumah sakit	-	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat teknis/fungsional/profesi (L/P)

			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anak yang mendapatkan vitamin A (L/P) - Jumlah anak yang mendapat imunisasi lengkap (L/P) - Persentase persalinan yang ditolong tenaga terlatih, - Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (L/P) - Jumlah bumil yang mendapat makanan tambahan - Jumlah tenaga sanitasi (L/P) - Jumlah petugas kebersihan (L/P) - Jumlah petugas kebersihan di institusi pelayanan kesehatan (L/P) 	-
			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kasus kematian ibu, - Jumlah kasus kematian bayi (L/P) - Jumlah kasus kematian balita (L/P) - Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan (L/P) - Cakupan K4, - Cakupan KN2 (L/P) - Persentase ibu hamil yang mendapat pil Fe, - Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga terlatih, - Persentase ibu hamil dengan anemia 	-
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;</p> <p>Meningkatnya kualitas sanitasi tempat-tempat umum dan institusi pelayanan kesehatan;</p> <p>Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak</p>		

6	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Terkendalinya peredaran obat, makanan dan kosmetik di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tenaga sanitasi (L/P) - Jumlah tenaga gizi (L/P) - Jumlah peserta penyuluhan tentang makanan bergizi di posyandu (L/P) 	
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah keluarga dengan kepala keluarga (L/P) yang menjalankan PHBS - Jumlah peserta penyuluhan masyarakat tentang pola hidup sehat (L/P) - Jumlah tenaga penyuluh kesehatan (L/P) 	-
8	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya status gizi masyarakat terutama ibu hamil dan balita	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase bayi BBLR menurut (L/P) - Persentase bayi BGM - Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif (L/P) - Persentase balita mendapat vitamin A (L/P) - Jumlah ibu hamil yang mengunjungi posyandu 	-
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi gizi masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jenis data kesehatan yang sudah dipilah antara laki-laki dan perempuan

9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Mewujudkan tatanan sehat di wilayah yang menjadi lokasi pengembangan kawasan sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta sosialisasi pengembangan lingkungan yang sehat (L/P) - Jumlah partisipan pelaksanaan Jumat (atau hari lain) bersih (P/L) - Jumlah keluarga dengan kepala keluarga (L/P) yang mengelola sampah. 	-
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terkendalnya penyebaran penyakit menular	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kasus TB (L/P) - Jumlah BTA diobati (L/P) - Jumlah BTA diobati yang sembuh (L/P) - Jumlah kasus HIV (L/P) - Jumlah kasus AIDS (L/P) - Jumlah kasus infeksi menular seksual lainnya (L/P) - Jumlah kasus kematian akibat AIDS (L/P) - Jumlah kasus kusta (L/P) - Jumlah kasus kematian akibat kusta (L/P) - Jumlah penderita kusta ditangani sembuh (L/P) 	-
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terkendalnya vektor penyebaran penyakit menular	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta sosialisasi tentang pencegahan penyakit menular (L/P) 	-
		Terukurnya besaran hasil kinerja pelayanan yang diselenggarakan puskesmas	-	-

12	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & jaringannya yang memadai	-	
13	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & jaringannya yang memadai	-	-Jumlah Puskesmas dan Pustu yang sudah responsif gender

PENDIDIKAN

1	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya pembangunan gedung sekolah		- Jumlah peserta sosialisasi kepada masyarakat terhadap gedung sekolah yang akan dibangun (L/P)
		Terselenggaranya pendidikan anak usia dini di wilayah Kabupaten Malang	- Partisipasi anak usia 4-6 tahun pada TK (L/P) - Partisipasi anak usia 3-5 tahun mengikuti PAUD (L/P)	-Jumlah tenaga kependidikan PAUD (L/P)
		Terlayannya pendidikan anak usia dini	-Jumlah dan persentase tenaga kependidikan PAUD (L/P) -Jumlah dan persentase tenaga guru PAUD (L/P)	-

2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	<p>Terselenggaranya pendidikan dasar 9 tahun</p> <p>Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana sekolah</p> <p>Terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah</p> <p>Terselenggaranya paket A setara SD;</p> <p>Terselenggaranya pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - APS 7-12 tahun (L/P) - APK SD (L/P) - APM SD (L/P) - APS 13-15 tahun (L/P) - APK SMP menurut jenis kelamin, - APM SMP menurut jenis kelamin, Angka Partisipasi Paket B (L/P) - Jumlah guru SD (L/P) - Jumlah guru SMP (L/P) - Jumlah guru bantu SD (L/P) - Jumlah guru bantu SMP (L/P) 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sekolah yang memiliki toilet untuk siswa (L/P) - Jumlah sekolah yang memiliki toilet untuk guru (L/P) <p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah siswa yang berprestasi di bidang pendidikan menurut bidang ilmu (L/P) - Jumlah siswa yang memiliki keterampilan menurut jenis keterampilan (L/P) - Jumlah siswa yang mengikuti perlombaan ketrampilan/pertandingan tingkat provinsi menurut jenis (L/P)
---	------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				-Jumlah siswa yang mengikuti perlombaan ketrampilan/ pertandingan tingkat nasional menurut jenis (L/P)
	Meningkatnya mutu pendidikan		<ul style="list-style-type: none"> -Jumlah siswa kelas 6 menurut nilai UN SD (L/P) -Jumlah siswa kelas 9 menurut nilai UN SMP (L/P) -Nilai UN SMA menurut jurusan (L/P) 	
	Terselenggaranya pendidikan jenjang SMA/SMK di wilayah Kabupaten Malang		<ul style="list-style-type: none"> -APS 16-18 tahun (L/P) -APK SMA (L/P) -APM SMA (L/P) -Jumlah guru menurut jurusan (L/P) -Jumlah guru bantu SMA menurut jurusan (L/P) 	
3	Program Pendidikan Menengah	Tercapainya perbandingan jumlah sekolah dengan kebutuhan		
		Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup	<ul style="list-style-type: none"> -Jumlah siswa lembaga pendidikan non-formal menurut jenis kecakapan hidup (L/P) 	-
4	Program Pendidikan Non-Formal	Terlaksananya publikasi dan sosialisasi pendidikan nonformal	<ul style="list-style-type: none"> -Jumlah peserta sosialisasi pendidikan nonformal (L/P) 	-

5	Program Pendidikan Luar Biasa	Terpenuhiya akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus	<ul style="list-style-type: none"> - APK SD-LB menurut jenis kelamin - APM SD-LB (L/P) - APK SMP-LB (L/P) - APM SMP-LB (L/P) - APK SMA-LB (L/P) - APM SMA-LB (L/P) 	-
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya jumlah pendidik yang memenuhi standar kualifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah guru sertifikasi (L/P) - Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pendidik (L/P) 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah guru yang membuat karya ilmiah (L/P) - Jumlah guru berprestasi/ teladan (L/P)
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tersedianya data sebagai informasi dan bahan perencanaan untuk bahan pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah guru yang mengikuti pendidikan manajemen sekolah (L/P) - Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan manajemen sekolah (L/P) - Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan manajemen sekolah (L/P) 	-
8	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat baca masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengunjung perpustakaan (L/P) - Jumlah orang yang meminjam buku perpustakaan (L/P) - Jumlah pustakawan (L/P) 	-

Sumber: RKPD Kabupaten Malang 2013

Tabel F.2. Kebutuhan Indikator/Data Terpilah Bidang Kesehatan dan Pendidikan Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kebutuhan Indikator/Data Terpilah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB (Berbasis RKPD kabupaten 2013)				
No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program	Data Terpilah	
			Utama	Tambahan
KESEHATAN				
Terwujudnya Masyarakat Sehat				
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Program	Utama	Tambahan
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terselenggaranya pelayanan pengobatan yang maksimal bagi maksimal	-	
2	Program Upaya kesehatan Masyarakat	Program	Utama	Tambahan
	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas dan Jaringannya	Terselenggaranya pelayanan kesehatan penduduk miskin	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tenaga bertugas membantu pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin - Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan pengobatan gratis(P/L) 	-
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tenaga kesehatan masyarakat - Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan pengobatan (P/L) - Jumlah petugas kesehatan P/L) 	-

	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Terselenggaranya pelayanan yang optimal bagi penanggulangan masalah kesehatan	- Jumlah penyuluh kesehatan	-
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan			
	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	Meningkatnya kesadaran masyarakat di bidang obat dan makanan	- Jumlah peserta sosialisasi tentang obat dan makanan (P/L)	-
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat	- Jumlah keluarga yang menjalankan PHBS (Kepala Keluarga P dan L)	-
	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat	- Jumlah peserta penyuluhan masyarakat tentang pola hidup sehat (P/L) - Jumlah perokok (P/L)	-
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam penanganan masalah gizi buruk	- Jumlah kader kesehatan (P/L) - Jumlah petugas lapangan kesehatan (P/L) - Jumlah anggota posyandu (P/L)	-
	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Terselenggaranya pelayanan masyarakat dan perbaikan gizi	- Persentase balita gizi buruk (P/L) - Jumlah anak yang mendapat vitamin A (P/L) - Persentase anak bergizi baik (P/L) - Persentase anak yang mendapat imunisasi lengkap (P/L)	-

				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan - Persentase balita kurang gizi (P/L) - Persentase ibu hamil dengan anemia - Angka kesakitan akibat kekurangan vitamin menurut jenis penyakit (P/L) - Jumlah penderita GAKY (P/L) - Jumlah penderita anemia (P/L) - Jumlah penderita penyakit akibat kekurangan zat mikro (P/L) 	
<p>Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Zat Gizi Mikro lainnya</p>	<p>Tercapainya penurunan jumlah kasus kurang gizi di masyarakat</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta penyuluhan tentang makanan bergizi di posyandu (P/L) 		
<p>Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi</p>	<p>Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang bergizi</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah petugas monev (P/L) 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase data-data kesehatan yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan 	
<p>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</p>	<p>Terlaksananya kegiatan program dengan baik</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Angka Kematian Ibu - Cakupan K4 - Cakupan KN2 - Persentase ibu hamil yang mendapat pil Fe - Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga terlatih - Persentase ibu hamil dengan anemia - Jumlah kasus kematian bayi (L/P) 		
<p>Pemberdayaan Masyarakat dalam Gerakan Sayang Ibu dan Anak (GSI-A)</p>	<p>Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Gerakan Sayang Ibu dan Anak (GSI-A)</p>				

				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kasus kematian balita (L/P) - Balita (L/P) - Cakupan pelayanan kesehatan anak (L/P) 	
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				
	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Terciptanya pengembangan lingkungan yang sehat		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta sosialisasi pengembangan lingkungan yang sehat - Jumlah partisipan pelaksanaan Jumat (atau hari lain) bersih ((P/L) - Jumlah warga yang membuang sampah di sungai (P/L) - Jumlah tenaga kesehatan lingkungan 	
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terciptanya pencegahan penyakit menular secara dini		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta sosialisasi terhadap penyakit menular 	
	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	Terciptanya pencegahan penularan penyakit menular secara dini		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengidap penyakit menular menurut jenis penyakit (P/L) - Jumlah mortalitas penyakit menular (P/L) - Jumlah orang yang sembuh dari penyakit menular (P/L) 	
	Peningkatan Imunisasi	Meningkatnya kekebalan tubuh bagi bayi yang diimunisasi		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan persentase balita yang diimunisasi menurut jenis imunisasi (P/L) 	

					– Jumlah peserta rapat koordinasi penyusunan standar pelayanan kesehatan (P/L)
	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Tersedianya standar pelayanan kesehatan yang optimal		– Jumlah peserta sosialisasi tentang standar pelayanan kesehatan (P/L)	–
	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan		– Jumlah dan persentase data dasar standar pelayanan yang sudah terpilih antara laki-laki dan perempuan – Jumlah operator pendataan (P/L)	–
	Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan	Tersedianya standar analisa belanja pelayanan kesehatan		–	–
9	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya				
	Pembangunan Puskesmas (Relokasi Puskesmas Kayangan dan Pemenang, Pembangunan Pustu Mumbul Sari Kec. Bayan dan Pustu Pendua Kec. Kayangan	Meningkatnya sarana prasarana pelayanan kesehatan	– Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas dan Pustu yang sudah memenuhi kriteria responif gender menurut jenis sarana dan prasarana kesehatan	–	–
	Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap (Puskesmas Kayangan dan Pemenang)	Tersedianya puskesmas perawatan	– Jumlah pasien rawat inap (P/L) – Jumlah tenaga medis puskesmas rawat inap (P/L)	–	–
10	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata				
	Pembangunan Rumah Sakit (Tahap III)	Meningkatnya sarana prasarana pelayanan kesehatan	– Jumlah peserta sosialisasi pembangunan rumah sakit (P/L)	–	–
	Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit	Tersedianya obat-obatan rumah sakit	–	–	–

	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	Tersedianya bahan-bahan logistik rumah sakit	-	-
	Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	Terwujudnya tertib administrasi dan surat menyurat rumah sakit	-	-
11	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VIP, Kelas I, II, dan III)	Terwujudnya ruang rawat inap rumah sakit (VIP, Kelas I, II, dan III) yang memadai	-	- Jumlah dan persentase ruang rawat inap menurut kelas yang sudah responsif terhadap keperluan lak-laki dan perempuan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala UGD	Terwujudnya ruang UGD yang memadai	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Terwujudnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit yang memenuhi syarat	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Obat/Apotik	Terwujudnya gedung obat/apotik yang memenuhi syarat	-	-
12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			
	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Terciptanya peningkatan pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia	- Jumlah pasien lansia yang mendapatkan pelayanan (P/L) - Jumlah pasien lansia yang mendapatkan pengurangan biaya pengobatan (P/L) - Jumlah lansia memiliki Jamkesmas (P/L)	-
13	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			
			- Angka Kematian Ibu - Cakupan K4	

			<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan KNZ - persentase ibu hamil yang mendapat pil Fe - Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga terlatih - persentase ibu hamil dengan anemia 	
Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Terciptanya peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang kesehatan ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah ibu hamil yang mengikuti kegiatan di Posyandu 		
Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan anak bagi keluarga kurang mampu	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih - Jumlah dan persentase persalinan dari keluarga yang kurang mampu - Mortalitas ibu hamil dan melahirkan - Jumlah ibu hamil dari keluarga yang kurang mampu - Jumlah balita dari keluarga kurang mampu yang lahir dengan berat badan rendah (P/L) - Jumlah bayi yang lahir dari keluarga kurang mampu yang berkebutuhan khusus (P/L) - Angka Kematian Bayi (P/L) 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah petugas jaminan kesehatan masyarakat yang menangani persalinan dari keluarga yang kurang mampu 	

PENDIDIKAN			
Terwujudnya Masyarakat Cerdas Dan Terampil			
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun		
	<p>APM SD (P/L) APS 7-12 tahun (P/L) APK SD (P/L) Rasio P/L APM SD Proporsi Kelas 1 yang tamat SD (P/L) Angka Melanjutkan SD ke SMP (P/L) Angka Putus Sekolah (P/L) APM SMP (P/L) APS 13-15 tahun, (P/L) APK SMP (P/L) Rasio P/L APM SMP (P/L) Angka melanjutkan SMP ke SMA (P/L)</p>		-
Pembangunan Gedung Sekolah	Tersedianya tempat kerja		-
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Tersedianya ruang kelas baru		-
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tersedianya ruang perpustakaan di sekolah		-
			-

	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS pada satuan Pendidikan Dasar)	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan MGMP dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	-Jumlah guru yang mendapat pembinaan MBS (P/L)	-
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung	-	-Jumlah guru yang sudah memiliki rumah sendiri (P/L) -Jumlah guru dan tenaga pendidikan yang menempati rumah dinas (P/L) -Jumlah guru yang belum menempati rumah dinas (P/L)
2	Program Pendidikan Menengah			
			-APM SMA (P/L) -APS usia 16-18 tahun (P/L) -AP SMA (P/L) -Angka melanjutkan dari SMA ke Perguruan Tinggi (P/L) -Angka Putus Sekolah SMA (P/L)	-
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terselenggaranya pembangunan ruang kelas baru		-
	Pengadaan Meubelair Sekolah	Terlaksananya pengadaan meubelair sekolah		-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Terselenggaranya rehab sedang/berat sarana bangunan sekolah		-
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Optimalnya tenaga pendidik	-Jumlah guru peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik (P/L)	-

Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Terselenggaranya ujian Paket C setara SMA	-Jumlah peserta ujian Paket C (P/L) -Jumlah siswa yang lulus ujian Paket C (P/L)	-
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN Siswa SMA	Terselenggaranya lomba kompetensi siswa dan OSN siswa	-Jumlah peserta perlombaan kompetensi siswa tingkat provinsi menurut jenis (P/L) -Jumlah peserta perlombaan kompetensi siswa tingkat nasional menurut jenis (P/L)	-Jumlah LKS yang sudah dikaji dan dilakukan penilaian terhadap kepekaan gendernya -Jumlah LKS yang sudah responsif gender
Operasional SMA dan SMK	Lancarnya kegiatan operasional sekolah		-
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah		-
Penembokan Sekolah	Terlaksananya penembokan sekolah		-
Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah	Terlaksananya pembangunan ruang guru dan Kepala Sekolah		-
Pembangunan Ruang Ibadah	Terlaksananya pembangunan ruang ibadah		-
3	Program Pendidikan Non Formal (PLS)		
Pemberdayaan Tenaga Pendidikan Non Formal	Terselenggaranya diklat tenaga pendidik non formal	-	-Jumlah peserta diklat tenaga pendidik non-formal (P/L) -Jumlah tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan pendidik non-formal (P/L)
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Terlaksananya diklat/kursus kelembagaan	-Jumlah peserta diklat kursus kelembagaan (P/L)	-
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Terlaksananya pemberantasan buta aksara di wilayah kecamatan	-Jumlah tenaga yang dilatih (P/L) -Angka Melek Huruf penduduk (P/L)	-Jumlah peserta kelas membaca (P/L)

	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	–Jumlah pemuda peserta pelatihan kewirausahaan (P/L) –Jumlah tenaga pengajar pada pelatihan kewirausahaan (P/L)	–
	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Terlaksananya publikasi dan sosialisasi tentang pendidikan non-formal	–Jumlah peserta sosialisasi tentang pendidikan nonformal (P/L)	–
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi	–Jumlah tenaga yang digunakan untuk melaksanakan evaluasi (P/L)	–
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini			
	Pengadaan Alat Peraga dan Praktek Siswa	Tersedianya alat peraga dan praktek siswa	–	–
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan	Terselenggaranya diklat kompetensi pendidik	–Jumlah peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik (P/L) –Jumlah tenaga pengajar pada pelatihan kompetensi tenaga pendidik (P/L)	–
5	Program Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan			
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan	Terselenggaranya pelaksanaan sertifikasi guru	–Jumlah guru (P/L)	–
	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan MGMP	Terselenggaranya kegiatan KKG dan MGMP	–Jumlah guru yang memiliki sertifikasi pendidikan (P/L) –Jumlah anggota KKG menurut kelompok (P/L)	–

	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terselenggaranya peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan	- Jumlah peserta pelatihan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik (P/L)	-
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
	Pembinaan Dewan Pendidikan	Terjalinnnya komitmen yang baik antara pemerintah dan masyarakat peduli pendidikan	- Jumlah anggota dewan pendidikan (P/L)	-
	Penerapan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan	Tersedianya data pendidikan	- Jumlah jenis data yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan	-
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi	- Jumlah tenaga monitoring dan evaluasi (P/L)	-
	Pengadaan Raport, Ijazah STTB, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	Pelaksanaan pengadaan raport ijazah STTB SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	-	-
	Pengadaan Bahan LJK UNAS SLB, SMP/MTs, SMA/MA, SMK	Pelaksanaan pengadaan bahan LJK UNAS SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	-	-
	Pembinaan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS)	Pelaksanaan pembinaan pengawas di sekolah	- Jumlah pengawas sekolah (P/L) - Jumlah peserta musyawarah kerja pengawas sekolah (P/L)	-

Sumber: RKPD Kabupaten Lombok Utara 2013

Tabel F.3. Kebutuhan Indikator/Data Terpilah Bidang Kesehatan dan Pendidikan Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kebutuhan Indikator/Data Terpilah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT (Berbasis RKPD Kabupaten 2013)					
No.	Program	Sasaran Program	Indikator Data Terpilah		
			Utama	Tambahan	
1	2	4	5	6	
KESEHATAN					
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan	-	-	
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jamkesmas	- Jumlah penduduk yang mendapatkan perlindungan kesehatan dari Jamkesmas (P/L)	-	
		Jamkesda	- Jumlah penduduk yang mendapatkan perlindungan kesehatan dari Jamkesda (P/L)	-	
		Jampersal	- Jumlah penduduk yang mendapatkan perlindungan kesehatan dari Jampersal (P/L)	-	
3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Usaha kesehatan berbasis masyarakat	- Jumlah peserta sosialisasi pengembangan lingkungan yang sehat (P/L) - Jumlah partisipan pelaksanaan Jumat (atau hari lain) bersih (P/L) - Jumlah warga yang membuang sampah di sungai (P/L)	-	

4	<p>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p>	<p>Angka Gizi Buruk</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase bayi BBLR (P/L) - Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif (P/L) <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan K4 - Cakupan KN2 (P/L) - Persentase ibu hamil yang mendapat pil Fe - Persentase ibu hamil dengan anemia - Prevalensi balita kurang gizi (P/L) - Jumlah anak yang mendapatkan vitamin A (P/L) - Persentase anak yang mendapat imunisasi lengkap (P/L) - Persentase anak yang mendapat imunisasi (P/L) - Persentase persalinan yang ditolong tenaga terlatih - Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (P/L) - Jumlah ibu hamil yang mendapat makanan tambahan (P/L) 	-
5	<p>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</p>	<p>Jumlah rumah sehat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah petugas kesehatan lingkungan (P/L) - Jumlah petugas kebersihan (P/L) - Jumlah keluarga yang menjalankan PHBS (P/L) 	-

			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta penyuluhan masyarakat tentang pola hidup sehat (P/L) - Jumlah tenaga penyuluh kesehatan (P/L) - Jumlah perokok dalam keluarga (P/L) 	
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah penderita penyakit menular	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengidap penyakit menular menurut jenis penyakit (P/L) - Jumlah peserta sosialisasi tentang pencegahan penyakit menular (P/L) 	-
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah mortalitas penyakit menular (P/L) - Jumlah orang yang sembuh dari penyakit menular (P/L) 	
7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		-	- Jumlah jenis data kesehatan yang sudah dipilah antara laki-laki dan perempuan
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin - Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan pengobatan gratis (P/L) 	-
		Rasio tenaga medis per-satuan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tenaga medis (P/L) - Jumlah tenaga kesehatan non medis (P/L) - Jumlah penyuluh kesehatan (P/L) 	-

8	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per-satuan penduduk Cakupan Puskesmas Cakupan Puskesmas Pembantu	- - -				
9	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dan Jaringannya	Rasio Rumah Sakit per-satuan penduduk Rasio dokter per-satuan penduduk Tersedianya Rumah Sakit Adonara	- - -				
10	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Jiwa		-				
11	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kemitraan di bidang kesehatan	-				
12	Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Bayi	- - -				

		AKABA	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kasus kematian balita (P/L) - Persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap (P/L) - Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (P/L) - Persentase balita yang diimunisasi menurut jenis imunisasi (P/L) - Cakupan pelayanan kesehatan balita (P/L) 	-
13	Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase bayi BBLR menurut (P/L) - Jumlah dan persentase bayi lahir hidup (P/L) - Jumlah kasus kematian ibu, - Cakupan pelayanan kesehatan anak (P/L) - Jumlah ibu hamil yang mendapat makanan tambahan (P/L) - Cakupan K4 - Cakupan KN2 (P/L) - Persentase ibu hamil yang mendapat pil Fe - Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis terlatih - Persentase ibu hamil dengan anemia 	-

PENDIDIKAN					
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD yang mendapat bantuan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah siswa PAUD dari keluarga miskin (P/L) - Jumlah siswa PAUD penerima bantuan (P/L) 		
			<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi anak usia 4-6 tahun pada TK (L/P) - Partisipasi anak usia 3-5 tahun mengikuti PAUD (L/P) - Jumlah tenaga kependidikan PAUD (L/P) - Jumlah pendidik PAUD (P/L) 		
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Buta Huruf	<ul style="list-style-type: none"> - Angka Melek Huruf (P/L) usia 15-24 tahun - Angka Melek Huruf (P/L) usia 15-44 tahun 		
		Tingkat kelulusan SD/MI	<ul style="list-style-type: none"> - Angka Putus Sekolah SD (P/L) - Angka kelulusan SD (P/L) 		
		Tingkat kelulusan SMP	<ul style="list-style-type: none"> - Angka Putus Sekolah SMP (P/L) - Angka kelulusan SMP (P/L) 		
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	<ul style="list-style-type: none"> - APK SD (P/L) 		
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	<ul style="list-style-type: none"> - APK SMP (P/L) 		
		Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	<ul style="list-style-type: none"> - APM SD (P/L) - APS 7-12 tahun (P/L) - Proporsi siswa Kelas 1 yang tamat SD (P/L) - Jumlah siswa kejar Paket A (P/L) 		
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	<ul style="list-style-type: none"> - APM SMP (P/L) - APS 13-15 tahun, (P/L) - Rasio P/L APM SMP (P/L) - Jumlah siswa kejar Paket B (P/L) 		

		Angka melanjutkan Ke SMP	– Angka melanjutkan SD ke SMP (P/L)	–
		Angka melanjutkan Ke SMA	– Angka melanjutkan SMP ke SMA (P/L)	–
		Rasio Siswa SMP/MTs/Kelas	–	–
		Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik	–	–
		Persentase Ruang Kelas SD/ MI/ SD-LB Kondisi Baik	–	–
		Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi Baik	–	–
		Tingkat kelulusan SMU	– Angka kelulusan SMA (P/L)	–
		Tingkat kelulusan SMK	– Angka kelulusan SMK (P/L)	–
		APK SMA/SMK	– APK SMA (P/L)	–
		APM SMA/SMK	– APM SMA (P/L) – APS usia 16-18 tahun (P/L) – Angka melanjutkan dari SMA ke Perguruan Tinggi (P/L) – Angka Putus Sekolah SMA (P/L) – Jumlah siswa kejar Paket C (P/L)	–
3	Program Pendidikan Menengah	Rasio Siswa SMA/SMK/MA/kelas	–	–

4	Program Pendidikan Non-Formal	Jumlah lembaga pendidikan non-formal yang menerima bantuan	Jumlah peserta pendidikan non-formal (L/P)	-
5	Program Pendidikan Luar Biasa	Jumlah Sekolah Luar Biasa	-Jumlah siswa SD-LB (P/L) -Jumlah siswa SMP-LB (P/L) -Jumlah siswa SMA-LB (P/L)	-
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4	-Jumlah guru menurut tingkat pendidikan (P/L) -Jumlah guru yang memiliki sertifikasi pendidikan (P/L)	-Jumlah guru yang membuat karya ilmiah (L/P) -Jumlah guru berprestasi/teladan (L/P)
7	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah	-Jumlah pengunjung perpustakaan (L/P) -Jumlah orang yang meminjam buku perpustakaan (L/P) -Jumlah pustakawan (L/P)	-
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rasio Siswa SD/MI/Guru	-	-
		Rasio Siswa SMP/MTs/Guru	-	-
		Rasio Siswa SMA/SMK/MA/Guru	-	-
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rasio Murid SD/MI/Kelas	-	-
		Rasio Murid SMP/MTs/Kelas	-	-
		Rasio Murid SMA/SMK/MA/kelas	-	-

Sumber: RKPD Kabupaten Flores Timur 2013

LAMPIRAN G

Penyelenggaraan Studi Kualitatif

Data tentang peran, kondisi dan status serta karakter lainnya dari penduduk yang terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender dalam masyarakat. Namun demikian, informasi ini perlu dilengkapi dengan data kualitatif yang dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya kesenjangan pada bidang yang diamati, baik dari sudut internal maupun eksternal lembaga yang menangani. Dengan mengetahui faktor penyebab serta bagaimana cara mengurangnya atau menghilangkannya, maka tindakan intervensi untuk mempersempit atau menghilangkan jurang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dapat dilakukan. Masalahnya data kualitatif ini tidak selalu tersedia, sehingga perlu upaya untuk memperolehnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, berikut disajikan tata cara penyelenggaraan pengumpulan data kualitatif secara cepat dan sederhana. Metode yang biasa digunakan adalah *Rapid Assessment Procedure* (RAP) yang dapat dilakukan dengan teknik *in-depth interview* untuk diterapkan pada perorangan, *Focus Group Discussion* (FGD) untuk kelompok dan/atau observasi yang dapat diterapkan pada keduanya.

G.1. Rapid Assessment Procedure (RAP)

Disamping sebagai pelengkap data atau pengisi kekosongan data kuantitatif, informasi yang diperoleh dari RAP dapat digunakan sebagai cara untuk memahami hasil penelitian kuantitatif:

- a. Menerangkan bagaimana isu terjadi
- b. Memahami penyebab suatu kesenjangan
- c. Menjaring informasi tentang faktor yang mempengaruhi perubahan sikap, sehingga kesenjangan dapat dipersempit atau dihilangkan

Karena sifatnya yang harus cepat dan efisien, maka RAP tidak dapat meliputi responden atau informan yang banyak dan seperti umumnya studi kuantitatif, tetapi cukup memilih informan secara *purposive* yang sesuai dengan tujuan studi. Faktor *representativeness* untuk masyarakat luas, sementara ini, tidak menjadi hal yang penting. Oleh karena itu hasil RAP hanya menunjukkan kecenderungan dan tidak dapat digeneralisasi pada populasi yang besar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada RAP antara lain wawancara pada sekelompok orang secara mendalam (*In-Depth Interview/IDI*) secara satu per satu atau per-orangan dan/atau *Focus Group Discussion* (FGD) secara berkelompok. Faktor utama yang menentukan besarnya sampel yang dipilih adalah ketersediaan dana dan waktu untuk melakukan pengumpulan data.

Dalam menemukannya isu gender yang terdapat dalam masyarakat secara cepat, bila tidak mempunyai data kuantitatif yang dapat diandalkan, dianjurkan untuk menggali informasi dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) daripada *In-Depth Interview* (IDI).

G.2. Focus Group Discussion (FGD)

FGD adalah salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi secara cepat, tepatnya tentang kapan suatu fenomena terjadi, apa sebabnya dan bagaimana proses suatu permasalahan yang sangat spesifik, melalui diskusi kelompok. Banyak peneliti menegaskan FGD bukan merupakan suatu deretan wawancara/tanya jawab terhadap banyak orang secara individu dan bukan suatu jenis rapat yang menjurus pada kesepakatan, tetapi suatu diskusi yang terfokus pada isu atau permasalahan tertentu saja.

FGD dipimpin oleh seorang moderator/fasilitator yang mengemukakan adanya isu gender pada suatu bidang pembangunan dan kemudian meminta semua peserta secara bergantian menanggapi. Untuk melaksanakan tugasnya, moderator/fasilitator dibantu oleh seorang sekretaris yang tugasnya berkaitan dengan kegiatan mencatat dan merekam diskusi, mengingatkan moderator/fasilitator tentang butir diskusi yang perlu diangkat, menjaga waktu diskusi baik yang menyangkut penggunaan waktu oleh masing-masing responden maupun diskusi secara keseluruhan, serta melengkapi proses pelaksanaan FGD sebelum dianalisis oleh tim.

Peserta FGD sebaiknya mempunyai pengetahuan tentang topik diskusi tetapi hindarkan kemungkinan adanya peserta yang mendominasi diskusi. Dalam banyak hal dominasi ini disebabkan karena hadirnya satu atau dua orang yang merasa statusnya lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar semua peserta dapat memberikan respons dalam diskusi secara bebas tanpa merasa tertekan. Dalam hal ini moderator/fasilitator mempunyai peran yang besar untuk mengaturnya. Respons yang diberikan oleh informan tidak boleh menyimpang dari isu gender, walau demikian informan boleh mengemukakan pendapatnya tentang respons yang diberikan oleh informan yang sebelumnya berbicara. Perlu dicatat, undangan kepada laki-laki dan perempuan sebagai peserta dibutuhkan agar diskusi tidak bias gender.

Beberapa butir persiapan dan pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian diusulkan peneliti, diantara butir-butir seperti yang ditekankan perlunya oleh Irwanto (1998):

a. Persiapan FGD

i. Daftar Peserta

Daftar ini sangat bermanfaat terutama untuk menyusun analisis. Para peserta dapat mengisi sendiri daftar ini atau dengan pertolongan tim penyelenggara. Keterangan yang perlu ditanyakan dalam daftar ini antara lain jenis kelamin, instansi serta pengalaman lapangan peserta FGD yang kira-kira dapat dikaitkan dengan respons mereka.

ii. Alat Tulis dan Alat Pererekam

Alat tulis tidak saja dibutuhkan oleh pembantu moderator tetapi juga dibutuhkan oleh peserta untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dan untuk melengkapi respons peserta FGD bila waktu yang dibutuhkan tidak mencukupi. Sementara itu alat perekam hanya disediakan untuk moderator agar analisis tidak menyisakan input peserta sebagai bahan analisis.

iii. Penataan Ruang (Diskusi dan *Blocker*)

Ruang diskusi disarankan yang nyaman dengan tempat duduk yang diatur setengah melingkar atau berbentuk huruf U. Tempat duduk peserta diskusi perlu diatur sedemikian rupa sehingga gangguan dari luar dapat ditekan sekecil mungkin. Disamping ruang diskusi diusulkan ada ruang *blocker* yang digunakan sebagai cadangan ruangan kalau ada pejabat atau orang yang berpengaruh datang hanya untuk urusan formalitas dan *ceremonial*, karena kehadirannya dalam diskusi dapat mempengaruhi kebebasan peserta untuk berbicara bebas. Pelaksanaan FGD akan berdampak lebih baik bila proses diskusi tidak terganggu dengan adanya orang selain peserta yang hadir dalam ruangan.

iv. Pengeras Suara

Sarana ini penting bagi kelancaran FGD karena semua peserta dapat mendengar dengan jelas hal-hal yang didiskusikan. Bila waktunya habis sebelum semuanya mendapatkan kesempatan berbicara tentang suatu hal tertentu, respon dapat diserahkan secara tertulis.

v. Makanan Kecil

Disarankan makanan kecil disiapkan dan dihidangkan setelah atau sebelum diskusi, agar perhatian peserta tidak tertuju pada hal lain kecuali permasalahan yang didiskusikan.

b. Pelaksanaan

i. Jumlah Peserta

Berdasarkan pengalaman jumlah peserta dalam FGD sebesar 7-15 orang akan menghasilkan jawaban dengan variasi yang tinggi, bila peserta yang diundang cukup bervariasi.

ii. Ciri-ciri Peserta

Peserta dipilih dari kelompok yang relevan dengan permasalahan yang akan didiskusikan. Variasi latar belakang peserta perlu dijaga agar tidak menimbulkan dominasi pada waktu diskusi.

iii. Peranan Jeda

Waktu istirahat diperlukan bagi para peserta diskusi untuk merenungkan kembali permasalahan yang dilemparkan moderator, serta respon apa yang telah diberikan oleh para peserta FGD dan dirinya sendiri. Bagi moderator dan pembantunya, waktu istirahat ini dapat memberikan peluang bagi mereka untuk menyempurnakan catatan dan menambahkan informasi yang secara non-verbal ditunjukkan.

iv. Komunikasi Moderator-Pencatat Proses.

Pembagian tugas antara moderator dan pembantunya sudah cukup jelas, moderator memimpin diskusi dan pembantu moderator/ fasilitator mencatat diskusi dan mengingatkan moderator/ fasilitator. Walaupun demikian pencatat dapat minta klarifikasi tentang isi diskusi kalau ungkapan dari peserta kurang jelas.

c. Analisis

Cara menganalisis hasil FGD tidak jauh berbeda dengan cara yang biasa ditempuh dalam penelitian kualitatif lainnya. Peneliti yang biasanya bertindak sebagai moderator/ fasilitator perlu memeriksa semua respon yang dikemukakan oleh peserta diskusi. Kemudian pilah respon tersebut menurut latar belakang responden seperti jenis kelamin, pendidikan, karakteristik lingkungan tempat dibesarkan dan etnis. Jangan lupa menabulasikan tanggapan responden, baik berdasarkan tematik subyek maupun berdasarkan latar belakang peserta sebelum menyusun analisis. Laporkan variasi peserta, sikap peserta, variasi respon menurut berbagai karakteristik peserta, dan masalah lain yang timbul pada waktu diskusi yang tidak dapat dipisahkan dari fokus diskusi.

d. Pemanfaatan FGD

FGD dapat digunakan untuk menjangkau adanya isu gender di bidang pendidikan, kesehatan serta sektor lain dalam pembangunan. Agar isu ini terdeteksi dengan baik, FGD perlu diadakan lebih dari sekali, untuk kelompok yang berbeda. Peserta yang diundang sebaiknya laki-laki dan perempuan dari golongan kepangkatan yang hampir setara atau yang mempunyai fungsi yang hampir sama.

LAMPIRAN H

Sistematika Penulisan Profil Data Terpilah Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Daerah dan Rumus-rumus Penting yang Digunakan.

H.1. Sistematika Penulisan Profil Data Terpilah Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Daerah

A. Kata Pengantar

Kata Pengantar buku Profil Data Terpilah di Provinsi/Kabupaten/Kota ditandatangani oleh instansi penyusun dengan tujuan untuk, antara lain:

- a. Memberitahukan kepada pembaca tentang manfaat buku ini
- b. Himbauan untuk memberikan saran perbaikan

B. Kata Sambutan

Kata Sambutan buku Profil Data Terpilah diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditugasi untuk ini. Sambutan berisi antara lain:

- a. Memberitahukan kepada pembaca tentang manfaat buku ini dalam kaitannya dengan PUG
- b. Harapan kepada semua instansi untuk menyediakan data terpilah di bidangnya masing-masing agar perencanaan pembangunan dapat disusun dengan baik untuk meningkatkan kualitas penduduk baik laki-laki maupun perempuan.

C. Bab I: Pendahuluan

Isi Bab I ini adalah:

1. Latar belakang tentang kegunaan serta pentingnya data terpilah
2. Dasar hukum:
 - a. Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang berkaitan dengan instruksi presiden kepada seluruh pimpinan di pusat maupun di daerah untuk mengarusutamakan gender dalam proses manajemen pembangunan.
 - b. Permendagri 67/2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah,
 - c. Permendiknas No 84 tahun 2008: Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.
 - d. Permen PP dan PA Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak,
 - e. Dan seterusnya kalau ada produk hukum lainnya
3. Tujuan penyusunan buku data terpilah

D. Bab II: Situasi Penduduk, Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Bab ini menyajikan gambaran umum tentang situasi penduduk, pendidikan dan kesehatan secara keseluruhan, seperti berikut:

1. Penduduk
 - a. Jumlah dan persentase penduduk L/P/L+P dirinci menurut umur/usia sekolah.
Pengelompokan umurnya (tahun) adalah: 0-4 ; 5-6 ; 7-12; 13-15; 16-18; 19-24; 25 +
 - b. Jumlah dan persentase penduduk L/P/L+P dirinci menurut umur dan siklus hidup.
Pengelompokan umurnya (tahun) adalah: 0 ; 1-2 ; 3-5; 5-14; 15-24; 25-49; 50-59; 60 +
 - c. Jumlah dan persentase penduduk L/P/L+P dirinci menurut kemampuan membaca/ menulis. Pengelompokan umurnya: 0-14; 15-24; 25-44; 45-54; 55+
2. Pendidikan
 - a. Jumlah dan persentase penduduk L/P/L+P dirinci menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan
 - b. Jumlah dan persentase penduduk L/P/L+P dirinci menurut lamanya sekolah
3. Kesehatan
 - a. Angka Harapan Hidup menurut jenis kelamin
 - b. Rata-rata konsumsi energi/kapita/hari

E. Bab III: Data Terpilah Bidang Pendidikan

1. Data Terpilah tentang Pelaku Pembangunan Pendidikan:
 - a. Pelaku Pembangunan Umum, seperti pegawai laki-laki/perempuan/laki-laki+perempuan (L/P/L+P) dirinci menurut umur, masa kerja, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, golongan, eselon, diklat/pim tertinggi yang ditamatkan, jenis jabatan (struktural/ fungsional), kepala sekolah, dan penilik sekolah.
 - b. Pelaku Pembangunan Khusus: guru L/P/L+P dirinci menurut mata ajaran (paling sedikit ada rincian ilmu lunak dan ilmu keras (*soft science dan hard science*)).
2. Pemanfaat Pembangunan Pendidikan pada Tahun Anggaran Terakhir:
 - a. Program/ Kegiatan Peningkatan Kualitas Pegawai, seperti pegawai L/P/L+P dirinci menurut kesertaan dalam tugas belajar, diklat teknis, diklat administrasi dan diklat penjejangan.
 - b. Program Pelayanan/ Pemberdayaan/ Sosialisasi Masyarakat:
 - i. Pelayanan, seperti jumlah dan persentase siswa L/P/L+P dirinci menurut umur, jenjang sekolah, status sekolah, APM, APS, APK, dan pengunjung perpustakaan keliling

- ii. Pemberdayaan, seperti jumlah dan persentase penduduk L/P/L+P dirinci menurut kursus kecakapan hidup, dan kursus buta aksara
 - iii. Sosialisasi, seperti jumlah dan persentase penduduk L/P/L+P dirinci menurut kesertaan dalam sosialisasi gender
 - iv. Koordinasi, seperti peserta rapat koordinasi (L/P/L+P) dalam rangka gerakan orang tua asuh
- c. Pembangunan sarana prasarana (saprass), seperti bangunan gedung sekolah apakah sudah responsif gender.

F. Bab IV: Data Terpilah Bidang Kesehatan

1. Data Terpilah tentang Pelaku Pembangunan Kesehatan:

- a. Pelaku Pembangunan Umum, seperti pegawai laki-laki/perempuan/laki-laki+perempuan (L/P/L+P) dirinci menurut umur, masa kerja, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, golongan, eselon, diklat/pim tertinggi yang ditamatkan, jenis jabatan (struktural/fungsional), dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan.
- b. Pelaku Pembangunan Khusus: dokter L/P/L+P dirinci menurut spesialisasi.

2. Pemanfaat Pembangunan Kesehatan pada Tahun Anggaran Terakhir:

- a. Program/ Kegiatan Peningkatan Kualitas Pegawai, seperti pegawai L/P/L+P dirinci menurut kesertaan dalam tugas belajar, diklat teknis, diklat administrasi dan diklat penjejjangan
- b. Program Pelayanan/ Pemberdayaan/ Sosialisasi Masyarakat:
 - i. Pelayanan, seperti jumlah dan persentase pasien L/P/L+P dirinci menurut umur, jenis penyakit dan pengunjung Puskesmas keliling
 - ii. Pemberdayaan, seperti jumlah dan persentase penduduk L/P/L+P dirinci menurut kesertaan dalam pendidikan kebidanan/ keperawatan milik Pemda
 - iii. Sosialisasi: jumlah & persentase penduduk L/P/L+P dirinci menurut kesertaan dalam sosialisasi penanggulangan penyakit menular, kehamilan/kesehatan reproduksi, gender
 - iv. Koordinasi, seperti peserta rapat koordinasi (L/P/L+P) dalam rangka gerakan Jumat Bersih.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana (saprass), seperti apakah bangunan Poliklinik dan Rumah Sakit sudah responsif gender

F. Bab V: Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan fakta yang ditunjukkan oleh data terpilah bidang pendidikan dan kesehatan, uraikan pada bab ini kesimpulan yang diambil dan apa rekomendasi yang akan diusulkan.

H.2. Rumus-rumus Penting yang Digunakan (Berdasar Urutan Alphabet)

1	<p><i>AB (Angka Bertahan di Kelas 6 SD)</i></p> $AB-6 \text{ tahun} = \frac{\text{Banyaknya siswa pada kelas 6 SD}}{\text{Banyaknya siswa kelas 1 SD, enam tahun yang lalu}} \times 100\%$
2	<p><i>AKB (Angka Kematian Bayi) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per-1000 kelahiran hidup</i></p> $AKB = \frac{\text{Jumlah bayi yang meninggal sebelum usia satu tahun}}{1000 \text{ kelahiran hidup}} \times 100$
3	<p><i>AKI (Angka Kematian Ibu) adalah banyaknya ibu yang meninggal berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan nifas per-100 000 kelahiran hidup</i></p> $AKI = \frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal karena kehamilan, persalinan dan nifas}}{100 \text{ 000 kelahiran hidup}} \times 100$
4	<p><i>AL (Angka Kelulusan)</i></p> $AL = \frac{\text{Banyaknya lulusan}}{\text{Banyaknya siswa tingkat tertinggi}} \times 100\%$
5	<p><i>AM-SMP (Angka Melanjutkan ke SMP)</i></p> $AM-SMP = \frac{\text{Banyaknya siswa baru tingkat 1 SMP}}{\text{Banyaknya lulusan SD}} \times 100\%$
6	<p><i>AMH (Angka Melek Huruf)</i></p> $AMH_{15-24} = \frac{\text{Banyaknya penduduk berusia 15-24 thn yang melek huruf}}{\text{Banyaknya penduduk berusia 15-24 tahun}} \times 100\%$
7	<p><i>Angka Cakupan Pelayanan Kesehatan (Angka Cakupan Nakes)</i></p> $\text{Angka Cakupan Nakes} = \frac{\text{Jumlah klien yang dilayani}}{\text{Populasi klien}} \times 100\%$
8	<p><i>APK-SMP (Angka Partisipasi Kasar)</i></p> $APK-SMP = \frac{\text{Banyaknya siswa SMP}}{\text{Banyaknya penduduk berusia 13-15 tahun}} \times 100\%$
9	<p><i>APM-SD (Angka Partisipasi Murni)</i></p> $APM-SD = \frac{\text{Banyaknya siswa SD berusia 7-12 tahun}}{\text{Banyaknya penduduk berusia 7-12 tahun}} \times 100\%$
10	<p><i>APS (Angka Partisipasi Sekolah)</i></p> $APS_{4-6} = \frac{\text{Banyaknya anak berusia 4-6 tahun yang sekolah}}{\text{Banyaknya penduduk berusia 4-6 tahun}} \times 100\%$

11	<p><i>APtS-SD (Angka Putus Sekolah)</i></p> $\text{APtS-SD} = \frac{\text{Banyaknya siswa SD yang putus sekolah}}{\text{Banyaknya siswa SD seluruhnya}} \times 100\%$
12	<p><i>APtS (Kumulatif Angka Putus Sekolah Penduduk Kelompok Usia)</i></p> $\text{APtS}_{7-12} = \frac{\text{Banyaknya penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak sekolah}}{\text{Banyaknya penduduk berusia 7-12 tahun}} \times 100\%$
13	<p><i>Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)</i></p> $\text{BBLR} = \frac{\text{Jumlah bayi lahir hidup dengan berat badan kurang dari 2500 gr}}{\text{Jumlah bayi lahir hidup}} \times 100\%$
14	<p><i>Indeks Paritas Gender Melek Huruf</i></p> $\text{Rasio -AMH} = \frac{\text{AMH perempuan}}{\text{AMH laki-laki}} \times 100\%$
15	<p><i>Indeks Disparitas Gender atau Rasio APM-SM</i></p> $\text{Rasio APM-SM} = \frac{\text{APM-SM perempuan}}{\text{APM-SM laki-laki}} \times 100\%$
16	<p><i>Kurang Energi Protein (KEP)</i></p> $\text{KEP} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang mengkonsumsi energi kurang dari 1800 kkal}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
17	<p><i>Prevalensi Penggunaan Alat KB</i></p> $\text{Prevalensi Penggunaan Alat KB} = \frac{\text{Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
18	<p><i>Proporsi Persalinan dengan Pertolongan Tenaga Medis yang Terlatih (Disingkat Persalinan dengan Tenaga Medis)</i></p> $\text{Proporsi persalinan dgn tenaga medis} = \frac{\text{Jumlah persalinan dengan pertolongan tenaga medis yang terlatih}}{\text{Jumlah ibu bersalin}} \times 100\%$
19	<p><i>Status Gizi Balita</i></p> <p>Status gizi balita diukur dengan anthropometri, yaitu berat badan menurut umur. Status gizi dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan Z-score pada standard NCHS-WHO, berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gizi Lebih (Z-score $\geq +2$), Gizi Normal ($-2 < \text{Z-score} \leq +2$), Gizi Kurang ($-3 < \text{Z-score} \leq -2$), Gizi Buruk (Z-score ≤ -3). <p>Bila balita termasuk dalam kelompok butir c. Gizi Kurang dan butir d. Gizi Buruk, maka balita disebut sebagai bergizi kurang.</p>

	<p>Prevalensi Balita Kurang Gizi = $\frac{\text{Jumlah balita kurang gizi}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$</p>
20	<p><i>Status Gizi Perempuan Dewasa</i></p> <p>Status gizi perempuan dewasa diukur dengan anthropometri, yaitu lingkaran lengan atas (Lila).</p> <p>Prevalensi Gizi Perempuan Dewasa Baik = $\frac{\text{Jumlah perempuan dewasa dengan Lila diatas 23.50 cm}}{\text{Jumlah perempuan}} \times 100\%$</p>



Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)



Penyusunan dan Analisis Data Terpilah untuk PPRG

Disampaikan oleh:
Dr. Soedarti Surbakti



Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)



Agenda Diskusi Penyusunan Data Terpilah

- ❖ Kesenjangan gender tk dunia/nasional/lokal
- ❖ Pengertian ttg gender dan data
- ❖ Relevansi data terpilah
- ❖ Manfaat data terpilah
- ❖ Menentukan jenis data terpilah
- ❖ Sumber data terpilah
- ❖ Menghitung kesenjangan gender
- ❖ Menyajikan data terpilah
- ❖ Manfaat data terpilah dlm GAP/PPRG



Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender

	Jenis kelamin	Gender
Pengertian	Perbedaan biologis laki-laki dan perempuan berikut fungsi reproduksinya berdasarkan kondisi fisiknya	Pembedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki & perempuan berdasarkan nilai sosial budaya dalam masyarakat
Pencipta	Ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar, berlaku sepanjang zaman dan di mana saja	Buatan manusia, bersifat sosial, dapat berubah, dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sesuai dgn kebutuhan, kesempatan dan komitmen., tergantung waktu dan kepatutan budaya setempat
Fungsi	Perempuan : Menstruasi, Hamil, Melahirkan dan Menyusui. Laki-laki: Membuahi (spermatozoa)	Pekerjaan rumah tangga, bekerja di kantor, jual beli di pasar, berorganisasi, mengajar, menjadi pemimpin, direktur, sekretaris, kerja sosial, mencari nafkah



Perbedaan Peran/Status Gender

- ▣ Pewaris tanah di masy. Minang vs Batak
- ▣ Mencangkul disawah masy. Batak vs Jawa
- ▣ Kuli bangunan di Bali vs Banjar
- ▣ Dulu belum ada pilot perempuan, sekarang ada
- ▣ Sebelum jaman Kartini, perempuan biasa tidak boleh sekolah, sekarang boleh
- ▣ Dulu kalau laki-laki memasak ditegur karena dianggap tabu
- ▣ P merawat anak, L mencari nafkah
- ▣ P menjadi guru, L menjadi kepala sekolah



Pengertian Terkait Isu Gender

- ▣ **Bias gender:** pandangan atau visi tentang gender yang berpihak pada jenis kelamin tertentu
- ▣ **Kesenjangan gender:** adanya perbedaan akses atau peluang antara L dan P pada suatu bidang pembangunan, sehingga berdampak pada adanya perbedaan partisipasi, kontrol masing-masing pihak yang mengakibatkan perbedaan antara keduanya dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
- ▣ **Isu gender:** suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan L dan P yang biasanya cenderung menguntungkan atau merugikan salah satu kelompok.



Kesenjangan Gender di Dunia (10 negara terendah)

Negara	GII	Negara	GII
Slovenia	0.021	Austria	0.056
Switzerland	0.030	Netherlands	0.057
Germany	0.046	Italy	0.061
Sweden	0.045	Belgium	0.068
Denmark	0.056	Norway	0.068



Kesenjangan Gender di Dunia (10 negara tertinggi)

Negara	GII	Negara	GII
Yemen	0.733	Congo	0.669
Chad	0.707	Mozambique	0.657
Afghanistan	0.705	Liberia	0.655
Niger	0.674	Central African Republic	0.654
Mali	0.673	Mauritania	0.644



Kesenjangan Gender Nasional (GII=0.500, 103)

- ❑ Keterwakilan perempuan dalam DPR 17.3%
- ❑ Rasio Gender: kesenjangan gaji/upah sekitar 74,75 persen di sektor pertanian dan 76,43 persen di sektor non-pertanian
- ❑ Proporsi Kepala Sekolah Perempuan 35,48% pada jenjang SD, 15,94% pada SMP dan 12,23% di SMA/SMK
- ❑ Perempuan korban Lalin: meninggal 22.33%; luka berat 22.32%



Kesenjangan Gender di Tingkat Lokal

Peran Perempuan (%) dalam Pengambilan Keputusan Publik

Kabupaten	Legislatif	Eksekutif	Yudikatif
Malang	18.0	31.90	41.20
Lomut	4.00	8.90	56.25
Flotim	6.70	27.00	06.00
Manokwari	4.00	19.30	31.80
Merauke	20.0	38.50	18.70



Pendekatan Pembangunan Terkait Perempuan

Perempuan awalnya dipandang sebagai obyek upaya pembangunan kesejahteraan rakyat (gizi, KB, hamil)

- ❑ WID (Women in Development): pendekatan utk mengintegrasikan perempuan dalam proses pembangunan, secara aktif dan kreatif; teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas perempuan
- ❑ WAD (Women and Development): pendekatan yg lebih menyoroti pentingnya hubungan antara perempuan dengan fungsi dan peran domestik dan publik yg dilakukan; kerja = energi yg dikeluarkan → kerja ibu rumah tangga dihitung bekerja
- ❑ GAD: (Gender and Development)



Dasar Hukum Penyusunan Data Terpilah

- ❑ Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- ❑ PMK No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L
- ❑ Dalam RPJMN 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan, selain *good governance* dan pembangunan yang berkelanjutan
- ❑ Dalam RPJMN 2010-2014, kesetaraan gender merupakan salah satu yang diarusutamakan dalam pembangunan nasional
- ❑ Pemendiknas No. 20 Tahun 2008 ttg PUGDIK
- ❑ Permen PPPA No. 6 Tahun 2009 ttg Data Gender/Anak
- ❑ Permendagri No. 67 Tahun 2011 ttg POKJA PUG/PPRG
- ❑ Strategi Nasional PPRG
- ❑ Peraturan Bupati Malang No. 34/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)



Data

- ❑ **Data:** adalah kumpulan nilai variabel (datum) yang dinyatakan baik dalam bentuk angka kuantitatif maupun kualitatif atau atribut.
- ❑ Contoh 1: Lama sekolah si A= 8 tahun
Lama sekolah si B = 9 tahun
Lama sekolah si C= 10 tahun
Lama sekolah si D= 10 tahun
Lama sekolah si E= 10 tahun
- ❑ Contoh 2: Penyakit si F adalah **pneumonia**
Penyakit si G adalah **malaria**
Penyakit si H adalah **ISPA**



Statistik dan Indikator (1)

- ▣ **Statistik** adalah kelompok datum atau data yang diringkas menjadi satu. Contoh: **jumlah**, range, rata-rata, modus, median.
- ▣ **Indikator/Indeks** adalah statistik yg dapat digunakan sebagai ukuran untuk membandingkan dua atau lebih kelompok penduduk atau objek yang diteliti. Contoh: Rata-rata lama sekolah kelompok 1 adalah $(8+10+9+10+10)/5=9.40$ tahun, median **10** tahun, modus= **10** tahun
- ▣ Dalam pengertian umum, statistik, indikator maupun indeks juga dikatakan sebagai data.



Statistik dan Indikator (2)

- ▣ **Indikator tunggal** adalah indikator yang mewakili satu variable. Contoh: Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS)
- ▣ **Indikator komposit** adalah suatu indikator gabungan yang diperoleh dari gabungan nilai-nilai dua atau lebih variabel. Contoh: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- ▣ **Data dasar** adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik oleh pemerintah maupun masyarakat; umumnya oleh BPS
- ▣ **Data sektoral** adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sektor



Data Terpilah

- ▣ Data dapat dipilah menurut berbagai ciri atau karakter
- ▣ Manfaat data terpilah adalah untuk melokalisir atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan
- ▣ Jenis analisis menggunakan data terpilah, antara lain:
 - Terpilah menurut jenis kelamin → analisis gender
 - Terpilah menurut gol sosek → analisis kemiskinan
 - Terpilah menurut kelompok/umur → analisis kohort
 - Terpilah menurut wilayah → analisis spasial
 - Terpilah menurut waktu → analisis time series
- ▣ Untuk selanjutnya data terpilah menurut jenis kelamin disebut sebagai data terpilah



Rasio APM menurut Golongan Pendapatan (Analisis Kemiskinan)

Kesenjangan pendidikan	Termiskin (40% terendah)	Menengah (40% ditengah)	Terkaya (20% teratas)
Rasio APM-SD	100.58	98.81	99.93
Rasio APM-SMP	108.97	103.36	101.86
Rasio APM-SMA	101.55	103.16	91.23
Rasio APM-PT.	134.15	128.63	98.94

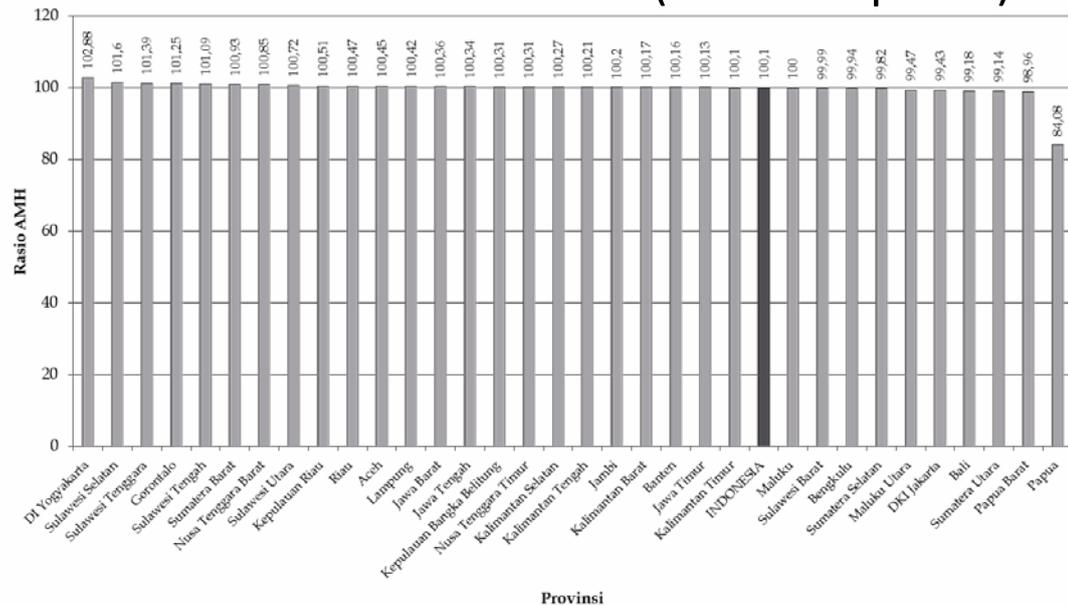


Kohort Siswa SD (TA2000/2001 sd TA2005-2006) (Analisis Kohort)

Tahun Masuk	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6	Lulus SD	Masuk SMP
2000/01	100	91	89	86	82	77	75	59
2001/02	100	92	92	86	81			
2002/03	100	94	93	90				
2003/04	100	94	91					
2004/05	100	93						
2005/06	100							

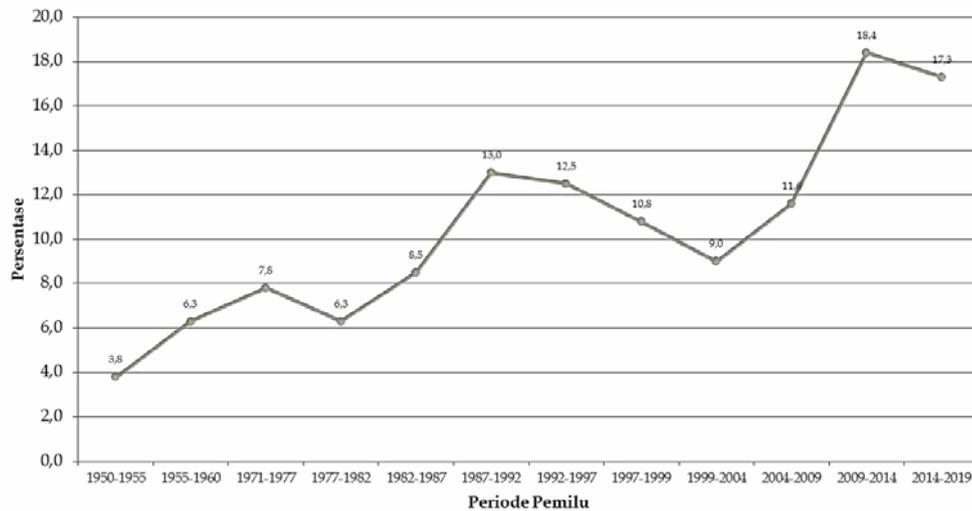


Rasio AMH menurut Provinsi (Analisis Spasial)





Keanggotaan Perempuan di DPR (1955-2014) (Analisis Time Series)



Relevansi Tersusunnya Data Terpilah

- Dapat dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan keadaan kelompok laki-laki dan perempuan, sehingga terbuka wawasan tentang adanya kesenjangan antara kedua kelompok tersebut
- Dapat dipakai untuk mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan
- Dapat dipakai untuk mengidentifikasi masalah yang dialami laki-laki dan perempuan, sehingga terbangun suatu pemahaman tentang bagaimana masalah tersebut akan diatasi.



Manfaat Khusus Data Terpilah

Sebagai prasyarat tersusunnya analisis gender dalam rangka:

- ▣ Menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) melalui Gender Budget Statement (GBS)
- ▣ Menyusun reformulasi kebijakan agar responsif gender

Metode analisis yang dianjurkan adalah:

GAP (Gender Analisis Pathway)



Upaya Menghilangkan Kesenjangan Gender di Tingkat Global (1)

Convention for The Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)

Kesepakatan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi ini telah diratifikasi Indonesia sebagai Undang-Undang No 7 Tahun 1984. Salah satu tindak lanjut dari kesepakatan tersebut adalah secara berkala memantau dan mengevaluasi kemajuan implementasi CEDAW yang berisi informasi tentang laki-laki dan perempuan di negara anggota, termasuk Indonesia →
butuh data terpilah



Upaya Menghilangkan Kesenjangan Gender di Tingkat Global (2)

Beijing Platform for Actions (BPA)

Berdasarkan kesepakatan dalam konferensi perempuan internasional pada tahun 1995 di Beijing, ada 12 isu gender yang perlu diperhatikan negara-negara di dunia. Bidang yang perlu dipedulikan termasuk bidang pendidikan/pelatihan serta kesehatan. Pemantauan dan evaluasi 12 isu gender ini dilakukan secara berkala → **butuh data terpisah**



Upaya Menghilangkan Kesenjangan Gender di Tingkat Global (3)

Millenium Development Goals (MDGs)

- ▣ Kesepakatan dunia untuk mensejahterakan masyarakat ini disepakati pada tahun 2000 oleh 189 negara PBB
- ▣ Kesepakatan ini berisi rincian tentang delapan (8) tujuan pembangunan milenium atau MDGs.
- ▣ **Tujuh** dari delapan tujuan tersebut secara langsung menyangkut gender, pendidikan/ pelatihan dan kesehatan, yaitu Goal 1: Gizi, Goal 2: Pendidikan, Goal 3: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Goal 4: Kematian Bayi Balita, Goal 5: Kematian Ibu, Goal 6: Penyakit Menular; Goal 7: Air dan Sanitasi
- ▣ **Data terpisah dibutuhkan untuk melihat pencapaian tujuan MDGs**



Upaya Menghilangkan Kesenjangan Gender di Tingkat Nasional

Affirmative Action, suatu perlakuan khusus utk perempuan

Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional

- PUG adalah suatu strategi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan kepentingan, aspirasi dan kondisi laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapan manajemen pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi pembangunan. Berkaitan dengan hal itu, **data terpilah sangat diperlukan untuk melihat keberhasilan PUG dalam mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender (KKG)**



Kesetaraan dan Keadilan Gender

- Keadilan gender didasarkan pada adanya perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan karena **kebutuhannya** yang berbeda. Contoh: bangau dan kucing, Rasi dan Rakok, BNPB
- Kesetaraan gender bertolak dari keinginan agar L dan P dapat **berkembang optimal tanpa terkendala jenis kelaminnya**. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi L dan P untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dalam pembangunan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Contoh: sekolah tinggi OK; menjadi guru OK; menjadi kepek tidak OK



Jenis Data dalam Permen KPPPA No. 06 Tahun 2009 (1)

Jenis data terpilah

- ▣ Bidang kesehatan
- ▣ Bidang pendidikan
- ▣ Bidang ekonomi dan ketenagakerjaan
- ▣ Bidang politik dan pengambilan keputusan
- ▣ Bidang hukum dan sosial budaya
- ▣ Kekerasan terhadap perempuan



Jenis Data dalam Permen KPPPA No. 06 Tahun 2009 (2)

Pendidikan:

- ▣ APK, APS, dan APM menurut jenjang pendidikan
- ▣ Angka Melek Huruf menurut kelompok umur
- ▣ Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan
- ▣ Penduduk menurut jenjang ijazah tertinggi
- ▣ Rata-rata Lama Sekolah
- ▣ Jumlah pelanggan saluran telpon
- ▣ Jumlah pengguna komputer
- ▣ Jumlah pengguna internet



Jenis Data Terpilah Pendidikan Pedoman Kemendikbud

Berbasis pada 3 pilar pembangunan pendidikan:

- ▣ Perluasan dan pemerataan akses pendidikan
Partisipasi sekolah PAUD hingga Perguruan Tinggi
Partisipasi pendidikan non-formal, dll
- ▣ Mutu dan relevansi pendidikan
Nilai, putus sekolah, angka melanjutkan, dll
- ▣ Tata kelola/manajemen pendidikan
Kepala sekolah, pengawas, penilik, dll



Jenis Data dalam Permen KPPPA No. 06 Tahun 2009 (3)

Kesehatan

- ▣ Angka Harapan Hidup
- ▣ Angka Kematian Ibu melahirkan dan penyebab
- ▣ Pemeriksaan ibu hamil dan penolong persalinan
- ▣ Imunisasi TT dan pemberian pil Fe ibu hamil
- ▣ Aborsi pada remaja putri
- ▣ Penderita HIV/AIDS
- ▣ Peserta KB
- ▣ Usia perkawinan pertama, pengguna Napza



Jenis Data Terpilah Kesehatan Pedoman Kemenkes

- Perilaku kesehatan (seperti kebiasaan merokok, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan)
- Derajat kesehatan (seperti morbiditas, KLB, AKI, AKB, status gizi bumil dan balita, dan BBLR)
- Upaya kesehatan (seperti pemeriksaan kehamilan/K4, Ponek, Poned, imunisasi, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, dan sosialisasi)
- Sumber daya kesehatan (seperti fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan jaminan kesehatan).



Menentukan Jenis Data Terpilah Sektor di Tingkat Daerah

Basis Penentuan Jenis Data yg Umum:

- ▣ Permen KPPPA No. 06 Tahun 2009
(jumlah minim, terlalu makro, sedang diperbarui)
- ▣ MDGs (Inpres No 3 tahun 2010)
(jumlah minim, terlalu makro)
- ▣ PUG
- ▣ Pedoman Teknis Penyusunan Data Terpilah K/L

Basis Penentuan Jenis Data yg Spesifik Daerah:

- ▣ Visi/misi/kebijakan/program/kegiatan Pemda, seperti tercantum dalam RKPD, Renstrada, RKA-SKPD



Kata Kunci PUG untuk Menentukan Jenis Data Terpilah

- ▣ Integrasi gender dalam setiap tahapan manajemen: perencanaan, pelaksanaan dan money → indikator integrasi sulit diukur → dibuat proksi indikator atau pendekatan → **kontribusi L dan P sebagai pelaku pembangunan**
- ▣ Kesetaraan dan keadilan gender dalam memperoleh manfaat pembangunan → diukur dengan **proporsi L dan P yang menjadi target program/kegiatan pembangunan (Pemanfaat hasil pembangunan)**



Kontribusi L dan P sebagai Pelaku Pembangunan Daerah

Besarnya kontribusi L dan P dalam pembangunan daerah digambarkan dengan komposisi Pegawai Pemda menurut:

- ▣ Eselon
- ▣ Golongan kepangkatan
- ▣ Ijazah tertinggi yg dimiliki
- ▣ Diklatpim tertinggi yang ditamatkan
- ▣ Masa kerja
- ▣ Jabatan fungsional/struktural, dll

→ Sumber data adalah BKD



Proporsi L dan P sebagai Pemanfaat Hasil Pembangunan

L dan P yang mendapat manfaat dari jenis output pembangunan seperti tercantum dalam RKPD, Renstrada atau RKA- SKPD

- ▣ Pengaturan: dokumen pengaturan bias gender?
- ▣ Peningkatan Kapasitas SDM: apakah pegawai L dan P sama-sama ditingkatkan kapasitasnya?
- ▣ Pelayanan/Pemberdayaan Masyarakat: siapa yang dilayani/ diberdayakan?
- ▣ Bangunan Fisik: apakah proses dan hasil sudah responsif gender?
- ▣ Terawasinya pelaksanaan pembangun: dokumen hasil pengawasan bias gender

→ Sumber data: SKPD



Dokumen Pengaturan/Hasil Pengawasan Bias Gender?

- ▣ Penelitian dapat dilakukan dengan membuat analisis isi (*content analysis*) dari dokumen pengaturan atau dokumen hasil pengawasan. Identifikasi apakah isi dokumen memihak L, P atau netral?
- ▣ Memakai alat 'lensa gender' dari KPPPA untuk melihat keberpihakan
- ▣ Memakai alat 'audit gender' dari ILO untuk melihat keberpihakan



Dokumen Pengaturan/Hasil Pengawasan Bias Gender?

- ▣ Penelitian dapat dilakukan dengan membuat analisis isi (*content analysis*) dari dokumen pengaturan atau dokumen hasil pengawasan. Identifikasi apakah isi dokumen memihak L, P atau netral?
- ▣ Memakai alat 'lensa gender' dari KPPPA untuk melihat keberpihakan
- ▣ Memakai alat 'audit gender' dari ILO untuk melihat keberpihakan



Peningkatan Kapasitas SDM-Pemda

Siapa, L atau P yang mendapat manfaat dari program/kegiatan pendidikan dan pelatihan?

- ▣ Akses: SDM L/P sama-sama punya akses; lihat aturannya: yang sudah kawin, yang sudah punya anak, dapat membawa keluarga, dll
- ▣ Kontrol: siapa yg punya kontrol dalam pengambilan keputusan dan menentukan peserta
- ▣ Pemanfaat: berapa proporsi SDM L/P yang tugas belajar atau ikut diklat penjejangan



Pelayanan/Pemberdayaan Masyarakat

Siapa anggota masyarakat, L atau P yang mendapat manfaat dari kegiatan pelayanan dan pemberdayaan?

- ▣ Pelayanan pendidikan:
 - L/P yg sekolah PAUD s/d Perguruan Tinggi
 - L/P yg dicakup dalam kursus *life skill*
 - L/P yg dicakup dlm kursus buta aksara fungsional
- ▣ Pelayanan kesehatan
 - L/P yg berobat di RS, Puskesmas, Pustu
 - Balita Lk/P yg diimunisasi
 - Balita KEK L/P yg diberi makanan tambahan
 - Ibu hamil yang mendapat K4



Bangunan Fisik

Apakah fasilitas2 dlm bangunan sdh responsif gender?

- ▣ Ruang ASI
 - ▣ Tangga
 - ▣ Kamar mandi/WC/ yang terpisah L dan P
 - ▣ Air (kualitas & jumlah)
 - ▣ Tidak gelap dan aman
- Kegiatan yang melibatkan orang sebelum membuat bangunan, seperti sosialisasi, pelatihan teknis, pembebasan lahan, ganti rugi, dll perlu ada pemilahan menurut jenis kelamin



Sumber Data

- ▣ BPS: Data Dasar
Sensus Penduduk (SP),
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Kor: data pokok (Kab.); Modul: data rinci (Prov.)
- ▣ SKPD: Data Sektoral
SKPD-Pendidikan: SDM
Satuan Pendidikan: Guru, siswa, tenaga admin
- ▣ SKPD-Kesehatan: SDM
- ▣ Satuan yankes: pasien-umur, jenis kelamin, penyakit



Beda Sumber Beda Data

- ▣ BPS: Data dasar
Berbasis komunitas, dlm batas admin
Pelayanan: Sekolah Perawat, Rumah Sakit swasta
Metode pencacahan: umumnya sampling
- ▣ SKPD: Data sektoral
Berbasis pelayanan, tdk ada batas admin
Populasi untuk menghitung indikator cakupan:
→ penduduk dan admin
Metode pencacahan lengkap



Menghitung Indikator untuk Mengukur Kesenjangan Gender

- ▣ Deviasi jumlah?
- ▣ Indeks Paritas Gender adalah hasil bagi nilai indikator perempuan terhadap nilai indikator laki. Contoh: Rasio (APM P/APM L)
- ▣ Perbedaan Gender adalah beda nilai kontribusi atau % perempuan dan laki-laki. Contoh perbedaan % P dan L yang menjadi Kepala Sekolah ($\% \text{Kepsek P} + \% \text{Kepsek L} = 100\%$)
- ▣ Rasio Jenis Kelamin (RJK)/Rasio Gender adalah hasil bagi % L dengan % P ($\% \text{Kepsek P} + \% \text{Lepsek L} = 100\%$)
- ▣ Kesenjangan gender ukuran kualitatif



Bagaimana Menyajikan Data Terpilah

- ▣ Data dalam bentuk tabel
= Jumlah dan persentase
- ▣ Interpretasi tabel dalam bentuk narasi atau analisis sederhana
= Penjelasan tentang adanya isu gender dan faktor penting yang berkaitan
- ▣ Gambar dan peta tematik
= Penekanan isu gender yang menonjol



Penyajian Data Terpilah dalam Bentuk Tabel

- ▣ Untuk menggambarkan komposisi keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan; dilakukan dengan mengkonversi jumlah laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam kegiatan tersebut pada suatu sub-populasi dengan 100%
- ▣ Untuk menggambarkan perbandingan nilai indikator keterlibatan/partisipasi dalam suatu kegiatan secara relatif antara laki-laki dan perempuan; dilakukan dengan menyusun tabel dengan jumlah % masing-masing kelompok laki-laki atau kelompok perempuan menjadi 100%



Penyajian Data Terpilah dalam Bentuk Narasi

- ▣ Penyajian data dalam bentuk narasi atau uraian ringkas dan analisis deskriptif dalam buku data terpilah dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang isi tabel, arti data yang mungkin dapat menggambarkan isu gender dan sepanjang memungkinkan mencari faktor-faktor yang terkait isu tersebut.

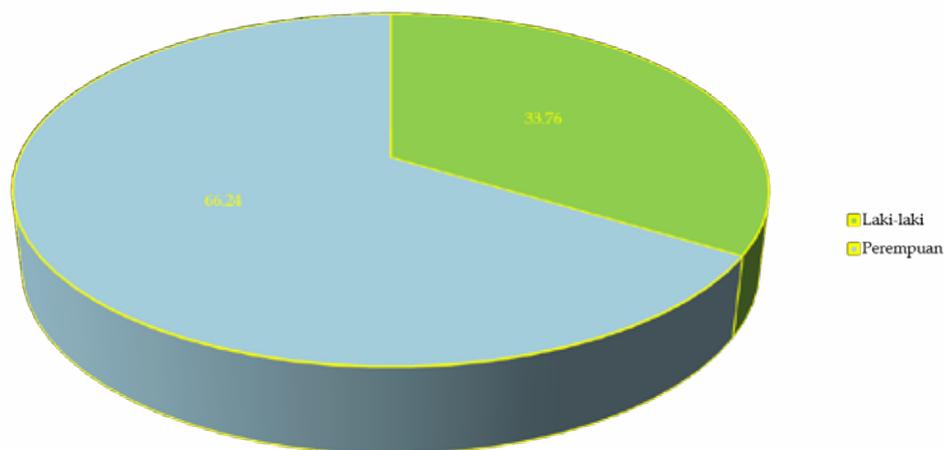


Penyajian Data Terpilah dalam Bentuk Gambar

- ▣ Penyajian data dalam bentuk gambar sangat membantu pembaca untuk secara cepat menerima pesan yang digambarkan data mengenai fakta di lapangan. Gambar lebih mudah dimengerti dan mudah dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan daripada angka dan bentuk penyajian data yang lain. Ini disebabkan oleh manipulasi warna atau bentuk yang dapat dibuat untuk menggambarkan isu yang ada
- ▣ Tidak semua tabel perlu digambarkan

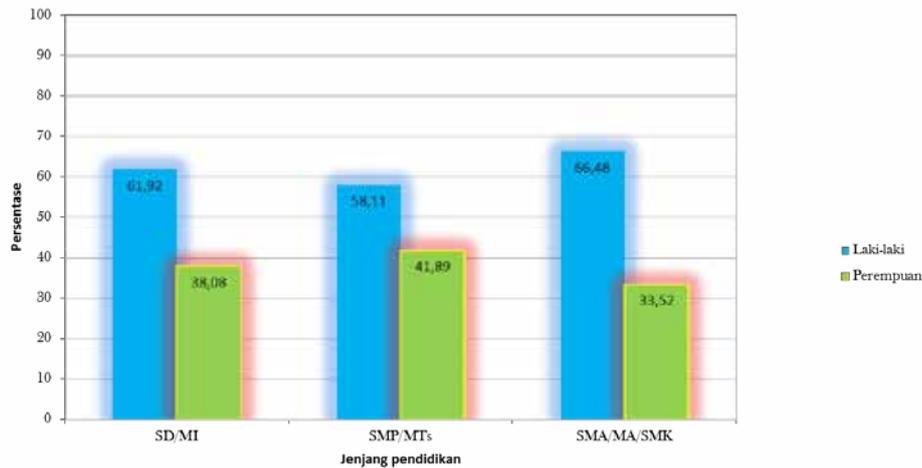


Persentase Penduduk Buta Aksara menurut Jenis Kelamin, Kab. Malang 2011/2012





Persentase Siswa Putus Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Sekolah, Kab. Malang, 2011/2012



Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki menurut Jenjang Pendidikan Kab. Flores Timur, NTT, 2011-2013

Jenjang pendidikan	2011	2012	2013
SD	99.29	100.05	97.21
SMP	109.04	101.01	99.37
SMA	118.01	103.26	95.20



Penjelasan Tabel dengan Analisis Sederhana

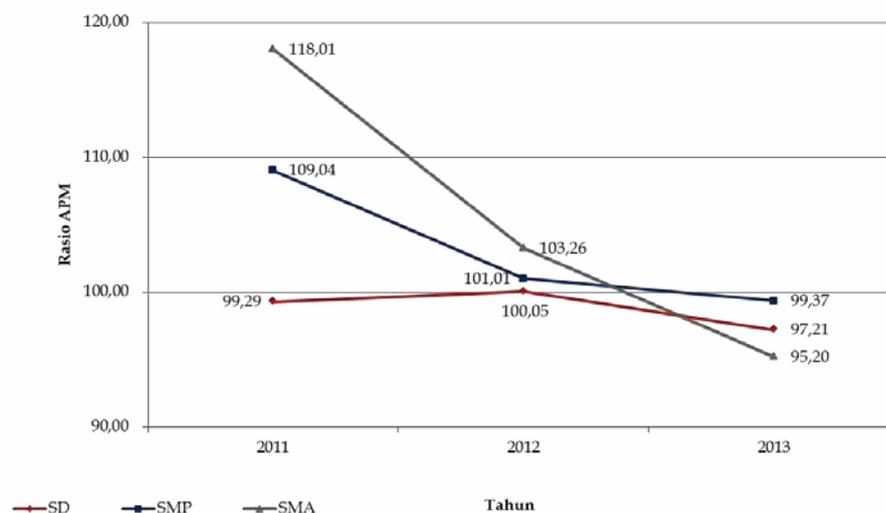
Dalam periode tahun 2011-2013, Indeks Paritas Gender berfluktuasi, baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA.

Pada tingkat SD APM laki-laki dan perempuan seimbang; nilainya berada pada kisaran 95-105.

Sementara itu pada jenjang SMP dan SMA partisipasi sekolah anak perempuan yang pada tahun 2011 jauh melebihi partisipasi anak laki-laki, dan mulai seimbang pada tahun 2012 dan 2013.



Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki menurut Jenjang Pendidikan Kab. Flores Timur, NTT 2011-2013





Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

- ▣ Instrumen untuk mengatasi kesenjangan APKM dalam pelaksanaan pembangunan antara L & P akibat tatanan sosial budaya yang berlaku guna mewujudkan (KONDISI) anggaran yang lebih berkeadilan
- ▣ Bukan membuat sistem tersendiri
- ▣ Bukan untuk memisahkan anggaran untuk L dan P
- ▣ Menjawab masalah/isu gender dengan integrasi aspirasi L/P
- ▣ Sama-sama menentukan prioritas kebutuhan yang strategis dan praktis



Cara Menyusun PPRG

Tahap 1	Tahap 2		
Renja	ARG	GBS	TOR (5W+1H)
		GAP (Langkah 2 dst) <ul style="list-style-type: none"> • Data • Kesenjangan APKM • Penyebab Isu gender • Keb. Baru • Indikator • Ren. Aksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum • Dasar kebijakan • Analisis situasi Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Input • Output • Waktu



Prinsip Anggaran Responsif Gender (ARG)

- ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan
- ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan
- ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi anggaran
- Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan.
- Bukan berarti alokasi ARG hanya berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan
- ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan
- Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender



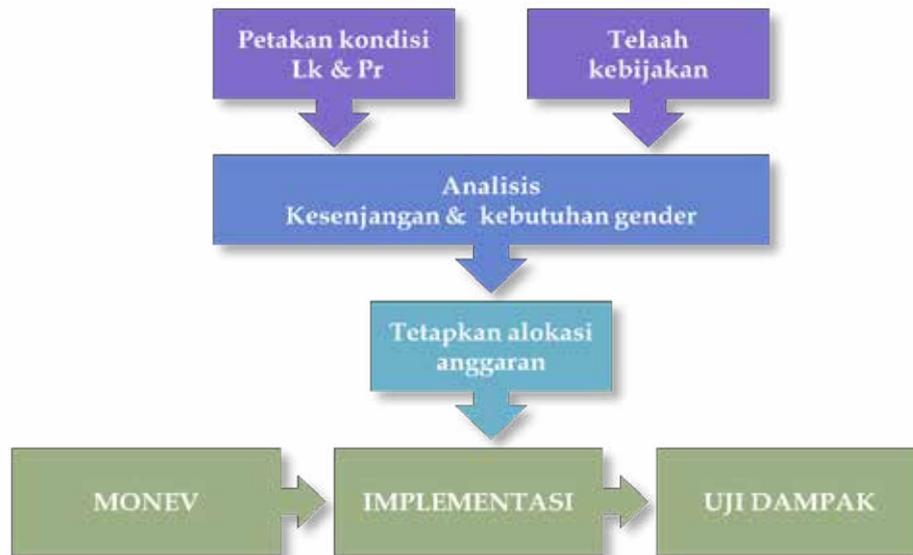
Manfaat Anggaran Responsif Gender (ARG)

Bagi perempuan dan masyarakat:

- Memperkuat inisiatif monitoring dan advokasi
- Informasi untuk melawan diskriminasi, pemborosan dan penyalahgunaan
- Mengkritisi kinerja dan akuntabilitas pejabat publik
- Mengetahui kebutuhan kelompok miskin dan tak berdaya
- Terakomodirnya aspirasi & kebutuhan L dan P secara berimbang
- Meningkatkan APKM dari proses pembangunan



Mekanisme Penetapan ARG



Inti Analisis GAP

- ▣ Kebijakan sering diaku sebagai netral gender, tetapi kelompok tertentu lebih diuntungkan dari kelompok lain
- ▣ Data terpilah bermanfaat sebagai pembuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender
- ▣ Kesenjangan dapat diteliti apakah berasal dari Akses, Kontrol, Partisipasi atau Manfaat (APKM)
- ▣ Penyebab kesenjangan (internal atau external lembaga)
- ▣ Rencana aksi untuk mempersempit kesenjangan
- ▣ Menentukan baseline data
- ▣ Menentukan indikator

Sembilan Langkah GAP

Analisis kebijakan yang responsif gender

- 1 - Pilih kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis .
 - Identifikasi dan tuliskan tujuan kebijakan/program/kegiatan
- 2 - Siapkan data pembuka wawasan terpilah menurut jenis kelamin (kualitatif dan kuantitatif)

Isu gender

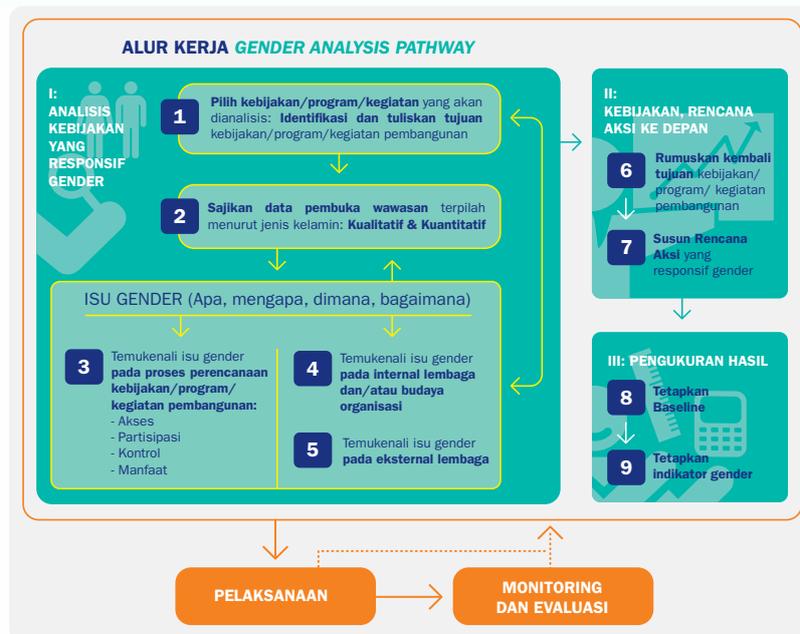
- 3 - Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan
- 4 - Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi
- 5 - Temu kenali isu gender di eksternal lembaga

Kebijakan rencana ke depan

- 6 - Rumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan
- 7 - Susun rencana aksi yang responsif gender

Pengukuran hasil

- 8 - Pengukuran hasil tahapan baseline
- 9 - Pengukuran hasil tahapan Indonesia gender

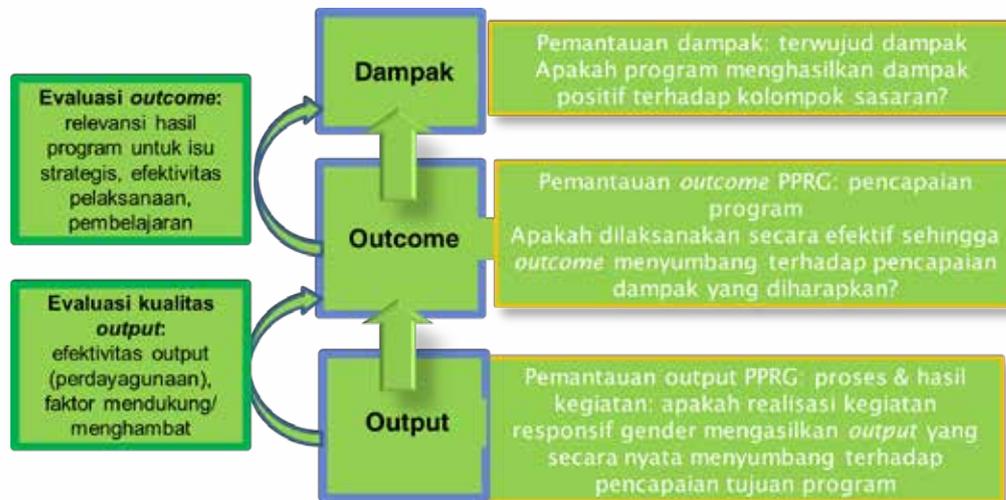


Sumber: Rosalin Lenny N, et al., 2001; Bappenas dan Kementerian PPPA, 2007



Pemantauan dan Evaluasi PPRG

Pertanyaan utamanya: “Apakah PPRG dilaksanakan secara efektif sehingga program dan kegiatan responsif gender dapat terrealisasi dan menghasilkan dampak positif terhadap kelompok sasaran?”



Terima kasih

